



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(LPPD)  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BIMA  
TAHUN 2025**



## WALIKOTA BIMA

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bima Tahun 2024 ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local govermance*) yang dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksana peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kota Bima Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Muatan LPPD ini juga berusaha menerapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk melihat seberapa jauh tingkat capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan ukuran kinerja pemerintahan terhadap realisasi tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang diselenggarakan oleh daerah. Dengan pengukuran sistem kinerja yang




**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

baku sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda, diharapkan LPPD ini mampu memberikan gambaran objektif terhadap perjalanan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bima pada Tahun 2024.

Perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Bima Untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kota Bima di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi dalam **Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri**. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bima Tahun 2024 yang juga disertai dengan Lampiran Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024 mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan dimasa akan datang.

Kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga berbagai saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaannya di kemudian hari. Demikian untuk maklum dan semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua, Amin.

Raba-Bima,      Maret 2025

 **WALI KOTA BIMA,**  
**H. A. RAHMAN, SE**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Penjelasan Umum .....	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daeran .....	80
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	139
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....	151
2.1. Capaian Kinerja Makro .....	151
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.....	153
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	171
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....	308
1. Dasar Hukum Tugas Pembantuan .....	308
2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan.....	309
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	310
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....	319
4.1. Urusan Pendidikan .....	319
4.2. Urusan Kesehatan.....	326
4.3. Urusan Pekerjaan Umum .....	337
4.4. Urusan Perumahan Rakyat .....	345
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	352
4.6. Urusan Sosial .....	365
4.7. Program dan Kegiatan.....	372
BAB V PENUTUP.....	378
LAMPIRAN .....	380



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

##### 1.1.1. Penjelasan Umum

###### a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pemekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini terlihat dari peningkatan jumlah Daerah Otonom Baru. Total daerah otonom di Indonesia pada tahun 2023, jumlah daerah otonom menjadi 548 yang terdiri dari 416 Kabupaten, 98 Kota dan 38 Provinsi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 adalah sebagai dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.



- 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18 tersebut di atas mengatur tentang pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk melancarkan jalanya pemerintahan dan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan kesatuan bangsa.

Dalam rangka melaksanakan amanat pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 32 Ayat (1) menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.



Pada Tahun 2002 Kota Bima di mekarkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 melalui pembentukan wilayah Kota Bima. Sebagai sebuah daerah yang baru terbentuk, Kota Bima memiliki karakteristik perkembangan wilayah yaitu : pembangunan infrastruktur yang cepat, perkembangan sosial budaya yang dinamis, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi.

b. Data Geografis Wilayah

1) Batas Administrasi

Kota Bima Secara geografis berada di bagian timur Pulau Sumbawa yang terletak antara  $118^{\circ} 41' 00''$  Bujur Timur -  $118^{\circ} 48' 00''$  Bujur Timur dan antara  $8^{\circ} 30' 00''$  Lintang Selatan -  $8^{\circ} 20' 00''$  Lintang Selatan. Luas Wilayah Kota Bima adalah sebesar  $222,25 \text{ Km}^2$  yang terbagi dalam 5 (Lima) kecamatan. Adapun secara administratif Kota Bima berbatasan dengan wilayah-wilayah :

- ❖ Bagian Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.
- ❖ Bagian Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.
- ❖ Bagian Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.
- ❖ Bagian Barat : Teluk Bima.

Kota Bima memiliki areal tanah berupa : persawahan seluas  $1.923 \text{ ha}$  ( $94,90\%$  merupakan sawah irigasi), hutan seluas  $13.154 \text{ ha}$ , tegalan dan kebun seluas  $3.632 \text{ ha}$ , ladang dan huma seluas  $1.225 \text{ ha}$  dan wilayah



pesisir pantai sepanjang 26 km. Secara umum kondisi tanah di Kota Bima didominasi oleh gunung batu, hal ini menyebabkan rata-rata masyarakatnya bertani dengan menanam jagung dan tanaman keras lainnya.

## 2) Ketinggian

Wilayah Kota Bima umumnya didominasi oleh dataran rendah dimana daerah yang berada pada ketinggian antara 3 – 14 mdpl.

Tabel. 1. 1. Tinggi Wilayah dan Jarak Ibu Kota Kecamatan

Kecamatan-	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak dari Ibu Kota Bima (Km)
1	2	3
Asakota	47	5,2
Rasanae Barat	3	2,7
Mpunda	14	1,6
Raba	14	1,6
Rasanae Timur	70	5,2

Sumber :BPS Kota Bima (Kota Bima Dalam Angka 2024)

## 3) Klimatologi

Wilayah Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2024 sebesar 143,7 mm<sup>3</sup>/th, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan April yaitu 205,9 mm<sup>3</sup> dan terendah pada bulan juli, yaitu 0 mm<sup>3</sup>. Rata-rata hari hujan selama tahun 2024 tercatat 10 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada Bulan Februari yaitu 22 hari dan terendah pada bulan Juli



sebanyak 1 hari hujan.

Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2024 sebesar 82,34%, tertinggi 95% pada Bulan Februari dan terendah 21,2% pada Bulan September. Temperatur berkisar pada interval antara suhu minimal 21,2-25,4°C pada Bulan Agustus dan suhu maksimum 25,4°C pada Bulan Desember, dengan rata-rata suhu 23,5°C.

Tabel. 1. 2. Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2024 di Kota Bima

Bulan	Curah Hujan (mm <sub>3</sub> )	Hari Hujan (hh)	Penyinaran Matahari (%)
1	2	3	4
Januari	260	16	5,70
Februari	228	17	5,90
Maret	221	15	5,00
April	144	9	5,70
Mei	1	1	8,70
Juni	-	-	7,50
Juli	39	2	8,10
Agustus	12	1	9,80
September	-	-	9,00
Oktober	28	2	10,10
November	245	11	7,90
Desember	491	17	3,80
Rata-Rata	96,25	13,90	8,12

Sumber :BPS Kota Bima (Kota Bima Dalam Angka 2024)



Tabel. 1. 3. Keadaan Unsur Iklim Dirinci per bulan di Kota Bima Tahun 2024

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-rata	Max	Min	Rata-rata	Max
1	2	3	4	5	6	7
Januari	25,2	28,4	33,3	77	86	93
Februari	25,3	28,0	32,6	82	88	93
Maret	25,0	28,0	32,4	82	87	92
April	25,1	28,1	32,8	75	85	91
Mei	24,4	28,1	33,7	74	80	84
Juni	22,8	27,1	32,6	72	80	87
Juli	22,4	26,4	32,3	71	82	90
Agustus	23,1	26,8	33,5	69	76	88
September	24,2	28,1	34,9	67	74	85
Oktober	25,9	29,6	36,3	64	71	80
November	24,6	28,9	34,5	67	78	87
Desember	25,5	27,4	31,8	79	85	93
Rata-Rata	25,7	27,41	33,45	72,21	80,42	89,15

Sumber :BPS Kota Bima (Kota Bima Dalam Angka 2024)

#### 4) Geologi

Wilayah Kota Bima dan sekitarnya secara geomorfologi dan berdasarkan morfometri dan morfogenesis dapat dikelompokkan ke dalam beberapa satuan geomorfologi, yaitu:



a) Satuan geomorfologi dataran fluvial

Di daerah Kota Bima ini terhampar diantara perbukitan disekitarnya dan Teluk Bima yang terletak di tengah-tengah daerah Kota Bima memanjang dari Barat ke Timur melalui celah antara Dora Pokah dengan Doro Kolo. Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm 20\%$  dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian utara dan bagian selatan lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran fluvial, meliputi daerah Jatibaru, Sadia, Sambinae, Monggonao, Paruga, Nae, Santi, Penatoi, Penaraga, Rabangodu, Rabadompu, Kumbe, Sadia, Kendo, Tato, Lampe, dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran fluvial ini memiliki nilai beda tinggi rata-rata 3 meter dan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir dan lempung.

b) Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional

Disusun oleh batuan hasil gunung api tua, batuan sedimen dan setempat-setempat oleh batu gamping koral. Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm 30\%$  dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional, meliputi : daerah Doro Oi mbo, Doro Oi si'i, Doro Jati Oi fo'o, Nitu dan sekitarnya. memiliki nilai beda tinggi rata-rata 42 meter dan kemiringan lereng

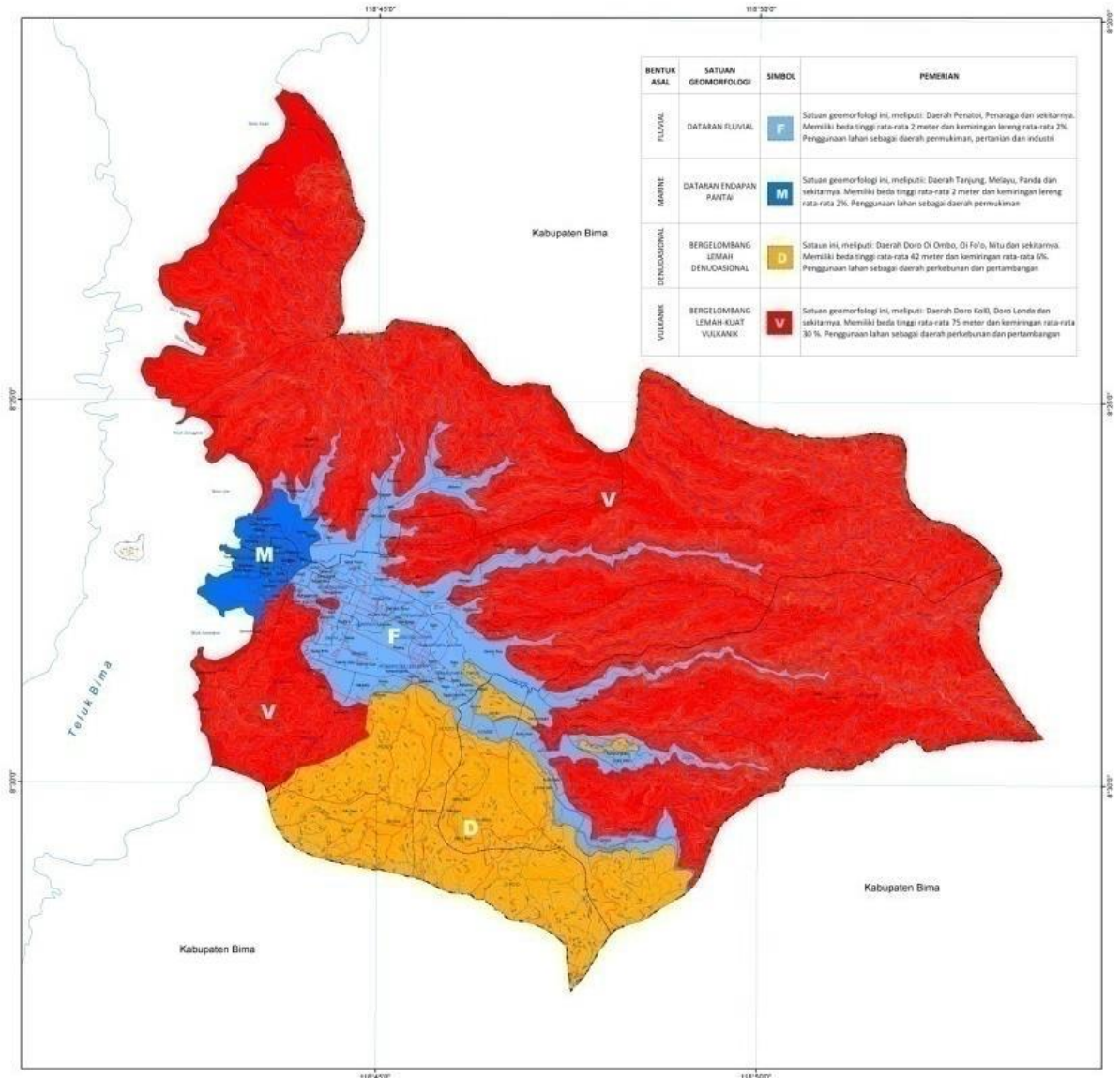


rata-rata sebesar 6%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah batu gamping dan batu pasir.

- c) Satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik

Disusun oleh batuan hasil gunung api tua berupa breksi, lava, tuf dan batuan beku terobosan. Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm$  40% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah dan bagian selatan lokasi Kota Bima satuan geomorfologi bergelombang lemah-kuat vulkanik, meliputi: daerah Doro Kolo, Doro Lewamori, Doro Lalepa, Doro Londa dan sekitarnya. Memiliki nilai beda tinggi rata-rata 75 meter dan kemiringan lereng rata-rata sebesar 13%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah andesit dan tuf.

Peta. 1. 1. Geomorfologi Kota Bima



### 5) Hidrologi

Wilayah Kota Bima dilewati oleh 7 (tujuh) sungai. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu di sebelah utara dan timur Kota Bima, dan bermuara menuju Teluk Bima. Sungai terpanjang adalah Sungai Lampe yang memiliki panjang 25 km. Air sungai dimanfaatkan antara lain sebagai sumber air minum dan pengairan/irigasi.



Tabel. 1. 5. Sungai di Kota Bima Tahun 2023

Nama Sungai	Panjang Sungai (km)	Lebar Sungai (m)	Kecamatan	
			Hulu	Hilir
1	2	3	4	5
Sungai Lampe	23	22-30	Rasanae Timur	Rasanae Barat
Sungai Dodu	12	20	Rasanae Timur	Rasanae Timur
Sungai Nungga	22	20	Rasanae Timur	Mpunda
Sungai Kendo	15	15	Raba	Rasanae Barat
Sungai Ntobo	12	20	Raba	Rasanae Barat
Sungai Jatiwangi	16	15	Asakota	Asakota
Sungai Romo	2	12	Asakota	Asakota

Mata air yang ada di Kota Bima teridentifikasi berada di beberapa lokasi, terutama di Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Asakota. Mata air ini sebagian sudah dimanfaatkan oleh warga sebagai air baku air minum dan untuk mata air dengan debit yang besar telah dimanfaatkan oleh PDAM sebagai sumber air baku.

c. Informasi Umum Data Penduduk

Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu atau sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2024 mencapai 163.824



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

jiwa dengan Rincian berdasarkan masing-masing kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1. 6. Jumlah Penduduk Kota Bima

No	Kecamatan	Kelurahan		Jumlah Penduduk
1	2	3		4
1	Asakota			37.412
		1	Melayu	5.899
		2	Jatiwangi	7.813
		3	Kolo	6.377
		4	Ule	6.893
		5	Jatibaru	6.175
		6	Jatibaru Timur	4.255
2	Rasanae Barat			30.873
		1	Tanjung	6.491
		2	Paruga	5.341
		3	Sarae	5.125
		4	Nae	4.287
		5	Pane	2.688
		6	Dara	6.941
3	Mpunda			34.510
		1	Sambinae	3.663
		2	Panggi	2.849
		3	Monggonao	4.150
		4	Manggemaci	4.253
		5	Penatoi	4.841
		6	Lewirato	2.020
		7	Sadia	3.846
		8	Mande	2.956
		9	Santi	2.850
		10	Matakando	3.082
4	Raba			40.882
		1	Penaraga	5.294



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Kelurahan		Jumlah Penduduk
1	2	3		4
		2	Penanae	4.297
		3	Rite	2.482
		4	Rabangodu Utara	4.935
		5	Rabangodu Selatan	4.128
		6	Rabadompu Timur	3.816
		7	Rabadompu Barat	5.370
		8	Rontu	3.370
		9	Ntobo	3.970
		10	Kendo	1.623
		11	Nitu	1.597
5	Rasanae Timur			20.147
		1	Kumbe	3.972
		2	Lampe	1.654
		3	Oi Fo'o	2.320
		4	Kodo	2.272
		5	Dodu	3.331
		6	Lelamase	2.128
		7	Nungga	2.579
		8	Oimbo	1.891
	Jumlah			163.824

Sumber :Dinas Dukcapil Kota Bima Tahun 2023

Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kota Bima lebih di dominasi oleh perempuan yaitu dengan rincian perempuan sebanyak 82.173 jiwa (50,15%) dan rincian laki-laki sebanyak 81.651 jiwa (49,85%) dengan jumlah sebaran penduduk paling banyak di Kecamatan Raba yaitu sebanyak 40,882 jiwa.



Tabel. 1. 7. Jumlah Penduduk Kota Bima berdasarkan Jenis  
Kelamin

No	Kecamatan	Kelurahan	Penduduk		Jumlah
			Laki - Laki	Wanita	
1	2	3	4	5	6
1	Asakota				37.412
		1 Melayu	2.945	2.954	5.899
		2 Jatiwangi	3.937	3.876	7.813
		3 Kolo	3.240	3.137	6.377
		4 Ule	3.487	3.406	6.893
		5 Jatibaru	3.145	3.030	6.175
		6 Jatibaru Timur	2.110	2.145	4.255
2	Rasanae Barat				30.873
		1 Tanjung	3.266	3.225	6.491
		2 Paruga	2.654	2.687	5.341
		3 Sarae	2.590	2.535	5.125
		4 Nae	2.086	2.201	4.287
		5 Pane	1.304	1.384	2.688
		6 Dara	3.488	3.453	6.941
3	Mpunda				34.510
		1 Sambinae	1.828	1.835	3.663
		2 Panggi	1.427	1.422	2.849
		3 Monggonao	2.077	2.073	4.150
		4 Manggemaci	2.120	2.133	4.253
		5 Penatoi	2.338	2.503	4.841
		6 Lewirato	1.036	984	2.020
		7 Sadia	1.905	1.941	3.846
		8 Mande	1.429	1.527	2.956
		9 Santi	1.407	1.443	2.850
		10 Matakando	1.555	1.527	3.082
4	Raba				40.882
		1 Penaraga	2.597	2.697	5.294
		2 Penanae	2.158	2.139	4.297
		3 Rite	1.271	1.211	2.482



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Kelurahan	Penduduk		Jumlah
			Laki - Laki	Wanita	
1	2	3	4	5	6
		4 Rabangodu Utara	2.455	2.480	4.935
		5 Rabangodu Selatan	2.032	2.096	4.128
		6 Rabadompu Timur	1.860	1.956	3.816
		7 Rabadompu Barat	2.612	2.758	5.370
		8 Rontu	1.683	1.687	3.370
		9 Ntobo	1.979	1.991	3.970
		10 Kendo	806	817	1.623
		11 Nitu	798	799	1.597
5	Rasanae Timur				20.147
		1 Kumbe	1.976	1.996	3.972
		2 Lampe	810	844	1.654
		3 Oi Fo'o	1.179	1.141	2.320
		4 Kodo	1.106	1.166	2.272
		5 Dodu	1.655	1.676	3.331
		6 Lelamase	1.052	1.076	2.128
		7 Nungga	1.303	1.276	2.579
		8 Oimbo	945	946	1.891
	Jumlah		81.651	82.173	163.824

Sumber :Dinas Dukcapil Kota Bima Tahun 2024

Berdasarkan kelompok umur, kelompok usia muda (0-14 tahun) berjumlah 41.335 jiwa. Sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 112.094 jiwa dan kelompok usia non produktif (65 tahun keatas) berjumlah 10.395 jiwa. Komposisi penduduk Kota Bima menurut Struktur Usia dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. 1. 8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
00-04	5.937	5.283	11.220
05-09	7.935	7.332	15.267
10-14	7.635	7.213	14.848
15-19	7.362	6.762	14.124
20-24	6.635	6.826	13.465
25-29	6.291	6.271	12.562
30-34	6.143	6.291	12.434
35-39	6.423	6.429	12.852
40-44	6.108	6.462	12.570
45-49	5.355	5.840	11.195
50-54	4.525	4.708	9.233
55-59	3.748	4.090	7.838
60-64	2.812	3.009	5.821
65-69	1.942	2.230	4.172
70-74	1.383	1.551	2.934
≥ 75	1.413	1.876	3.289
J UMLAH	81.651	82.173	163.824

Sumber :Dinas Dukcapil Kota Bima Tahun 2024

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan dan Kelurahan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Camat dan Lurah. Kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia yang menjadi perangkat daerah kabupaten/kota dibawah kecamatan.



Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat". Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa "Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Setelah pembentukan wilayah Kota Bima pada tahun 2002, Kota Bima memiliki 5 (lima) kecamatan dan pada tahun 2017 mengalami pemekaran dari 38 (tiga puluh delapan) kelurahan menjadi 41 (empat puluh satu) kelurahan. Kecamatan Raba merupakan kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak yaitu 11 kelurahan, sebaliknya Kecamatan Asakota dan Rasanae Barat memiliki kelurahan paling sedikit sebanyak 6 kelurahan, kemudian Kecamatan Mpunda dengan jumlah 10 kelurahan dan Kecamatan Rasanae Timur dengan jumlah 8 kelurahan.

Kecamatan Asakota merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar yaitu 69,03 km<sup>2</sup> sedangkan wilayah yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 10,14 km<sup>2</sup>. Rincian luas wilayah berdasarkan masing-masing kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Tabel. 1. 9. Pembagian Wilayah Administratif Kota Bima

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	2	3	4
I.	Kecamatan Rasanae Barat	1. Kel. Tanjung 2. Kel. Paruga 3. Kel. SaraE 4. Kel. NaE 5. Kel. Pane 6. Kel. Dara	0,79 0,91 0,48 0,31 0,31 7,34
Jumlah I			10.14
II.	Kecamatan Mpunda	1. Kel. Sambinae 2. Kel. Panggi 3. Kel. Monggonao 4. Kel. Manggemaci 5. Kel. Penatoi 6. Kel. Lewirato 7. Kel. Sadia 8. Kel. Mande 9. Kel. Santi 10. Kel. Matakando	5,43 3,51 0,63 0,52 0,74 0,49 0,68 0,69 0,72 1,87
Jumlah II			15.28
III.	Kecamatan Raba	1. Kel. Penaraga 2. Kel. Penanae 3. Kel. Rite 4. Kel. Rabangodu Utara 5. Kel. Rabangodu Selatan 6. Kel. Rabadompu Timur 7. Kel. Rabadompu Barat 8. Kel. Rontu 9. Kel. Ntobo 10. Kel. Kendo 11. Kel. Nitu	0,74 5,34 1,84 0,98 1,43 0,54 1,66 4,74 31,19 9,08 6,19
Jumlah III			63.73
IV.	Kecamatan Asakota	1. Kel. Melayu 2. Kel. Jatiwangi 3. Kel. Jatibaru 4. Kel. Kolo 5. Kel. Ule 6. Kel. Jatibaru Timur	0,76 <b>11,78</b> 13,29 26,49 10,4 6,31
Jumlah IV			69,03
V.	Kecamatan Rasanae Timur	1. Kel. Kumbe 2. Kel. Lampe 3. Kel. Oi Fo' o 4. Kel. Kodo 5. Kel. Dodu 6. Kel. Lelamase 7. Kel. Nungga 8. Kel. Oimbo	1,00 7,23 9,20 5,55 7,93 21,05 11,59 0,52
Jumlah V			64.07



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	2	3	4
Jumlah I + II + III + IV + V			222,25

- e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bima yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima.

Dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kota Bima tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Maka Pemerintah Kota Bima dapat melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pemerintah Kota Bima memiliki 34 (tiga puluh Empat) Perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah yang berjumlah 21 (dua puluh satu), Badan daerah yang berjumlah 4 (empat), dan Kecamatan yang berjumlah 5 (lima).

Tabel. 1. 10. Jumlah Perangkat Daerah Kota Bima

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	PERWALI Kota Bima No. 36 Tahun 2020
2	Sekretariat DPRD	PERWALI Kota Bima No. 47 Tahun 2020
3	Inspektorat	PERWALI Kota Bima No. 35 Tahun 2016
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERWALI Kota Bima No. 40 Tahun 2016



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	2	3
5	Dinas Kesehatan	PERWALI Kota Bima No. 41 Tahun 2016
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PERWALI Kota Bima No. 79 Tahun 2020
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	PERWALI Kota Bima No. 43 Tahun 2016
8	Dinas Sosial	PERWALI Kota Bima No. 84 Tahun 2021
9	Dinas Tenaga Kerja	PERWALI Kota Bima No. 45 Tahun 2016
10	Satuan Polisi Pamong Praja	PERWALI Kota Bima No. 77 Tahun 2020
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PERWALI Kota Bima No. 88 Tahun 2020
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PERWALI Kota Bima No. 82 Tahun 2021
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	PERWALI Kota Bima No. 49 Tahun 2016
14	Dinas Ketahanan Pangan	PERWALI Kota Bima No. 103 Tahun 2021
15	Dinas Lingkungan Hidup	PERWALI Kota Bima No. 48 Tahun 2016
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PERWALI Kota Bima No. 37 Tahun 2016
17	Dinas Perhubungan	PERWALI Kota Bima No. 78 Tahun 2020
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	PERWALI Kota Bima No. 76 Tahun 2020
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PERWALI Kota Bima No. 56 Tahun 2021
20	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PERWALI Kota Bima No. 19 Tahun 2020
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PERWALI Kota Bima No. 54 Tahun 2016
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	PERWALI Kota Bima No. 55 Tahun 2016



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	2	3
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	PERWALI Kota Bima No. 96 Tahun 2021
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PERWALI Kota Bima No. 54 Tahun 2022
25	Dinas Pertanian	PERWALI Kota Bima No. 58 Tahun 2016
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PERWALI Kota Bima No. 59 Tahun 2016
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah	PERWALI Kota Bima No. 51 Tahun 2022
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PERWALI Kota Bima No. 7 Tahun 2020
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PERWALI Kota Bima No. 83 Tahun 2021
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PERWALI Kota Bima No. 97 Tahun 2021
31	Kecamatan Asakota	PERWALI Kota Bima No. 62 Tahun 2016
32	Kecamatan Rasanae Barat	PERWALI Kota Bima No. 62 Tahun 2016
33	Kecamatan Rasanae Timur	PERWALI Kota Bima No. 62 Tahun 2016
34	Kecamatan Mpunda	PERWALI Kota Bima No. 62 Tahun 2016
35	Kecamatan Raba	PERWALI Kota Bima No. 62 Tahun 2016

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota Bima, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi dan menjalankan Perangkat Daerah Kota Bima. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam



penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

- f. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah dan dipekerjakan diluar instansi induknya.

Tabel. 1. 11. Jumlah Pegawai Perangkat Daerah Kota Bima

No	Perangkat Daerah	Rincian ASN			Total
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	16	33	72	121
2	Sekretariat DPRD	5	3	20	28
3	Inspektorat	5	45	7	57
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	11	43	106	160
5	Dinas Kesehatan	20	11	47	78
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13	18	36	67
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	7	5	12	24
8	Dinas Sosial	6	13	14	33
9	Dinas Tenaga Kerja	8	3	9	20



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Perangkat Daerah	Rincian ASN			Total
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6
10	Satuan Polisi Pamong Praja	12	2	26	40
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	9	7	22
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5	10	22
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	7	7	11	25
14	Dinas Ketahanan Pangan	6	8	10	24
15	Dinas Lingkungan Hidup	11	10	87	108
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	7	15	29
17	Dinas Perhubungan	11	2	17	30
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	11	15	32
19	Dinas Pemadaman dan Penyelamatan	10	2	18	30
20	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	9	10	19	38
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	6	14	23
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	6	17	8	31
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	8	10	24
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7	15	11	33
25	Dinas Pertanian	19	55	23	85
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	16	13	33
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5	3	11	19



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Perangkat Daerah	Rincian ASN			Total
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21	5	52	78
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	15	10	31
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	7	12	26
31	Kecamatan Asakota	38	7	18	63
32	Kecamatan Rasanae Barat	36	8	15	59
33	Kecamatan Rasanae Timur	48	5	19	72
34	Kecamatan Mpunda	58	7	33	98
35	Kecamatan Raba	63	7	46	116
<b>JUMLAH</b>		509	428	804	1.741



g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Realisasi APBD

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pada tahun 2024 Pemerintah Kota Bima telah menganut anggaran surplus.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Bima pada TA 2024 senilai Rp. 911.422.634.704,00, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp.132.054.217.467,00, Dana Perimbangan senilai Rp.768.113.583.263,00, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah senilai Rp. 11.254.833.974,00.

Realisasi Pendapatan pada TA 2024 adalah senilai Rp. 899.566.234.005,82 atau (98,70%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp. 131.339.720.242,82,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

(99,46%), Dana Perimbangan senilai Rp.757.753.922.550,00 (98,65%), dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah senilai Rp. 10.472.591.213,00 (93,05%).

Anggaran Belanja pada TA 2024 senilai Rp.928.222.492.278,00 Sedangkan realisasi Belanja TA 2024 adalah senilai Rp. 893.324.937.238,00 yang terdiri dari realisasi belanja Operasi TA 2024 senilai Rp.774.585.834.029,00, realisasi Belanja Modal TA 2024 senilai Rp.117.434.068.509,00 dan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 senilai Rp. 1.305.034.700,00.

Realisasi Pendapatan pada TA 2024 senilai Rp.899.566.234.005,82, bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja TA 2024 senilai Rp. 893.324.937.238,00 maka terjadi surplus senilai Rp. 6.241.296.768,00. Sedangkan realisasi penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp. 17.799.857.573,12 dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp.1.000.000.000,00 sehingga menghasilkan SILPA TA 2024 senilai Rp.24.041.154.340,94.

Realisasi APBD Kota Bima Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1. 14. Jumlah Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2024

No	Komponen	Tahun 2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	4	5	6



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Komponen	Tahun 2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	4	5	6
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>			
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>132.054.217.467,00</b>	<b>131.339.720.242,82,00</b>	<b>99,46%</b>
4.1.01	Pajak Daerah	25.785.050.685,00	23.187.321.164,51	89,93%
4.1.02	Retribusi Daerah	24.423.958.139,00	25.377.140.488,40	103,90%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.656.772.700,00	2.622.635.153,00	158,30%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.188.435.943,00	80.152.623.436,91	99,96%
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>768.113.583.263,00</b>	<b>757.753.922.550,00</b>	<b>98,65%</b>
4.2.01	Pendapatan transfer Pemerintah Pusat	705.926.520.600,00	698.388.305.312,00	98,93%
4.2.02	Pendapatan transfer Pemerintah Daerah	62.187.062.663,00	59.365.617.238,00	95,46%
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>11.254.833.974,00</b>	<b>10.472.591.213,00</b>	<b>93,05%</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.254.833.974,00	10.472.591.213,00	93,05%
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>911.422.634.704,00</b>	<b>899.566.234.005,82</b>	<b>98,70%</b>
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>			
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>728.183.679.382,00</b>	<b>680.574.756.827,25</b>	<b>93,46%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	453.510.459.222,00	448.064.545.062,00	98,80%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.439.923.491,00	279.668.139.717,00	94,98%
5.1.05	Belanja Hibah	44.342.134.251,00	43.680.149.250,00	98,51%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.221.500.000,00	3.173.000.000,00	98,49%
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>129.620.124.937,00</b>	<b>117.434.068.509,00</b>	<b>90,60%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.945.555.000,00	2.282.760.420,00	57,86%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.959.796.733,00	23.323.712.118,00	93,45%
5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	46.622.375.275,00	42.504.291.643,00	91,17%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	51.877.747.829,00	47.137.157.328,00	90,86%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	149.200.100,00	148.641.000,00	99,63%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.065.450.000,00	2.037.506.000,00	98,65%
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>3.088.350.377,00</b>	<b>1.305.034.700,00</b>	<b>42,26%</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.088.350.377,00	1.305.034.700,00	42,26%
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>928.222.492.278,00</b>	<b>893.324.937.238,00</b>	<b>96,24%</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Komponen	Tahun 2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	4	5	6
	<b>SUPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(16.799.857.574,00)</b>	<b>6.241.296.767,82</b>	<b>(37,15%)</b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>			
03.01	Penerimaan	17.799.857.574,00	17.799.857.573,12	100,00%
03.02	Pengeluaran	1.000.000.000,00	0,00	0,00%
<b>Jumlah Pembiayaan</b>		<b>16.799.857.574,00</b>	<b>17.799.857.573,12</b>	<b>105,95%</b>
<b>SILPA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.041.154.340,94</b>	<b>0,00%</b>

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2024, diolah

2) Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian target belanja menurut urusan pemerintahan daerah dapat ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel. 1. 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
	<b>URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)</b>			
1	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>		<b>236.555.176.239,00</b>	<b>224.632.257.291,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>173.162.031.189,00</b>	<b>173.072.424.592,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.487.500	257.021.845



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	170.605.019.889	170.549.842.245
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.493.000	43.493.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	346.894.900	336.528.900
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.397.235.300	1.391.152.387
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.880.600	164.567.563
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.020.000	329.818.652
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>63.365.095.050,00</b>	<b>51.531.782.699,00</b>
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	34.259.822.100	28.954.910.028
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.814.669.000	16.772.978.241
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD	7.309.525.850	4.762.825.330
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	1.981.078.100	1.041.069.100
		<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>28.050.000,00</b>	<b>28.050.000,00</b>
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	28.050.000,00	28.050.000,00
2	<b>URUSAN KESEHATAN</b>		<b>99.752.072.660,00</b>	<b>98.212.085.612,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>65.907.549.187,00</b>	<b>65.609.915.903,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.092.104,00	254.536.780,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.337.155.833,00	63.071.091.715,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.499.800,00	20.499.800,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	322.934.800,00	318.480.112,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	814.130.900,00	806.510.239,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.435.300,00	216.435.300,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.120.450,00	611.306.463,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.180.000,00	311.055.494,00
		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>32.339.497.418,00</b>	<b>31.182.921.509,00</b>
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.279.922.023,00	9.726.510.137,00
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.529.235.695,00	19.955.535.182,00
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.530.339.700,00	1.500.876.190,00
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>552.832.300,00</b>	<b>479.208.100,00</b>
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	11.532.600,00
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	85.042.000,00	39.658.000,00
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	452.790.300,00	428.017.500,00
		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>429.831.000,00</b>	<b>428.211.000,00</b>
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000,00	62.110.000,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produksi Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	192.387.000,00	192.387.000,00
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2.500.000,00	2.500.000,00
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	171.214.000,00	171.214.000,00
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>522.362.755,00</b>	<b>511.829.100,00</b>
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/kota	402.324.655,00	239.438.100,00
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.094.800,00	74.249.800,00
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.943.300,00	41.695.800,00
3	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		<b>76.736.456.587,00</b>	<b>72.577.620.508,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.772.856.530,00</b>	<b>11.497.986.549,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.256.020,00	141.650.800,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.260.408.883,00	8.044.415.584,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	82.188.000,00	82.000.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.787.038.510,00	1.784.164.772,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.070.417,00	294.903.474,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.160.894.700,00	1.150.851.919,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>Program pengelolaan sumber daya air (sda)</b>	<b>3.316.316.085,00</b>	<b>3.268.913.809,00</b>
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.018.330.085,00	2.971.122.969,00
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	297.986.000,00	297.790.840,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>11.008.426.691,00</b>	<b>9.062.617.891,00</b>
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11.008.426.691,00	9.062.617.891,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>6.887.496.500,00</b>	<b>6.798.884.344,00</b>
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten/Kota	6.887.496.500,00	6.798.884.344,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>7.450.904.086,00</b>	<b>7.285.358.535,00</b>
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung Dengan Sungai dalam daerah kabupaten/Kota	7.450.904.086,00	7.285.358.535,00
		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>257.525.000,00</b>	<b>220.466.000,00</b>
		Penyelenggaraan Banguna Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	257.525.000,00	220.466.000,00
		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>17.711.614.144,00</b>	<b>16.781.103.885,00</b>
		Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	17.711.614.144,00	16.781.103.885,00
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>17.200.526.580,00</b>	<b>16.617.679.218,00</b>
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	17.200.526.580,00	16.617.679.218,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>219.116.800,00</b>	<b>136.666.800,00</b>
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	111.166.800,00	28.716.800,00
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	107.950.000,00	107.950.000,00
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>911.674.171,00</b>	<b>907.943.477,00</b>
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	646.370.481,00	642.698.177,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	98.403.290,00	98.402.900,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	166.900.400,00	166.842.400,00
<b>4</b>	<b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>		<b>7.826.149.458,00</b>	<b>7.451.599.103,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.293.461.343,00</b>	<b>5.115.786.510,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.754.500,00	11.674.400,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.677.994.043,00	3.557.221.276,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.838.200,00	1.838.050,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.600.000,00	32.480.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	524.032.000,00	518.787.467,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.222.600,00	365.746.809,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.020.000,00	628.038.508,00
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.532.688.115,00</b>	<b>2.335.812.593,00</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	289.183.080,00	244.309.500,00
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	476.497.000,00	440.027.000,00
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	344.286.300,00	303.533.293,00
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	79.404.300,00	63.358.800,00
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	87.447.100,00	84.661.200,00
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.255.870.335,00	1.199.922.800,00
5	<b>URUSAN SOSIAL</b>		<b>8.709.011.621,00</b>	<b>8.364.850.197,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.644.272.421,00</b>	<b>6.426.122.597,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.113.000,00	97.091.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.103.435.151,00	4.004.012.616,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	878.419.500,00	860.823.100,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	404.222.000,00	390.964.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.345.770,00	484.642.690,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.737.000,00	588.589.191,00
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>150.136.000,00</b>	<b>143.290.800,00</b>
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	16.720.000,00
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	130.136.000,00	126.570.800,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.192.185.800,00</b>	<b>1.113.521.800,00</b>
		Rehabilitasi sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	740.403.500,00	711.574.500,00
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	451.782.300,00	401.947.300,00
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>329.957.400,00</b>	<b>306.835.000,00</b>
		Pemeleiharaan anak-Anak Terlantar	28.047.000,00	14.140.000,00
		Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	301.910.400,00	292.695.000,00
		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>392.460.000,00</b>	<b>375.080.000,00</b>
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	192.740.000,00	181.325.000,00
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	199.720.000,00	193.755.000,00
6	<b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		<b>21.586.488.246,00</b>	<b>19.407.552.996,00</b>
		<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>17.073.719.911,00</b>	<b>16.294.411.280,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.059.600,00	139.193.400,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.629.785.264,00	11.306.139.366,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.890.300,00	55.314.660,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.585.078.700,00	2.414.676.200,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.120.346.807,00	952.099.270,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.250.000,00	2.250.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	864.111.240,00	845.290.690,00
		<b>Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</b>	<b>1.448.252.871,00</b>	<b>1.214.639.816,00</b>
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	200.350.000,00	175.010.000,00
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	568.437.571,00	394.341.130,00
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	337.369.300,00	317.945.023,00
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	342.096.000,00	327.343.663,00
		<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>1.678.987.680,00</b>	<b>1.151.505.700,00</b>
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan	1.126.301.980,00	605.962.100,00
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	25.467.500,00	25.347.500,00
		Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Korban	46.973.200,00	42.893.200,00
		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	20.998.000,00	20.998.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	459.247.000,00	456.304.900,00
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1.520.242.100,00</b>	<b>1.016.195.815,00</b>
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	608.251.100,00	333.524.000,00
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	944.131.000,00	392.004.200,00
	<b>URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)</b>			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
7	URUSAN TENAGA KERJA		4.756.434.275,00	4.508.049.135,00
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.972.682.595,00</b>	<b>3.784.498.952,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.625.000,00	29.758.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.339.651.133,00	3.319.651.133,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.731.312,00	12.758.920,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.512.700,00	179.525.344,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.273.100,00	174.014.899,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.889.350,00	68.790.656,00
		<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>98.555.400,00</b>	<b>92.333.000,00</b>
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	11.842.400,00	11.640.000,00
		Pelayanan antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	86.713.000,00	80.693.000,00
		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA</b>	<b>507.380.880,00</b>	<b>488.789.380,00</b>
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	431.153.880,00	412.818.500,00
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	76.227.000,00	75.970.880,00
		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>107.404.800,00</b>	<b>105.504.800,00</b>
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	107.404.800,00	105.504.800,00
		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>168.253.000,00</b>	<b>134.059.283,00</b>
		Kegiatan Hubungan Industrial	168.253.000,00	134.059.283,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		7.825.994.274,00	7.519.587.491,00
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.172.733.724,00</b>	<b>3.999.025.706,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.255.500,00	25.255.500,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.966.498.324,00	2.806.877.653,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.409.900,00	406.328.350,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.922.000,00	50.880.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.348.000,00	162.011.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.300.000,00	547.673.203,00
		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>2.294.014.550,00</b>	<b>2.269.235.935,00</b>
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40.787.900,00	40.271.900,00
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	978.830.100,00	972.486.100,00
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.274.396.550,00	1.256.477.935,00
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>344.104.600,00</b>	<b>336.937.600,00</b>
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	79.491.300,00	76.511.300,00
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	264.613.300,00	260.426.300,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>67.699.200,00</b>	<b>66.011.200,00</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.699.200,00	66.011.200,00
		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>283.095.000,00</b>	<b>256.495.900,00</b>
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	141.587.250,00	131.528.550,00
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	141.507.750,00	124.967.350,00
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>664.347.200,00</b>	<b>591.881.150,00</b>
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.960.000,00	69.869.000,00
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	336.419.000,00	265.847.450,00
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota	257.968.200,00	256.164.700,00
<b>9</b>	<b>URUSAN PANGAN</b>		<b>4.849.442.588,00</b>	<b>4.796.013.692,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.764.095.588,00</b>	<b>3.764.095.588,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.125.000,00	15.130.300,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.139.651.133,00	3.139.651.133,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.251.100,00	8.418.700,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.512.700,00	170.525.344,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.273.100,00	127.925.748,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.889.350,00	68.790.656,00
		<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>839.044.300,00</b>	<b>793.571.250,00</b>
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga pangan	174.609.000,00	173.761.150,00
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	454.355.300,00	412.820.100,00
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	210.080.000,00	206.990.000,00
		<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>115.963.100,00</b>	<b>114.273.100,00</b>
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.963.100,00	114.273.100,00
		<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>130.339.600,00</b>	<b>124.073.754,00</b>
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	130.339.600,00	124.073.754,00
10	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>		<b>4.160.000.000,00</b>	<b>2.488.308.420,00</b>
		<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>3.960.000.000,00</b>	<b>2.395.448.060,00</b>
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.960.000.000,00	2.395.448.060,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>92.860.360,00</b>
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	200.000.000,00	92.860.360,00
11	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>24.380.308.581,00</b>	<b>23.880.826.982,00</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.011.329.123,00</b>	<b>11.739.376.238,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.746.850,00	94.388.600,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.795.654.041,00	10.582.279.407,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.169.133,00	380.691.577,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.013.099,00	389.513.454,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.746.000,00	292.503.200,00
		<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>775.545.584,00</b>	<b>711.667.278,00</b>
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	149.416.000,00	148.450.500,00
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	626.129.584,00	563.216.778,00
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>266.888.474,00</b>	<b>263.147.136,00</b>
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	150.927.574,00	148.034.536,00
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	64.427.400,00	63.728.200,00
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	51.533.500,00	51.384.400,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>4.378.321.697,00</b>	<b>4.293.587.462,00</b>
		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.378.321.697,00	4.293.587.462,00
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>871.120.800,00</b>	<b>869.107.233,00</b>
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh	871.120.800,00	869.107.233,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>61.100.200,00</b>	<b>58.399.400,00</b>
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	61.100.200,00	58.399.400,00
		<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>13.438.000,00</b>	<b>12.488.000,00</b>
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/kota	13.438.000,00	12.488.000,00
		<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>10.919.800,00</b>	<b>10.899.000,00</b>
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.919.800,00	10.899.000,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>5.991.644.903,00</b>	<b>5.922.155.235,00</b>
		Pengelolaan Sampah	5.991.644.903,00	5.922.155.235,00
13	<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>		<b>5.480.603.954,00</b>	<b>5.415.041.120,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.978.522.754,00</b>	<b>4.912.965.170,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.092.000,00	16.092.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.102.777.096,00	4.039.182.231,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	408.798.334,00	406.439.734,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.331.374,00	360.331.374,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.523.950,00	90.519.081,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>340.340.100,00</b>	<b>340.340.100,00</b>
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	68.015.100,00	68.015.100,00
		Penataan Pendaftaran Penduduk	272.325.000,00	272.325.000,00
		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>76.395.800,00</b>	<b>76.395.800,00</b>
		Pelayanan Pencatatan Sipil	69.179.100,00	69.179.100,00
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	7.216.700,00	7.216.700,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>76.314.400,00</b>	<b>76.312.650,00</b>
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	10.117.400,00	10.116.500,00
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.408.200,00	4.408.200,00
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	47.773.000,00	47.772.150,00
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.045.800,00	14.015.800,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>9.030.900,00</b>	<b>9.027.400,00</b>
		Penyusunan Profil Kependudukan	9.030.900,00	9.027.400,00
14	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		0,00	0,00
15	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		9.273.538.293,00	8.369.254.442,00
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.055.980.293,00</b>	<b>4.945.566.926,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.007.200,00	29.007.200,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.329.872.397,00	3.280.170.952,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.550.000,00	8.528.000,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.302.400,00	12.410.400,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	798.168.700,00	793.637.512,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.449.596,00	520.457.836,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.630.000,00	301.355.023,00
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>71.400.000,00</b>	<b>36.656.686,00</b>
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	71.400.000,00	36.656.686,00
		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>3.342.158.000,00</b>	<b>2.607.610.830,00</b>
		Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Lokal	703.200.000,00	486.076.830,00
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	248.000.000,00	82.000.000,00
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.108.474.000,00	1.916.914.000,00
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat TK Daerah kabupaten/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	282.484.000,00	122.620.000,00
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KS</b>	<b>804.000.000,00</b>	<b>779.420.000,00</b>
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	804.000.000,00	779.420.000,00
16	URUSAN PERHUBUNGAN		18.108.497.915,00	17.720.623.581,00
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.055.980.293,00</b>	<b>4.945.566.926,00</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.192.000,00	792.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.866.795.629,00	3.669.669.410,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.462.955,00	388.462.955,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.291.270,00	181.291.270,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.420.000,00	383.506.477,00
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>13.002.807.622,00</b>	<b>12.735.126.655,00</b>
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	949.820.000,00	949.807.000,00
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	10.714.599.122,00	10.542.818.167,00
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	151.661.000,00	148.216.159,00
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	348.548.500,00	341.248.500,00
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	838.179.000,00	753.036.829,00
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	17.960.000,00	13.192.000,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>49.710.000,00</b>	<b>39.930.000,00</b>
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	49.710.000,00	39.930.000,00
17	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		<b>10.242.104.730,00</b>	<b>10.000.610.745,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.993.179.530,00</b>	<b>7.881.614.946,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.993.050,00	91.772.050,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.539.137.456,00	4.448.079.650,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	929.589.900,00	928.910.705,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	2.267.019.124,00	2.247.627.041,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>165.440.000,00</b>	<b>165.225.500,00</b>
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.467.961.200,00	1.409.491.200,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>1.467.961.200,00</b>	<b>1.409.491.200,00</b>
		Pengelolaan Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	780.964.000,00	709.504.599,00
18	<b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		<b>8.925.399.193,00</b>	<b>8.176.911.007,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.122.093.193,00</b>	<b>7.441.734.007,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.013.000,00	96.915.890,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.074.987.683,00	4.835.853.695,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.672.351.600,00	1.409.878.500,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	110.421.250,00	84.790.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	900.225.160,00	818.389.221,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	216.092.500,00	195.906.407,00
		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>18.688.000,00</b>	<b>17.608.000,00</b>
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah	18.688.000,00	17.608.000,00
		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>88.582.200,00</b>	<b>88.582.200,00</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.582.200,00	88.582.200,00
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>50.214.000,00</b>	<b>49.674.000,00</b>
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.214.000,00	49.674.000,00
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>645.821.800,00</b>	<b>579.312.800,00</b>
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	645.821.800,00	579.312.800,00
19	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>5.732.935.749,00</b>	<b>5.194.926.965,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.164.450.649,00</b>	<b>3.829.708.058,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.884.200,00	97.371.850,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.032.472.599,00	2.987.988.779,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	433.758.300,00	390.372.015,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.008.550,00	307.620.365,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.300.000,00	46.355.049,00
		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>57.481.100,00</b>	<b>57.481.100,00</b>
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	57.481.100,00	57.481.100,00
		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.302.588.500,00</b>	<b>1.106.240.057,00</b>
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman	1.302.588.500,00	1.106.240.057,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota		
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>133.924.000,00</b>	<b>129.409.590,00</b>
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	133.924.000,00	129.409.590,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>74.491.500,00</b>	<b>72.088.160,00</b>
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah kabupaten/Kota	74.491.500,00	72.088.160,00
20	<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>		<b>3.185.819.800,00</b>	<b>3.029.343.898,00</b>
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>348.878.000,00</b>	<b>215.867.400,00</b>
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	218.778.000,00	215.867.400,00
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.100.000,00	128.071.880,00
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>2.836.941.800,00</b>	<b>2.813.476.498,00</b>
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	37.571.600,00	36.860.000,00
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	474.370.200,00	451.616.498,00
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.825.000.000,00	1.825.000.000,00
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	500.000.000,00	500.000.000,00
21	<b>URUSAN STATISTIK</b>		<b>316.126.300,00</b>	<b>291.805.500,00</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>316.126.300,00</b>	<b>291.805.500,00</b>
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316.126.300,00	291.805.500,00
22	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>		<b>204.107.000,00</b>	<b>203.085.000,00</b>
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>204.107.000,00</b>	<b>203.085.000,00</b>
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	108.959.000,00	108.793.000,00
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	95.148.000,00	94.292.000,00
23	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>		<b>5.860.214.363,00</b>	<b>5.744.389.738,00</b>
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>5.094.861.063,00</b>	<b>4.997.507.827,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.366.200,00	40.186.200,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.074.301.542,00	3.986.847.997,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	588.404.595,00	587.928.826,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.223.626,00	190.296.056,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.565.100,00	192.248.748,00
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>625.731.700,00</b>	<b>611.858.051,00</b>
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	94.436.300,00	91.116.860,00
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	531.295.400,00	520.741.191,00
		<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>139.621.600,00</b>	<b>135.023.860,00</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	119.877.600,00	115.279.860,00
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	19.744.000,00	19.744.000,00
24	URUSAN PERPUSTAKAAN		<b>6.357.779.704,00</b>	<b>6.174.253.853,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.551.464.754,00</b>	<b>5.384.345.053,00</b>
			52.599.700,00	49.876.160,00
			4.295.917.082,00	4.151.997.396,00
			30.000.000,00	29.814.600,00
			676.569.600,00	667.722.304,00
			293.401.622,00	291.836.798,00
			202.977.750,00	192.300.295,00
		<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>806.314.950,00</b>	<b>789.908.800,00</b>
			720.465.850,00	706.211.200,00
			85.849.100,00	83.697.600,00
25	URUSAN KEARSIPAN		<b>516.625.600,00</b>	<b>507.804.802,00</b>
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>505.292.900,00</b>	<b>496.820.802,00</b>
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	162.461.350,00	157.254.500,00
		Pengelolaan Simpul jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	342.831.550,00	339.566.302,00
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>11.332.700,00</b>	<b>10.984.000,00</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	11.332.700,00	10.984.000,00
	<b>URUSAN PILIHAN</b>			
<b>26</b>	<b>URUSAN PERIKANAN</b>		<b>5.531.909.577,00</b>	<b>5.416.360.811,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.315.628.215,00</b>	<b>4.252.210.629,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.541.650,00	43.919.650,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.111.223.731,00	3.071.371.558,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.823.850,00	11.323.850,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.646.094,00	331.364.491,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.790.000,00	48.710.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.458.890,00	68.965.550,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678.144.000,00	676.555.530,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>687.101.200,00</b>	<b>657.802.993,00</b>
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	631.102.400,00	612.584.193,00
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.998.800,00	32.318.800,00
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	12.900.000,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>259.630.762,00</b>	<b>251.476.239,00</b>
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	112.000.000,00	112.000.000,00
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	147.630.762,00	139.476.239,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>269.549.400,00</b>	<b>254.870.950,00</b>
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	127.204.000,00	125.944.600,00
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	35.530.000,00	35.410.000,00
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	106.815.400,00	93.516.350,00
<b>27</b>	<b>URUSAN PARIWISATA</b>		<b>3.142.054.098,00</b>	<b>3.048.570.424,00</b>
		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYATARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>1.177.988.555,00</b>	<b>1.124.464.972,00</b>
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	39.250.000,00	35.288.000,00
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	621.188.000,00	589.802.443,00
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	517.550.555,00	499.374.529,00
		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>1.964.065.543,00</b>	<b>1.924.105.452,00</b>
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Dayatarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.479.004.464,00	1.445.040.783,00
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	362.087.600,00	356.156.640,00
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	122.973.479,00	122.908.029,00
<b>28</b>	<b>URUSAN PERTANIAN</b>		<b>22.864.204.405,00</b>	<b>20.926.631.210,00</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.708.176.745,00</b>	<b>14.283.636.828,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.109.401,00	126.759.460,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.187.078.290,00	12.844.472.454,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.434.000,00	10.434.000,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.187.000,00	38.142.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	713.398.054,00	710.977.232,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.400.000,00	477.860.895,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.570.000,00	74.990.787,00
		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>3.645.230.650,00</b>	<b>3.645.230.650,00</b>
		Pengawasan Penggunaan Sarana Prasarana	2.912.223.000,00	2.755.595.494,00
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisasi Kewenangan Kabupaten/Kota	55.386.900,00	51.066.900,00
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	32.879.950,00	28.559.950,00
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	39.741.300,00	39.494.600,00
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah	604.999.500,00	560.617.867,00
		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>3.683.936.000,00</b>	<b>2.229.315.492,00</b>
		Pengembangan Prasarana Pertanian	3.683.936.000,00	2.229.315.492,00
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>315.872.394,00</b>	<b>315.872.394,00</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Derah Wabah Penyakit Hewan Menular	131.519.664,00	131.107.994,00
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam daerah Kabupaten/Kota	40.010.230,00	39.080.230,00
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	144.342.500,00	123.337.020,00
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>2.880.000,00</b>	-
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2.880.000,00	0,00
		<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>24.639.900,00</b>	<b>22.752.900,00</b>
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian	24.639.900,00	22.752.900,00
		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>483.468.716,00</b>	<b>429.822.946,00</b>
		Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	483.468.716,00	429.822.946,00
29	URUSAN KEHUTANAN		0,00	0,00
30	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		0,00	0,00
31	URUSAN PERDAGANGAN		364.256.500,00	260.335.500,00
		<b>PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>209.252.500,00</b>	<b>149.522.500,00</b>
			209.252.500,00	149.522.500,00
		<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>155.004.000,00</b>	<b>110.813.000,00</b>
			155.004.000,00	110.813.000,00
32	URUSAN PERINDUSTRIAN		1.498.636.000,00	1.477.421.372,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1.454.560.000,00</b>	<b>1.433.345.372,00</b>
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.454.560.000,00	1.433.345.372,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>44.076.000,00</b>	<b>44.076.000,00</b>
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	44.076.000,00	44.076.000,00
33	<b>URUSAN TRANSIMIGRASI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
34	<b>PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>		<b>25.373.401.277,00</b>	<b>24.946.268.195,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.250.240.234,00</b>	<b>14.826.467.407,00</b>
			15.250.240.234,00	14.826.467.407,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>6.668.710.189,00</b>	<b>6.668.710.189,00</b>
			1.668.906.250,00	1.578.693.763,00
			847.687.550,00	846.808.480,00
			706.077.062,00	696.515.210,00
			3.218.750.377,00	1.413.764.700,00
			227.288.950,00	188.570.406,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.158.614.444,00</b>	<b>1.055.254.189,00</b>
			1.158.614.444,00	1.055.254.189,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.295.836.410,00</b>	<b>2.395.836.410,00</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
			2.295.836.410,00	2.073.229.751,00
35	PENGADAAN		<b>1.303.226.300,00</b>	<b>1.303.226.300,00</b>
		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.303.226.300,00</b>	<b>1.303.226.300,00</b>
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.303.226.300,00	1.303.226.300,00
36	KEPEGAWAIAN		<b>8.434.289.639,00</b>	<b>6.565.053.873,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.422.057.639,00</b>	<b>5.136.118.535,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.169.200,00	46.857.100,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.248.667.039,00	4.119.164.354,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.890.000,00	54.790.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	645.107.400,00	551.833.165,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah	70.680.000,00	67.980.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.904.000,00	179.678.628,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.640.000,00	115.815.288,00
		<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1.737.979.000,00</b>	<b>1.416.935.338,00</b>
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.057.040.000,00	852.821.684,00
		Mutasi dan Promosi ASN	178.208.000,00	147.722.811,00
		Pengembangan Kompetensi ASN	303.741.000,00	263.950.000,00
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	198.990.000,00	152.440.843,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>1.274.253.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
		Pengembangan Kompetensi Teknis	12.000.000,00	12.000.000,00
		Sertifikasi, Kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.262.253.000,00	1.176.766.350,00
37	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		<b>52.493.579.861,00</b>	<b>52.202.673.172,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>28.922.210.231,00</b>	<b>28.832.253.948,00</b>
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.860.052.000,00	11.848.672.491,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.395.500.000,00	3.392.400.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.100.000,00	212.093.250,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.372.004.931,00	4.352.145.286,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi	272.600.000,00	272.575.141,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum di Kantor	145.150.000,00	145.070.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.044.804.000,00	2.015.482.000,00
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	368.590.000,00	368.499.900,00
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.222.510.900,00	1.220.420.500,00
		Penataan Organisasi	1.568.125.400,00	1.552.352.120,00
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.460.773.000,00	3.452.543.260,00
		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.036.124.653,00	3.035.430.500,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.504.000,00	52.504.000,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>19.716.961.040,00</b>	<b>19.548.084.974,00</b>
		Adminitrasi Tata Pemerintahan	1.758.900.240,00	1.694.537.454,00
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	16.646.477.800,00	16.543.027.520,00
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.311.583.000,00	1.310.520.000,00
		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>3.854.408.590,00</b>	<b>3.822.334.250,00</b>
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	686.014.842,00	682.450.123,00
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.452.446.190,00	1.445.046.300,00
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.496.596.000,00	1.475.496.000,00
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	219.351.558,00	219.341.827,00
38	<b>SKRETARIAT DEWAN</b>		<b>68.498.777.237,00</b>	<b>68.186.021.577,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>19.616.008.933,00</b>	<b>19.616.008.933,00</b>
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1.257.142.100,00	1.257.142.100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.353.805.133,00	13.353.805.133
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.614.300,00	12.614.300
		Layanan Administrasi DPRD	924.220.000,00	924.220.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	674.560.000,00	674.560.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.720.000,00	204.720.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.083.145.000,00	1.083.145.000



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	485.171.700,00	485.171.700
		<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>1.620.630.700,00</b>	<b>1.620.630.700</b>
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	48.882.768.304,00	48.570.012.644,00
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	933.055.000,00	933.055.000
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	124.074.500,00	124.074.500
		Peningkatan Kapasitas DPRD	70.470.000,00	70.470.000
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.439.371.900,00	2.439.371.900
		Fasilitasi Tugas DPRD	1.860.041.000,00	1.860.041.000,00
39	KESBANGPOL		<b>32.436.954.796,00</b>	<b>32.110.467.439,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.221.307.354,00</b>	<b>4235039051</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.534.900,00	42.382.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.557.460.664,00	3.574.422.387,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.902.120,00	492.278.282,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.345.200,00	125.891.912,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.470,00	64.470,00
		<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>753.215.600,00</b>	<b>729.651.561,00</b>
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	753.215.600,00	729.651.561,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>20.209.355.100,00</b>	<b>20.202.879.787,00</b>
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	20.209.355.100,00	20.202.879.787,00
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>1.084.340.850,00</b>	<b>995.625.880,00</b>
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.084.340.850,00	995.625.880,00
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>200.037.200,00</b>	<b>186.874.400,00</b>
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	200.037.200,00	186.874.400,00
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>5.968.698.692,00</b>	<b>5.760.396.760,00</b>
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5.968.698.692,00	5.760.396.760,00
40	<b>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>		<b>5.093.836.967,00</b>	<b>4.736.023.044,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.437.452.619,00</b>	<b>3.252.160.202,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.432.800,00	69.830.800,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.335.128.719,00	2.282.729.362,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.885.000,00	4.509.000,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.559.700,00	604.352.241,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.240.400,00	204.630.951,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.206.000,00	86.107.848,00
		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>1.656.384.348,00</b>	<b>1.483.862.842,00</b>
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	475.627.500,00	415.417.809,00
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	296.467.348,00	261.355.612,00
		Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan Pembangunan	12.212.500,00	10.000.000,00
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	872.077.000,00	797.089.421,00
41	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>9.336.992.445,00</b>	<b>8.805.792.350,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.726.185.165,00</b>	<b>6.427.411.956,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.266.726,00	100.258.731,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.548.667.039,00	5.547.523.114,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	97.890.000,00	96.815.236,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	670.107.400,00	400.841.119,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.350.000,00	81.515.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.904.000,00	200.458.756,00
		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.962.471.280,00</b>	<b>1.744.678.232,00</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.962.471.280,00	1.744.678.232,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>648.336.000,00</b>	<b>633.702.162,00</b>
		Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	648.336.000,00	633.702.162,00
<b>42</b>	<b>KECAMATAN RABA</b>		<b>20.226.285.069,00</b>	<b>19.899.876.204,00</b>
		<b>PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>14.597.459.870,00</b>	<b>14.260.643.005,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.475.300,00	2.313.200,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.008.710.157,00	12.767.848.135,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	373.164.563,00	372.986.920,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.084.252.850,00	1.003.852.850,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.091.000,00	68.014.900,00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.766.000,00	45.627.000,00
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN</b>	<b>5.628.825.199,00</b>	<b>5.639.233.199,00</b>
		Pemberdayaan Kelurahan	5.602.000.199,00	5.612.408.199,00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.825.000,00	26.825.000,00
<b>43</b>	<b>KECAMATAN RASANA E BARAT</b>		<b>11.691.995.177,00</b>	<b>11.470.081.269,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.006.203.727,00</b>	<b>7.806.754.119,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.988.900,00	17.988.900,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.098.588.427,00	6.922.742.151,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.862.100,00	214.180.600,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	601.641.800,00	581.338.568,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	71.122.500,00	70.503.900,00
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN</b>	<b>48.841.400,00</b>	<b>48.841.400,00</b>
		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	48.841.400,00	48.841.400,00
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>68.400.000,00</b>
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68.400.000,00	68.400.000,00
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>3.568.550.050,00</b>	<b>3.546.085.750,00</b>
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.568.550.050,00	3.546.085.750,00
44	KECAMATAN MPUNDA		<b>25.382.298.926,00</b>	<b>25.304.685.541,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.516.698.984,00</b>	<b>16.445.493.667,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.925.781,00	17.988.900,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.825.761.540,00	14.758.952.361,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.435.896,00	349.526.812,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	1.250.453.267,00	1.248.521.694,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	71.122.500,00	70.503.900,00
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN</b>	<b>48.841.400,00</b>	<b>48.841.400,00</b>
		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	48.841.400,00	48.841.400,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>68.400.000,00</b>
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68.400.000,00	68.400.000,00
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>3.568.550.050,00</b>	<b>3.546.085.750,00</b>
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8.568.550.050,00	8.546.085.750,00
45	<b>KECAMATAN ASAKOTA</b>		<b>25.145.534.202,00</b>	<b>24.953.654.422,00</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.784.179.802,00</b>	<b>16.698.274.072,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.925.781,00	18.865.210,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.825.761.540,00	14.758.952.361,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.435.896,00	349.526.812,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.503.815.893,00	1.500.425.789,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.240.692,00	70.503.900,00
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN</b>	<b>84.963.582,00</b>	<b>84.769.531,00</b>
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	84.963.582,00	84.769.531,00
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>99.432.587,00</b>	<b>99.352.165,00</b>
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	99.432.587,00	99.352.165,00
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>8.176.958.231,00</b>	<b>8.071.258.654,00</b>
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8.176.958.231,00	8.071.258.654,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
46	KECAMATAN RASANA E TIMUR		22.540.717.678,00	22.355.595.174,00
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.315.376.289,00</b>	<b>9.223.377.587,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.605.000,00	56.605.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.192.543.189,00	8.100.550.587,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.913.100,00	206.907.700,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.273.000,00	799.272.300,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.042.000,00	30.042.000,00
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>43.604.000,00</b>	<b>43.604.000,00</b>
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.604.000,00	43.604.000,00
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL.</b>	<b>143.604.000,00</b>	<b>143.604.000,00</b>
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	43.604.000	43.604.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kec.	100.000.000,00	100.000.000,00
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>29.100.000,00</b>
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.100.000,00	29.100.000,00
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL.</b>	<b>3.658.503.100,00</b>	<b>3.658.503.100,00</b>
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.658.503.100,00	3.657.378.000,00
	<b>PENGAWASAN</b>			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
47	INSPEKTORAT		11.964.476.355,00	11.675.815.244,00
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.684.549.455,00</b>	<b>10.482.855.244,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.339.200,00	13.183.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.892.171.205,00	8.734.078.171,00
		Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	5.716.800,00	5.687.000,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	166.622.100,00	165.011.529,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.268.526.750,00	1.263.837.888,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.650.000,00	13.619.700,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.903.400,00	230.826.000,00
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>57.590.000,00</b>	<b>56.611.956,00</b>
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	884.656.500,00	846.664.000,00
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	752.356.500,00	735.604.000,00
		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>132.300.000,00</b>	<b>111.060.000,00</b>
		Pendampingan dan Asistensi	395.270.400,00	346.296.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>911.422.634.704,00</b>	<b>899.566.234.005,82</b>

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2024, diolah



- h. Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Bima Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1. 14. Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Bima Tahun Anggaran 2024

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
	<b>URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)</b>			
1	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>		<b>236.555.176.239,00</b>	<b>224.632.257.291,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	173.162.031.189,00	173.072.424.592,00
		Program pengelolaan pendidikan	63.365.095.050,00	51.531.782.699,00
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	28.050.000,00	28.050.000,00
2	<b>URUSAN KESEHATAN</b>		<b>99.752.072.660,00</b>	<b>98.212.085.612,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	65.907.549.187,00	65.609.915.903,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	32.339.497.418,00	31.182.921.509,00
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	552.832.300,00	479.208.100,00
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	429.831.000,00	428.211.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	522.362.755,00	511.829.100,00
3	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		<b>76.736.456.587,00</b>	<b>72.577.620.508,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	11.772.856.530,00	11.497.986.549,00
		Program pengelolaan sumber daya air (sda)	3.316.316.085,00	3.268.913.809,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	11.008.426.691,00	9.062.617.891,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	6.887.496.500,00	6.798.884.344,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	7.450.904.086,00	7.285.358.535,00
		Program penataan bangunan gedung	257.525.000,00	220.466.000,00
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	17.711.614.144,00	16.781.103.885,00
		Program penyelenggaraan jalan	17.200.526.580,00	16.617.679.218,00
		Program pengembangan jasa konstruksi	219.116.800,00	136.666.800,00
		Program penyelenggaraan penataan ruang	911.674.171,00	907.943.477,00
4	<b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>		<b>7.826.149.458,00</b>	<b>7.451.599.103,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.293.461.343,00	5.115.786.510,00
		Program pengembangan perumahan	2.532.688.115,00	2.335.812.593,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
5	<b>URUSAN SOSIAL</b>		<b>8.709.011.621,00</b>	<b>8.364.850.197,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.644.272.421,00	6.426.122.597,00
		Program pemberdayaan sosial	150.136.000,00	143.290.800,00
		Program rehabilitasi sosial	1.192.185.800,00	1.113.521.800,00
		Program perlindungan dan jaminan sosial	329.957.400,00	306.835.000,00
		Program penanganan bencana	392.460.000,00	375.080.000,00
6	<b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		<b>21.721.202.562,00</b>	<b>19.676.752.611,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	17.073.719.911,00	16.294.411.280,00
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.448.252.871,00	1.214.639.816,00
		Program penanggulangan bencana	1.678.987.680,00	1.151.505.700,00
		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.520.242.100,00	1.016.195.815,00
	<b>URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)</b>			
7	<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>		<b>4.854.276.675,00</b>	<b>4.605.185.415,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.972.682.595,00	3.784.498.952,00
		Program perencanaan tenaga kerja	98.555.400,00	92.333.000,00
		Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	507.380.880,00	488.789.380,00
		Program penempatan tenaga kerja	107.404.800,00	105.504.800,00
		Program hubungan industrial	168.253.000,00	134.059.283,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
8	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		<b>7.825.994.274,00</b>	<b>7.519.587.491,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.172.733.724,00	3.999.025.706,00
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	2.294.014.550,00	2.269.235.935,00
		Program perlindungan perempuan	344.104.600,00	336.937.600,00
		Program pengelolaan sistem data gender dan anak	67.699.200,00	66.011.200,00
		Program pemenuhan hak anak (pha)	283.095.000,00	256.495.900,00
		Program perlindungan khusus anak	664.347.200,00	591.881.150,00
9	<b>URUSAN PANGAN</b>		<b>4.849.442.588,00</b>	<b>4.796.013.692,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.764.095.588,00	3.764.095.588,00
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	839.044.300,00	793.571.250,00
		Program penanganan kerawanan pangan	115.963.100,00	114.273.100,00
		Program pengawasan keamanan pangan	130.339.600,00	124.073.754,00
10	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>		<b>4.160.000.000,00</b>	<b>2.488.308.420,00</b>
		Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	3.960.000.000,00	2.395.448.060,00
		Program pengelolaan tanah kosong	200.000.000,00	92.860.360,00
11	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>24.380.308.581,00</b>	<b>23.880.826.982,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12.011.329.123,00	11.739.376.238,00
		Program perencanaan lingkungan hidup	775.545.584,00	711.667.278,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	266.888.474,00	263.147.136,00
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	4.378.321.697,00	4.293.587.462,00
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	871.120.800,00	869.107.233,00
		Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	61.100.200,00	58.399.400,00
		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	13.438.000,00	12.488.000,00
		Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	10.919.800,00	10.899.000,00
		Program pengelolaan persampahan	5.991.644.903,00	5.922.155.235,00
13	<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>		5.480.603.954,00	5.415.041.120,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.978.522.754,00	4.912.965.170,00
		Program pendaftaran penduduk	340.340.100,00	340.340.100,00
		Program pencatatan sipil	76.395.800,00	76.395.800,00
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	76.314.400,00	76.312.650,00
		Program pengelolaan profil kependudukan	9.030.900,00	9.027.400,00
14	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		<b>9.273.538.293,00</b>	<b>8.369.254.442,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.055.980.293,00	4.945.566.926,00
		Program pengendalian penduduk	71.400.000,00	36.656.686,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Program pembinaan keluarga berencana	3.342.158.000,00	2.607.610.830,00
		Program pemberdayaan dan peningkatan ks	804.000.000,00	779.420.000,00
16	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>		<b>18.108.497.915,00</b>	<b>17.720.623.581,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.055.980.293,00	4.945.566.926,00
		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	13.002.807.622,00	12.735.126.655,00
		Program pengelolaan pelayaran	49.710.000,00	39.930.000,00
17	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		<b>10.242.104.730,00</b>	<b>10.000.610.745,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.993.179.530,00	7.881.614.946,00
		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1.467.961.200,00	1.409.491.200,00
		Program pengelolaan aplikasi informatika	780.964.000,00	709.504.599,00
18	<b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		<b>8.925.399.193,00</b>	<b>8.176.911.007,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8.122.093.193,00	7.441.734.007,00
		Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	18.688.000,00	17.608.000,00
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	88.582.200,00	88.582.200,00
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	50.214.000,00	49.674.000,00
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	645.821.800,00	579.312.800,00
19	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>5.732.935.749,00</b>	<b>5.732.935.749,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.164.450.649,00	4.164.450.649,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Program promosi penanaman modal	57.481.100,00	57.481.100,00
		Program pelayanan penanaman modal	1.302.588.500,00	1.302.588.500,00
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	133.924.000,00	133.924.000,00
		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	74.491.500,00	74.491.500,00
20	<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>		<b>3.185.819.800,00</b>	<b>3.157.415.778,00</b>
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	348.878.000,00	343.939.280,00
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.836.941.800,00	2.813.476.498,00
21	<b>URUSAN STATISTIK</b>		<b>316.126.300,00</b>	<b>291.805.500,00</b>
		Program penyelenggaraan statistik sektoral	316.126.300,00	291.805.500,00
22	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>		<b>204.107.000,00</b>	<b>203.085.000,00</b>
		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	204.107.000,00	203.085.000,00
23	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>		<b>1.802.671.234,00</b>	<b>1.738.553.501,00</b>
		Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	1.177.988.555,00	1.124.464.972,00
		Program pengembangan kebudayaan	485.061.079,00	479.064.669,00
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	139.621.600,00	135.023.860,00
24	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>6.357.779.704,00</b>	<b>6.174.253.853,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.551.464.754,00	5.384.345.053,00
		Program pembinaan perpustakaan	806.314.950,00	789.908.800,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
25	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>		<b>516.625.600,00</b>	<b>507.804.802,00</b>
		Program pengelolaan arsip	505.292.900,00	496.820.802,00
		Program perlindungan dan penyelamatan arsip	11.332.700,00	10.984.000,00
	<b>URUSAN PILIHAN</b>			
26	<b>URUSAN PERIKANAN</b>		<b>5.531.909.577,00</b>	<b>5.416.360.811,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.315.628.215,00	4.252.210.629,00
		Program pengelolaan perikanan tangkap	687.101.200,00	657.802.993,00
		Program pengelolaan perikanan budidaya	259.630.762,00	251.476.239,00
		Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	269.549.400,00	254.870.950,00
27	<b>URUSAN PARIWISATA</b>		<b>7.751.854.082,00</b>	<b>7.567.013.582,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.094.861.063,00	4.997.507.827,00
		Program peningkatan dayatarik destinasi pariwisata	1.177.988.555,00	1.124.464.972,00
		Program pemasaran pariwisata	1.479.004.464,00	1.445.040.783,00
28	<b>URUSAN PERTANIAN</b>		<b>22.864.204.405,00</b>	<b>20.694.388.221,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	14.708.176.745,00	14.283.636.828,00
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.645.230.650,00	3.435.334.811,00
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.683.936.000,00	2.229.315.492,00
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	315.872.394,00	293.525.244,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	2.880.000,00	0,00
		Program perizinan usaha pertanian	24.639.900,00	22.752.900,00
		Program penyuluhan pertanian	483.468.716,00	429.822.946,00
29	<b>URUSAN KEHUTANAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>		<b>364.256.500,00</b>	<b>260.335.500,00</b>
		Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	209.252.500,00	149.522.500,00
		Program standarisasi dan perlindungan konsumen	155.004.000,00	110.813.000,00
32	<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>		<b>1.498.636.000,00</b>	<b>1.477.421.372,00</b>
		Program perencanaan dan pembangunan industri	1.454.560.000,00	1.433.345.372,00
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	44.076.000,00	44.076.000,00
33	<b>URUSAN TRANSIMIGRASI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
34	<b>PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>		<b>25.473.401.277,00</b>	<b>22.686.303.906,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	15.250.240.234,00	14.826.467.407,00
		Program pengelolaan keuangan daerah	6.668.710.189,00	4.725.352.559,00
		Program pengelolaan barang milik daerah	1.158.614.444,00	1.056.254.189,00
		Program pengelolaan pendapatan daerah	2.395.836.410,00	2.078.229.751,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
35	PENGADAAN		1.303.226.300,00	1.303.226.300,00
		Program perekonomian dan pembangunan	1.303.226.300,00	1.303.226.300,00
36	KEPEGAWAIAN		8.440.977.539,00	7.770.620.223,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.428.745.539,00	5.164.918.535,00
		Program kepegawaian daerah	1.737.979.000,00	1.416.935.338,00
		Program pengembangan sumber daya manusia	1.274.253.000,00	1.188.766.350,00
37	SEKRETARIAT DAERAH		52.493.579.861,00	52.202.673.172,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	28.922.210.231,00	28.832.253.948,00
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	19.716.961.040,00	19.548.084.974,00
		Program perekonomian dan pembangunan	3.854.408.590,00	3.822.334.250,00
38	SEKRETARIAT DEWAN		68.498.777.237,00	68.186.021.577,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	19.616.008.933,00	19.616.008.933,00
		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	48.882.768.304,00	48.570.012.644,00
39	KESBANGPOL		32.741.606.126,00	32.174.940.027,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.525.958.684,00	4.299.411.639,00
		Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	753.215.600,00	729.651.561,00
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	20.209.355.100,00	20.202.879.787,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.084.340.850,00	995.625.880,00
		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200.037.200,00	186.974.400,00
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	5.968.698.692,00	5.760.396.760,00
<b>40</b>	<b>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>		<b>5.093.836.967,00</b>	<b>4.736.023.044,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.437.452.619,00	3.252.160.202,00
		Program penelitian dan pengembangan	1.656.384.348,00	1.483.862.842,00
<b>41</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>9.336.992.445,00</b>	<b>8.805.792.350,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.726.185.165,00	6.427.411.956,00
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.962.471.280,00	1.744.678.232,00
		Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	648.336.000,00	633.702.162,00
<b>42</b>	<b>KECAMATAN RABA</b>		<b>22.002.833.875,00</b>	<b>21.764.617.721,00</b>
		Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	16.374.008.676,00	16.125.384.522,00
		Program pemberdayaan kelurahan	5.628.825.199,00	5.639.233.199,00
<b>43</b>	<b>KECAMATAN RASANA E BARAT</b>		<b>11.691.995.177,00</b>	<b>11.470.081.269,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8.006.203.727,00	7.806.754.119,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	48.841.400,00	48.841.400,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	68.400.000,00	68.400.000,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	3.568.550.050,00	3.546.085.750,00
44	<b>KECAMATAN MPUNDA</b>		<b>25.382.298.926,00</b>	<b>25.304.685.541,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	16.516.698.984,00	16.445.493.667,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	58.250.000,00	58.100.540,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	85.496.251,00	85.658.745,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	8.721.853.691,00	8.715.432.589,00
45	<b>KECAMATAN ASAKOTA</b>		<b>25.145.534.202,00</b>	<b>24.953.654.422,00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.784.179.802,00	16.698.274.072,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	84.963.582,00	84.769.531,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	99.432.587,00	99.352.165,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.176.958.231,00	8.071.258.654,00
46	<b>KECAMATAN RASANAE TIMUR</b>		<b>22.540.717.678,00</b>	<b>22.355.595.174,00</b>
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	9.315.376.289,00	9.223.377.587,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	43.604.000,00	43.604.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kel.	143.604.000,00	143.604.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	29.100.000,00	29.100.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kel.	3.658.503.100,00	3.658.503.100,00
	<b>PENGAWASAN</b>			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Tahun 2024	
			Anggaran	Realisasi
1	2		4	5
47	INSPEKTORAT		11.569.205.955,00	11.329.519.244,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10.684.549.455,00	10.482.855.244,00
		Program penyelenggaraan pengawasan	884.656.500,00	846.664.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>911.422.634.704,00</b>	<b>899.566.234.005,82</b>

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2024, diolah



### 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

#### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan/Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang sehingga rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, isu strategis juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pemerintahan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Permasalahan/Isu Strategis juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup: (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala



daerah, mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Untuk menentukan strategi, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang. Selanjutnya strategi yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang akan mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan.

**Tabel 1.17 Analisa SWOT Bagi Perumusan Strategi Pembangunan**

<b>Misi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028:</b>			
<b>“Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028”</b>			
<b>Tujuan 1:</b>			
<b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing</b>			
<b>Sasaran 1:</b>			
<b>Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</b>			
<b>ANALISIS SWOT</b>			
<b>KEKUATAN</b>	Alokasi anggaran bidang kesehatan sudah mencapai 10% dalam APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<b>MEMBANGUN KEKUATAN</b>	Penguatan perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program-program kesehatan
<b>KELEMAHAN</b>	Masih rendahnya kualitas kesehatan Ibu dan anak,	<b>MENGATASI KELEMAHAN</b>	Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak
<b>PELUANG</b>	Kurangnya penerapan PHBS  Masih rendahnya kapasitas SDM tenaga kesehatan  Partisipasi dan atensi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat baik	<b>MENANGKAP PELUANG</b>	Upaya promosi terhadap PHBS  Upaya peningkatan kualitas nakes melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala  Menyediakan media bagi partisipasi masyarakat untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan



Misi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028:			
“Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028”			
ANCAMAN	<p>§ rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil,</p> <p>§ Belum optimalnya peningkatan gizi bayi dan balita</p> <p>Angka stunting masih tinggi</p>	MEREDUKSI ANCAMAN	<p>Mengupayakan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, bayi dan balita</p> <p>Program 1000 Hari Pertama Kelahiran</p>
STRATEGI	<p><b>Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima melalui peningkatan kualitas nakes, layanan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong PHBS.</b></p>		
Sasaran 2:			
Meningkatnya kualitas pendidikan			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	<p>Alokasi anggaran pendidikan telah mencapai 23% dalam APBD atau melampaui ketentuan minimal dalam undang-undang pendidikan sebesar 20%</p>	MEMBANGUN KEKUATAN	<p>Optimalisasi perencanaan dan penganggaran program kegiatan bidang pendidikan</p>
KELEMAHAN	<p>Kualifikasi guru terstandar masih kurang</p>	MENGATASI KELEMAHAN	<p>Peningkatan kualitas tenaga pendidik</p>
PELUANG	<p>Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan relatif tinggi (pelaksanaan pendidikan tingkat PAUD sebagian besar dilaksanakan oleh pihak non pemerintah)</p> <p>Tingginya minat belajar mengajar berbasis aplikasi</p>	MENANGKAP PELUANG	<p>Mempermudah pengelolaan perizinan pendirian PAUD sdisertai optimalisasi pengendalian dan pengawasan</p> <p>Pemerataan akses belajar mengajar berbasis aplikasi</p>
ANCAMAN	<p>Proses penyediaan sarana dan prasarana serta standardisasi pendidikan oleh perangkat daerah</p>	MEREDUKSI ANCAMAN	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah-daerah pinggiran</p>



<b>Misi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028:</b>			
<b>“Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028”</b>			
	belum maksimal		
<b>STRATEGI</b>	<b>Meningkatkan kualitas SDM Pendidikan dan pemerataan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan</b>		
<b>Sasaran 3:</b>			
<b>Meningkatnya standar hidup masyarakat</b>			
<b>ANALISIS SWOT</b>			
<b>KEKUATAN</b>	Daya ungkit pariwisata sebagai penggerak perekonomian	<b>MEMBANGUN KEKUATAN</b>	Mendorong pertumbuhan wirausaha serta sektor barang dan jasa terutama terkait sektor pariwisata
<b>KELEMAHAN</b>	Belum optimalnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	<b>MENGATASI KELEMAHAN</b>	Memperkuat program Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi
<b>PELUANG</b>	Pertumbuhan sektor barang dan jasa	<b>MENANGKAP PELUANG</b>	Menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan sektor barang dan jasa
<b>ANCAMAN</b>	Kondisi ekonomi makro yang sulit diprediksi akibat pemulihan pasca covid 19 dan resesi global	<b>MEREDUKSI ANCAMAN</b>	Menguatkan potensi unggulan daerah
<b>STRATEGI</b>	<b>Mewujudkan stabilitas ekonomi daerah melalui dukungan infrastruktur, pertumbuhan wirausaha dan pertumbuhan investasi.</b>		
<b>Sasaran 4:</b>			
<b>Terwujudnya kebutuhan pangan masyarakat</b>			
<b>ANALISIS SWOT</b>			
<b>KEKUATAN</b>	Peningkatan produksi pangan terjadi dari tahun ketahun	<b>MEMBANGUN KEKUATAN</b>	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk mendukung peningkatan produksi
<b>KELEMAHAN</b>	Rendah ketersediaan infrastruktur lumbung	<b>MENGATASI KELEMAHAN</b>	Membangun sistem lumbung pangan daerah



Misi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028:			
"Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028"			
PELUANG	Kota Bima termasuk dalam kebijakan prioritas nasional di wilayah NTB untuk pengembangan sektor perkebunan	MENANGKAP PELUANG	Penguatan kelompok tani dan mendorong pemerataan akses permodalan bagi petani
ANCAMAN	Perubahan iklim dan cuaca ekstrem	MEREDUKSI ANCAMAN	Menggalakkan sistem pertanian berkelanjutan
STRATEGI	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan		
Sasaran 5:			
Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemuda			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Pertumbuhan jumlah organisasi wanita dan organisasi pemuda di Kota Bima	MEMBANGUN KEKUATAN	Memfasilitasi kegiatan organisasi wanita dan organisasi pemuda di Kota Bima
KELEMAHAN	Lingkungan kerja yang masih kurang nyaman bagi kaum perempuan (kebiasaan merokok yang banyak dilakukan laki-laki di lingkungan kerja)	MENGATASI KELEMAHAN	Membangun lingkungan kerja dan sosial yang mendukung pemberdayaan perempuan dan pemuda
PELUANG	Bonus demografi	MENANGKAP PELUANG	Upaya pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan
ANCAMAN	Angka kenakalan remaja (tawuran, pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang) yang masih ada di Kota Bima	MEREDUKSI ANCAMAN	Pelibatan seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan fungsi kontrol sosial dalam rangka mengurangi angka kenakalan remaja
STRATEGI	Mendorong prestasi pemuda dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan		
Tujuan 2:			
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat			
Sasaran 6:			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi			



Misi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028:			
“Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028”			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Posisi strategis Kota Bima sebagai daerah transit dan penyangga kawasan pariwisata nasional (Lombok dan Pulau Komodo)	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan iklim investasi dan produktifitas sector-sektor unggulan: pariwisata, pertanian tanaman pangan, kelautan dan perikanan, perdagangan dan jasa serta industri
KELEMAHAN	Kurangnya daya saing UMKM	MENGATASI KELEMAHAN	Memfasilitasi pelatihan, akses modal dan pendampingan pelaku usaha dan UMKM dalam meningkatkan dan mengembangkan skala usahanya
PELUANG	Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengembangan pariwisata sebagai kawasan penyangga destinasi wisata nasional.	MENANGKAP PELUANG	Integrasi arah kebijakan daerah dengan Provinsi dan Pusat
ANCAMAN	Resesi ekonomi dan kenaikan tingkat inflasi.	MEREDUKSI ANCAMAN	Penguatan sistem perekonomian berbasis kemasyarakatan
STRATEGI	<b>Penguatan UMKM dan sektor pariwisata sebagai poros integrasi pembangunan produk unggulan dalam kerangka pembangunan ekonomi Kota Bima yang berkelanjutan</b>		
Sasaran 7:			
Meningkatnya kesempatan kerja			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Jumlah penduduk dan usia produktif serta angkatan kerja potensial cukup tinggi	MEMBANGUN KEKUATAN	Menguatkan afirmasi pemerintah dengan melibatkan stakeholder dalam perluasan kesempatan dan penciptaan lapangan kerja baru
KELEMAHAN	Kota Bima belum memiliki BLK terpadu	MENGATASI KELEMAHAN	Membentuk UPTD BLK dan membangun gedung serta fasilitas BLK yang berkualitas
PELUANG	Pengembangan produk unggulan dan pariwisata membuka lapangan kerja dan peluang usaha	MENANGKAP PELUANG	Memfasilitasi dan menstimulasi penciptaan lapangan kerja baru dan peluang usaha melalui akses permodalan dan pelatihan



<b>Misi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028:</b>			
<b>“Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028”</b>			
<b>ANCAMAN</b>	Tidak meratanya sebaran dan kepadatan penduduk	MEREDUKSI ANCAMAN	Membangun pusat pertumbuhan baru di wilayah pinggiran kota
<b>STRATEGI</b>	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembanguna BLK sebagai wadah penyediaan tenaga kerja terampil serta peningkatan akses permodalan		
<b>Sasaran 8:</b>			
<b>Menurunnya tingkat kemiskinan</b>			
<b>ANALISIS SWOT</b>			
<b>KEKUATAN</b>	Optimalnya kinerja pengentasan kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	MEMBANGUN KEMERDEKAHAN	Meningkatkan pengintegrasian dan kerjasama lintas urusan serta keterlibatan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan
<b>KELEMAHAN</b>	Sejak tahun 2020 di Kota Bima terdapat penyandang kemiskinan ekstrem	MENGATASI KELEMAHAN	Optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan pengentasan PKMS
<b>PELUANG</b>	Perhatian dan partisipasi NGO sangat tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan	MENANGKAP PELUANG	Mengembangkan regulasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan dana CSR
<b>ANCAMAN</b>	Indeks Gini Rasio mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan ini mengindikasikan ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan	MEREDUKSI ANCAMAN	Upaya pemerataan pembangunan dan efektivitas sasaran penerima bantuan ekonomi dan program-program sosial lainnya
<b>STRATEGI</b>	Meningkatkan pemerataan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan memperluas cakupan penanganan PMKS		
<b>Tujuan 3:</b>			
<b>Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik</b>			
<b>Sasaran 9:</b>			
<b>Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik</b>			
<b>ANALISIS SWOT</b>			



Misi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028:			
“Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028”			
KEKUATAN	Komitmen pemerintah kota Bima untuk memaksimalkan implementasi SAKIP dan <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)</i>	MEMBANGUN KEKUATAN	Mengoptimalkan dan mengakselerasi implementasi rencana aksi reformasi birokrasi
KELEMAHAN	Belum ada <i>roadmap</i> reformasi birokrasi	MENGATASI KELEMAHAN	Menyusun <i>roadmap</i> reformasi birokrasi dan membangun bisnis proses pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil
PELUANG	Paradigma baru untuk menerapkan penyederhanaan birokrasi dan tata laksana	MENANGKAP PELUANG	Penataan organisasi terus dilakukan melalui penyederhanaan birokrasi dan tata laksana
ANCAMAN	Regulasi pusat yang diskret dan cepat berubah	MEREDUKSI ANCAMAN	Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur
STRATEGI	<b>Mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan reformasi birokrasi.</b>		
<b>Tujuan 4:</b>			
<b>Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman</b>			
<b>Sasaran 10:</b>			
<b>Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman</b>			
<b>ANALISIS SWOT</b>			
KEKUATAN	Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan 100% sanitasi, 0% kumuh, dan 100% air bersih pada akhir masa RPD	MEMBANGUN KEKUATAN	Menetapkan penyediaan rumah layak huni sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah
KELEMAHAN	masih rendahnya pendapatan masyarakat dan cakupan bantuan untuk rumah layak huni yang masih terbatas	MENGATASI KELEMAHAN	Mendorong peningkatan program penyediaan rumah layak huni
PELUANG	Besarnya atensi dan kontrol masyarakat dalam penataan lingkungan	MENANGKAP PELUANG	Mendorong program-program berbasis pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan dana kelurahan



Misi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028:			
“Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028”			
ANCAMAN	Kawasan kumuh masih luas (pada tahun 2021 sebesar 147,08 hektar)	MEREDUKSI ANCAMAN	Mendorong penataan berbagai aspek pendukung lingkungan layak yaitu mencakup kebersihan lingkungan/persampahan, air bersih, sanitasi, kondisi rumah, jalan lingkungan dan saluran drainase.
STRATEGI	Membangun lingkungan permukiman yang layak melalui penyediaan prasana utilitas umum (PSU) serta pemberdayaan masyarakat.		
Sasaran 11:			
Meningkatnya kemantapan infrastruktur			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Pembangunan infrastruktur daerah selalu menjadi prioritas pembangunan tahunan Kota Bima	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan cakupan pembangunan infrastruktur daerah yang memenuhi standar.
KELEMAHAN	Cakupan pembangunan infrastruktur daerah belum merata di seluruh wilayah	MENGATASI KELEMAHAN	
PELUANG	Perhatian pemerintah pusat dalam penyediaan infrastruktur daerah sangat tinggi	MENANGKAP PELUANG	Melaksanakan program <i>sharing</i> bersama pemerintah pusat
ANCAMAN	Potensi bencana yang dapat terjadi setiap saat	MEREDUKSI ANCAMAN	Membangun infrastruktur yang tahan bencana
STRATEGI	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah yang tahan bencana dan mendukung pengurangan karbon		
Sasaran 12:			
Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Sistem kesiapsiagaan sudah terbangun	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan cakupan mitigasi bencana dan tanggap darurat penanganan bencana
KELEMAHAN	Belum optimalnya sistem peringatan dini bencana	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan tanggap darurat bencana



<b>Misi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028:</b>			
<b>“Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028”</b>			
PELUANG	Keterlibatan Pemerintah Pusat, masyarakat maupun pihak NGO dalam membantu membangun ketahanan terhadap bencana	MENANGKAP PELUANG	Melaksanakan program sharing bersama pemerintah pusat, NGO maupun BUMN
ANCAMAN	Tingginya angka sedimentasi Teluk Bima,	MEREDUKSI ANCAMAN	Rehabilitasi kawasan hulu dan daerah resapan air,
	Penggundulan kawasan hulu yang masif		Penataan DAS
STRATEGI	<b>Meningkatkan cakupan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana</b>		
<b>Tujuan 5:</b>			
<b>Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah</b>			
<b>Sasaran 13:</b>			
<b>Meningkatnya keamanan dan ketertiban</b>			
<b>ANALISIS SWOT</b>			
KEKUATAN	Pemerintah Kota Bima mampu menjaga stabilitas keamanan daerah	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan keamanan ketentraman dan ketertiban mulai dari skala lingkungan
KELEMAHAN	Cakupan pengendalian stabilitas keamanan daerah belum menyeluruh	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama FKPD dalam mewujudkan stabilitas keamanan daerah
PELUANG	Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan ketentraman dan ketertiban cukup tinggi	MENANGKAP PELUANG	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana kelurahan termasuk didalamnya menjaga K3
ANCAMAN	Angka kejadian kasus kriminalitas masih tinggi	MEREDUKSI ANCAMAN	Memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Meningkatkan peran lembaga keagamaan, organisasi social kemasyarakatan dan tokoh agama/tokoh masyarakat
STRATEGI	<b>Mewujudkan stabilitas daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menekan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta konflik sosial</b>		

Sumber: RPD Kota Bima Tahun 2024-2026



Tabel 1.18 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024-2026
<b>Tujuan 1:</b> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing		
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima melalui peningkatan kualitas nakes, layanan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong PHBS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan akreditasi puskesmas dan rumah sakit</li><li>2. Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan</li><li>3. Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Obat-obatan</li><li>4. Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, bayi dan balita</li><li>5. Promosi penerapan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat)</li><li>6. Optimalisasi layanan kesehatan ibu dan anak</li><li>7. Peningkatan cakupan pelayanan PM dan PTM</li><li>8. Edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular</li></ol>
Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas SDM Pendidikan dan pemerataan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan standarisasi penyelenggaraan Dikdas</li><li>2. Pemenuhan standarisasi penyelenggaraan PAUD</li><li>3. Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik/guru</li><li>4. Peningkatan kualifikasi guru terstandar</li><li>5. Peningkatan Pembelajaran berbasis digital</li><li>6. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah</li></ol>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024-2026
Meningkatnya standar hidup masyarakat	Mewujudkan stabilitas ekonomi daerah melalui dukungan infrastruktur, pertumbuhan wirausaha dan pertumbuhan investasi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan daya beli masyarakat</li><li>2. Pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian</li><li>3. Mendorong percepatan investasi</li><li>4. Mendorong pertumbuhan wirausaha baru</li><li>5. Mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat</li></ol>
Terwujudnya kebutuhan pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan</li><li>2. Fasilitasi kelompok tani dan nelayan</li><li>3. Kemudahan akses modal bagi para petani dan nelayan</li><li>4. Optimalisasi program diversifikasi pangan</li><li>5. Membangun sistem lumbung pangan daerah</li></ol>
Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemuda	Mendorong prestasi pemuda dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangun lingkungan kerja dan sosial yang mendukung pemberdayaan perempuan dan pemuda;</li><li>2. Pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan;</li><li>3. Fasilitasi kegiatan organisasi wanita dan organisasi pemuda di Kota Bima</li></ol>
Tujuan 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Penguatan UMKM dan sektor pariwisata sebagai poros integrasi pembangunan produk unggulan dalam kerangka pembangunan ekonomi Kota Bima yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan dan pengembangan destinasi wisata daerah</li></ol>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024-2026
		<ol style="list-style-type: none"><li>Promosi wisata dan pengembangan ekonomi kreatif</li><li>Penguatan kelembagaan UMKM dan daya saing produk UMKM</li><li>Pengembangan produk unggulan daerah</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>Pengembangan industri pengolahan ikan</li><li>Penguatan kelembagaan dan kualitas SDM koperasi</li><li>Identifikasi dan optimalisasi potensi investasi</li><li>Peningkatan kualitas layanan perizinan</li></ol>
Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembanguna BLK sebagai wadah penyediaan tenaga kerja terampil serta peningkatan akses permodalan	<ol style="list-style-type: none"><li>Penguatan BLK sebagai sarana peningkatan kualitas tenaga kerja</li><li>Mendorong tumbuhnya wirausaha baru</li><li>Mendorong tumbuhnya industri kecil sebagai penyedia lapangan kerja</li><li>Mendorong terbentuknya jaringan pemasaran tenaga kerja daerah</li><li>Membangun sistem yang mendukung kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja</li></ol>
Menurunnya tingkat kemiskinan	Meningkatkan pemerataan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan memperluas cakupan penanganan PMKS	<ol style="list-style-type: none"><li>Memperluas cakupan penanganan PMKS</li><li>Optimalisasi upaya rehabilitasi sosial diluar panti</li><li>Peningkatan kapasitas tenaga penyelenggara kesejahteraan sosial</li><li>Meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas</li></ol>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024-2026
		<ol style="list-style-type: none"><li>5. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan non alam saat terjadi bencana</li><li>6. Mengurangi ketimpangan sosial</li></ol>
Tujuan 3: Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik		
Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan reformasi birokrasi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah</li><li>2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Penataan dan penyederhanaan birokrasi berbasis <i>outcome</i></li><li>4. Penguatan kinerja perencanaan pembangunan</li><li>5. Penguatan kinerja penganggaran dan pengelolaan keuangan</li></ol>
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman		
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Membangun lingkungan permukiman yang layak melalui penyediaan prasarana utilitas umum (PSU) serta pemberdayaan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan layanan air bersih</li><li>2. Peningkatan infrastruktur jalan, jalan lingkungan dan jembatan</li><li>3. Pembangunan sarana sanitasi dan pengolahan limbah belum terpadu antar sektor</li><li>4. Optimalisasi penataan dan pemanfaatan ruang</li><li>5. Optimalisasi pengelolaan sampah, khususnya sampah rumah tangga</li><li>6. Penanganan rumah tidak layak huni</li></ol>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024-2026
		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Memperluas cakupan cakupan bantuan untuk rumah layak huni</li><li>8. Penataan drainase</li></ol>
Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah yang tahan bencana dan mendukung pengurangan karbon	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan</li><li>2. Peningkatan sarana sanitasi dan pengolahan limbah terpadu</li><li>3. Penataan terminal AKDP dan AKAP</li><li>4. Pembukaan jalan baru pada kawasan produktif dan daerah pinggiran</li><li>5. Peningkatan sistem irigasi</li><li>6. Pembangunan DAM penahan banjir</li></ol>
Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon	Meningkatkan cakupan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana</li><li>2. Peningkatan jumlah Kelurahan Siaga Bencana</li><li>3. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat, NGO dan BUMD dalam membangun masyarakat tangguh bencana</li><li>4. Pelibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana</li><li>5. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah</li><li>6. Peningkatan upaya pemulihan sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial pascabencana</li><li>7. Menggalakkan program reboisasi untuk rehabilitasi kawasan hulu</li><li>8. Melaksanakan program Kampung Iklim dan penyelamatan mata air</li></ol>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024-2026
Tujuan 5: Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah		
Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Mewujudkan stabilitas daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menekan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta konflik sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Kepala Daerah</li><li>2. Penguatan peran FKUB dan organisasi sosial kemasyarakatan</li><li>3. Penguatan sistem kewaspadaan dini masyarakat</li><li>4. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum</li><li>5. Deteksi dini potensi konflik</li><li>6. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait penyelenggaraan Pemilu</li></ol>

Sumber: RPD Kota Bima Tahun 2024-2026

Arah kebijakan tahunan yang terdapat dalam RPD memandu sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Arah kebijakan tahunan akan menjadi tema dan prioritas pembangunan dalam dokumen RKPd Kota Bima. Perumusan arah kebijakan tahunan berbasis pada telaah urgensi isu/permasalahan pembangunan yang perlu direspon secara sistematis dan bertahap.

Rumusan arah kebijakan perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar tercapai sinergi pembangunan antara level pemerintah. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024 telah dijelaskan tentang arah pembangunan untuk pengembangan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya menjadi program prioritas pembangunan pemerintah di wilayah NTB.



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Berdasarkan rumusan arah kebijakan Kota Bima untuk periode tahun 2024-2026, maka dapat dijabarkan arah kebijakan dan prioritas tahunan yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam RKPD selama 3 tahun sebagai berikut.



**Tabel. 1. 19. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2024-2026**

Arah Kebijakan Tahunan				Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026			
2024		2025		2026			
1	Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Obat-obatan	1	Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan	1	Peningkatan akreditasi puskesmas dan rumah sakit	PD 6	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan
2	Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, bayi dan balita	2	Peningkatan cakupan pelayanan PM dan PTM				
3	Promosi penerapan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat)	3	Edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular				
4	Optimalisasi layanan kesehatan ibu dan anak						
1	Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik/guru	1	Pemenuhan standarisasi penyelenggaraan Dikdas	1	Peningkatan kualifikasi guru terstandar	PD 5	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
2	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah	2	Pemenuhan standarisasi penyelenggaraan PAUD	2	Peningkatan Pembelajaran berbasis digital		
1	Peningkatan daya beli masyarakat	1	Mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat	1	Pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian	PD 8	Peningkatan layanan publik
2	Mendorong pertumbuhan wirausaha baru	2	Mendorong pertumbuhan wirausaha baru	2	Mendorong percepatan investasi		



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Arah Kebijakan Tahunan						Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026	
2024		2025		2026			
1	Peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	1	Peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	1	Optimalisasi program diversifikasi pangan	PD 4	Penanganan stunting
2	Fasilitasi kelompok tani dan nelayan	2	Kemudahan akses modal bagi para petani dan nelayan	2	Membangun sistem lumbung pangan daerah		
1	Pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan	1	Pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan	1	Membangun lingkungan kerja dan sosial yang mendukung pemberdayaan perempuan dan pemuda	PD 7	Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih
1	Penataan dan pengembangan destinasi wisata daerah	1	Penataan dan pengembangan destinasi wisata daerah	1	Pengembangan industri pengolahan ikan	PD 1	Pertumbuhan ekonomi
2	Promosi wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	2	Pengembangan produk unggulan daerah	2	Identifikasi dan optimalisasi potensi investasi		
3	Penguatan kelembagaan UMKM dan daya saing produk UMKM	3	Penguatan kelembagaan dan kualitas SDM koperasi	3	Peningkatan kualitas layanan perizinan		
1	Penguatan BLK sebagai sarana peningkatan kualitas tenaga kerja	1	Mendorong tumbuhnya industri kecil sebagai penyedia lapangan kerja	1	Membangun sistem yang mendukung kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja	PD 3	Perluasan kesempatan kerja



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Arah Kebijakan Tahunan						Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026	
2024		2025		2026			
2	Mendorong tumbuhnya wirausaha baru	2	Mendorong terbentuknya jaringan pemasaran tenaga kerja daerah				
1	Memperluas cakupan penanganan PMKS	1	Meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas	1	Peningkatan kapasitas tenaga penyelenggara kesejahteraan sosial	PD 2	Penurunan angka kemiskinan
2	Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan non alam saat terjadi	2	Mengurangi ketimpangan sosial	2	Optimalisasi upaya rehabilitasi sosial di luar panti		
1	Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	1	Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	PD 7	Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih
2	Penguatan kinerja perencanaan pembangunan	2	Penataan dan penyederhanaan birokrasi berbasis <i>outcome</i>	2	Penguatan kinerja perencanaan pembangunan		
3	Penguatan kinerja penganggaran dan pengelolaan keuangan			3	Penguatan kinerja penganggaran dan pengelolaan keuangan		
1	Pemenuhan layanan air bersih	1	Pemenuhan layanan air bersih	1	Pemenuhan layanan air bersih	PD 10	Meningkatkan kualitas permukiman



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Arah Kebijakan Tahunan						Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026	
2024		2025		2026			
2	Pembangunan sarana sanitasi dan pengolahan limbah belum terpadu antar sektor	2	Peningkatan infrastruktur jalan, jalan lingkungan dan jembatan	2	Optimalisasi penataan dan pemanfaatan ruang		
3	Penanganan rumah tidak layak huni	3	Optimalisasi pengelolaan sampah, khususnya sampah rumah tangga	3	Memperluas cakupan bantuan untuk rumah layak huni		
4	Penataan drainase	4	Penataan drainase	4	Penataan drainase		
1	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	1	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	1	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	PD 9	Peningkatan kualitas infrastruktur
2	Penataan terminal AKDP dan AKAP	2	Peningkatan sarana sanitasi dan pengolahan limbah terpadu	2	Pembukaan jalan baru pada kawasan produktif dan daerah pinggiran		
3	Peningkatan sistem irigasi			3	Pembangunan DAM penahan banjir		
1	Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana	1	Peningkatan jumlah Kelurahan Siaga Bencana	1	Peningkatan upaya pemulihan sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial pascabencana	PD 12	Mitigasi bencana
2	Peningkatan kerjasama dengan masyarakat, NGO dan BUMD dalam membangun masyarakat tangguh bencana	2	Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah	2	Menggalakkan program reboisasi untuk rehabilitasi kawasan hulu	PD 11	Peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan rendah karbon



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Arah Kebijakan Tahunan					Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026		
2024		2025		2026			
3	Pelibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	3	Melaksanakan program Kampung Iklim dan penyelamatan mata air				
1	Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	1	Peningkatan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait penyelenggaraan Pemilu	1	Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	PD 13	Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah
2	Penguatan peran FKUB dan organisasi sosial kemasyarakatan	2	Penguatan sistem kewaspadaan dini masyarakat	2	Penguatan peran FKUB dan organisasi sosial kemasyarakatan		
3	Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	3	Deteksi dini potensi konflik	3	Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Kepala Daerah		

Sumber: RPD Kota Bima Tahun 2024-2026



b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1) Visi

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru menjadi panduan bagi Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026.

Sesuai Inmendagri ini, dokumen RPD tidak memuat Visi dan Misi lima tahunan yang akan memberikan arah bagi perencanaan pembangunan daerah masa transisi layaknya dokumen RPJMD. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 memuat tentang rumusan tujuan, dan sasaran pembangunan daerah pada periode tahun 2024-2026 atau selama tiga tahun kedepan.

Rumusan umum tujuan pembangunan Kota Bima untuk jangka waktu 20 tahun (2008-2028) dituangkan dalam visi Kota Bima sebagai berikut: *“Mewujudkan Kota Bima yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada tahun 2028.*

Dengan rumusan visi tersebut di atas, dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun ke depan, diharapkan kondisi Kota Bima akan mengalami perubahan secara signifikan dengan ditandai oleh:

1. Terwujudnya Kota Bima yang Sejahtera dan Maju ditandai dengan adanya perkembangan dan



kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat; Tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.

2. Masyarakat Kota Bima yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Provinsi dan Pusat.

#### 4.2. Misi Kota Bima

Berdasarkan RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028, misi



pembangunan sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Bima dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Bima yang sejahtera dan mandiri melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dalam bidang permukiman dan prasarana wilayah, peningkatan SDM yang berkualitas, meningkatkan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
2. Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing melalui Pembangunan manusia yang berkualitas, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan secara berkelanjutan maupun pembangunan bidang infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara.
3. Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan yang dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan penciptaan iklim belajar yang kondusif dalam lingkungan kehidupan masyarakat melalui peningkatan partisipasi Masyarakat.
4. Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia,



dan berbudaya dengan membentuk manusia yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal.

5. Mewujudkan Kota Bima asri dan lestari yang diwujudkan melalui upaya-upaya nyata dalam membenahan pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan.
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui meningkatkan pembangunan daerah secara menyeluruh, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan



yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara tepat, efektif dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan Sasaran akan menjadi panduan dan pedoman pembangunan selama tiga tahun atau masa transisi keberadaan Kepala Daerah definitif. Rumusan tujuan dan sasaran tersebut akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan menjadi cita-cita atau impian dalam prioritas pembangunan yang diformulasikan dari berbagai amanat atau telaahan dokumen perencanaan pembangunan antara lain RPJPN dan RPJMN, serta RPJPD dan RPMJD Provinsi maupun Kota, termasuk telaahan kajian atas dokumen-dokumen kebijakan nasional lainnya, RTRW, arahan Presiden Republik Indonesia serta isu global maupun nasional.

Berdasarkan hasil analisis dari identifikasi permasalahan daerah, maka diperoleh 6 isu strategis dalam perencanaan pembangunan selama tiga tahun kedepan yaitu:

1. Peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan bermartabat;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan;
3. Pengembangan Infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Informasi
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
6. Keamanan dan ketenteraman wilayah



Enam isu strategis tersebut yang akan dikembangkan menjadi tujuan dan sasaran untuk perbaikan terhadap perencanaan pembangunan selama tiga tahun kedepan, mulai dari tahun 2024 yang akan dikerjakan oleh Pejabat Walikota sampai dengan tahun 2026 di Kota Bima.

**Tabel 2.20. Tujuan yang Menjawab Isu Strategis**

<b>Isu Strategis</b>	<b>(Untuk menjawab Isu Strategis)</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Aspek Pendukung Sasaran</b>	<b>Sektor/Perangkat Daerah</b>
Peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan bermartabat	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pelayanan kesehatan, Kualitas SDM kesehatan, Ketersediaan sarpras, alkes dan farmasi	Dinas Kesehatan
			Pencegahan <i>stunting</i> , Peningkatan Ketahanan Pangan, Aksesibilitas pangan, Pemanfaatan pangan, Kesejahteraan keluarga	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Pemenuhan kebutuhan dasar, Peningkatan partisipasi perempuan dalam Pembangunan, Penurunan Angka KDRT, Pemenuhan Hak Anak	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Kualitas PSU,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

Isu Strategis	(Untuk menjawab Isu Strategis)	Indikator Tujuan	Aspek Pendukung Sasaran	Sektor/Perangkat Daerah
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, Pengembangan Sarpras Pendidikan, Pengembangan kurikulum, Peningkatan prestasi pemuda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Pengembangan perpustakaan dan arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Penguatan UMKM, Pengembangan wirausaha baru, Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Tenaga Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian
			Stabilitas Harga	Bag. Ekonomi Setda
Percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	Perdagangan dan Perindustrian, Akses permodalan, Wirausaha mandiri	Dinas Koperindag
			Jasa Pariwisata	Dinas Pariwisata Kebudayaan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

Isu Strategis	(Untuk menjawab Isu Strategis)	Indikator Tujuan	Aspek Pendukung Sasaran	Sektor/Perangkat Daerah
			Kualitas infrastruktur, Akses PSU	Dinas PUPR Dishub
			Perijinan dan Penanaman modal, Peningkatan investasi	Dinas PMPTSP
			Stabilitas Keamanan	Satpol PP
			Penyediaan tenaga kerja terampil, Hubungan industrial ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
			Akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar, Perlindungan dan jaminan sosial	Dinsos
			Peningkatan kesejahteraan keluarga, Pemberdayaan perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, kecamatan
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Bappeda
			Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan	BPKAD



Isu Strategis	(Untuk menjawab Isu Strategis)	Indikator Tujuan	Aspek Pendukung Sasaran	Sektor/Perangkat Daerah
			Aset	
			Manajemen ASN, Penguatan Organisasi dan Tatalaksana, Penataan Peraturan Perundangan	BKPSDM Bag Organisasi, Bag Adm Pembangunan, Bag Ekonomi, Bag Hukum, Bag Umum dan Perlengkapan, Bag Prokopim, Bag AP, LPBJ-LPSE, Sekretariat DPRD
			Penguatan Pengawasan	Inspektorat
			Peningkatan Kualitas Layanan Publik	DPMPSTSP, Dukcapil, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kecamatan
			Penguatan Inovasi	Brida
			Pengembangan E-Gov	Dinas Kominfo
			Manajemen Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengembangan Infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Persentase kawasan permukiman layak huni	Penataan ruang terbuka hijau, Pengelolaan sampah	DLH
			Penataan Ruang, Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum,	DPUPR Dishub



Isu Strategis	(Untuk menjawab Isu Strategis)	Indikator Tujuan	Aspek Pendukung Sasaran	Sektor/Perangkat Daerah
			Operasional dan Pemeliharaan	
			Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat	Kecamatan Dikes
			Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Dinas Perkim
			Peningkatan Infrastruktur Perhubungan dan Kominfo	Dinas Komifotik
Mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon			Peningkatan Infrastruktur Kebencanaan, Ketahanan terhadap bencana, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, Rehab rekon	BPBD Damkar Satuan Pol PP Dinas Sosial
Keamanan dan ketenteraman wilayah	Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Rasa Aman	Upaya Pencegahan (Preventif), Upaya Penindakan (Represif)	Sat Pol PP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Dinas Sosial, DP3A, Bag. Kesra, Kecamatan
			Kerjasama dengan aparat penegak hukum	Badan Kesbangpol

Sumber: RPD Kota Bima Tahun 2024-2026

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan pada tabel 2.20., perlu dijabarkan kedalam sasaran dan target yang akan dicapai selama tiga tahun masa transisi kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan dibawah kendali seorang Penjabat Walikota. Sasaran



merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.

Tujuan maupun sasaran perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang memiliki indikator sebagai alat ukur yang akan dicapai keberhasilannya yang berorientasi pada hasil (*outcome-impact*). Rumusan Tujuan dan Sasaran serta indikator sasaran dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel. 2. 21. Rumusan Sasaran serta Indikator Capaian RPD Kota Bima Tahun 2024-2026

Visi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028:

“Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028”

Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Kinerja Program Pada Tahun:			
					2024	2025	2026	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,83	71,11	71,26	71,4
	2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks SPM Pendidikan	Angka (rentang 1-100)	52,76	54,76	57,76	60,76
	3	Meningkatnya standar hidup masyarakat	PDRB per kapita harga berlaku	Rp. Juta /Tahun	23,4	23,63	23,75	23,87
	4	Terwujudnya kebutuhan pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	70,25	71,25	72,25	73,25
	5	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemuda	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Angka	70,16	70,23	70,27	70,3
			Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional	Orang	10	12	13	14
Indeks Gini	6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,7	5,0-6,0	5,0-6,0	5,0-6,0
	7	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,73	3,55	3,38	3,21
	8	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	8,8	7,94	7,54	7,17



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Kinerja Program Pada Tahun:		
						2024	2025	2026
Indeks Reformasi Birokrasi	9	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	55,6	60,14	62,55	65,05
Persentase kawasan permukiman layak huni	10	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	56,08	61,83	64,92	68,17
	11	Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Angka	78,26	79,04	79,83	80,63
	12	Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon	Indeks ketahanan daerah	Angka	0,74	0,75	0,78	0,81
Indeks Rasa Aman	13	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Indeks Rasa Aman	Angka (skala 1-100)	87,6	88,48	88,92	89,37

Sumber: RPD Kota Bima Tahun 2024-2026



- c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;

Program pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026.

Selain output yang diharapkan, program pembangunan daerah juga tentunya memberikan dampak terhadap berbagai aspek dan komponen lingkungan hidup. Hal ini dianalisis dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang selanjutnya menjadi acuan dan terintegrasi kedalam RPJMD Kota Bima.

Untuk itu dirumuskan 13 Prioritas Pembangunan Kota Bima sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Penurunan angka kemiskinan
3. Perluasan kesempatan kerja
4. Penanganan stunting
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Kesehatan
7. Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih
8. Peningkatan layanan public
9. Peningkatan kualitas infrastruktur
10. Meningkatkan kualitas permukiman
11. Peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan rendah karbon



12. Mitigasi bencana

13. Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah

Selanjutnya prioritas pembangunan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam program-program pembangunan menurut sasaran pada setiap misi pembangunan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.



Tabel. 1. 22. Program Pendukung Capaian Sasaran Pembangunan Kota Bima Tahun 2024

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	77	Lintas Perangkat Daerah	
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,11		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penurunan Angka kesakitan	Persen	37	Dinas Kesehatan	Kesehatan
	Penurunan Angka Kematian Bayi	KH	2/100	Dinas Kesehatan	Kesehatan
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka TFR	Persen	80	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan (UNMET NEED)	Persen	25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
	Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna mCPR (Modern Contraceptive Prevalance Rate)	Persen	70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Penurunan ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Persen	38/1.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah ketersediaan energi	kka/kap/hari	3.198	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan
	Jumlah ketersediaan protein	gram/kap/hari	75,74	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	persen	92	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi Standar	persen	91	Dinas Kesehatan	Kesehatan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Fasilitas Pelayanan Farmasi dan Alkes yang aman	persen	95	Dinas Kesehatan	Kesehatan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem jaringan	3 Sistem jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	Persen	4,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	Persen	1,03%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses IPAL	Persen	1,92%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum	Persen	1,82%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persen	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	Persen	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	80	Dinas Sosial	Sosial
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	Persen	54,76	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Anak



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	Persen	9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Anak
	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Anak
Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks SPM Pendidikan	Angka (rentang 1-100)	54,76	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik dan kependidikan	Persen	75	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	Persen	10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan yang diakomodir	Persen	10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah/Lembaga yang Memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan	Persen	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah penerima buku mutan lokal	Persen	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang mendapat akreditasi A	Persen	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	Persen	54,76	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase perpustakaan yang representatif	Persen	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Perpustakaan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase jumlah arsip yang diolah	Persen	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentasi perlindungan arsip	Persen	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kearsipan
Meningkatnya standar hidup masyarakat	PDRB per kapita harga berlaku	Rp. Juta /Tahun	23,63	Lintas Perangkat Daerah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Persentase Usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Persen	2,58	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Produktifitas UKM	Persen	100	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen	26,3	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi	Persen	6,41	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	Persen	1,06	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Usaha Mikro yang bermitra	Persen	25,11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan terhadap DPI	Persen	52	Dinas Pertanian	Pertanian
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih	Persen	30	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) Per Kapita Per Tahun	Persen	6,35	Dinas Kelautan dan Perikanan	Perikanan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
	Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan	Persen	3,3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Perikanan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Persen	22	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pertanian
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	Persen	32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	Persen	47,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan
	Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	Persen	57,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	Persen	54,76	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang menjual Barang Kadarluasa	Persen	80%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perdagangan
	Rata-rata ketersediaan Barang Pokok dan barang penting lainnya Tahun	Persen	100%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perdagangan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Persen	100	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	Penunjang Pemerintahan (Setda)
Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	71,25	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah ketersediaan energi	kka/kap/hari	3.198	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan ternak yang terinfeksi PHMS (%)	Persen	14%	Dinas Pertanian	Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran	Persen	100	Dinas Pertanian	Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan terhadap DPI	Persen	52	Dinas Pertanian	Pertanian
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	Persen	1,03%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Capaian Sarana dan Prasarana Pasar yang dibangun/ direvitalisasi/ Direhabilitasi	Persen	42	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perdagangan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) Per Kapita Per Tahun	Persen	6,35	Dinas Kelautan dan Perikanan	Perikanan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
	Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan	Persen	3,3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Perikanan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kelompok Industri Kecil Menengah yang mendapat Bantuan Hibah	Persen	100	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian
	Persentase Ketersediaan Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri	Persen	100	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian
Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemuda	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Angka	70,23		Lintas Urusan
	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional	Orang	12		Lintas Urusan
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	Persen	32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	Persen	47,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan
	Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	Persen	57,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka TFR	Persen	2,2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Persen	80	Dinas Sosial	Sosial



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan yang diakomodir	Persen	10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	Persen	10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	Persen	9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Anak
	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persen	10%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Pemberdayaan Perempuan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
				Anak	
	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penurunan Angka kesakitan	Persen	37	Dinas Kesehatan	Kesehatan
	Penurunan Angka Kematian Bayi	KH	2/100	Dinas Kesehatan	Kesehatan
Tujuan 2.1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	Angka	0,370-0,400	Lintas Perangkat Daerah	Lintas Urusan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0-6,0	Lintas Perangkat Daerah	Lintas Urusan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Capaian Sarana dan Prasarana Pasar yang dibangun/ direvitalisasi/ Direhabilitasi	Persen	42	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kelompok Industri Kecil Menengah yang mendapat Bantuan Hibah	Persen	100	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian
	Meningkatnya Pembangunan Industri Kota Bima	Persen	100	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan ketersediaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal	Persen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persen	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
				Pintu	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Persen	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Persen	100	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	Penunjang Pemerintahan (Setda)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan ODTW	Persen	32	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	32	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisataaan yang terlibat	Persen	32,5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar budaya yang kembangkan	Persen		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum	Persen	1,82%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	Persen	4,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	Persen	1,03%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem jaringan	3 Sistem jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	Persen	100	Dinas Perhubungan	Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani	Persen	70	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3)	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibum
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,55	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih	Persen	30	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
	Angka produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	44 juta	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi	Persen	95	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	Persen	98	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang melaksanakan K3	Persen	25	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
	Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen		Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
	Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK)	Persen	75	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan ketersediaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal	Persen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persen	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Persen	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Persentase Usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Persen	2,58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Produktifitas UKM	Persen	100	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen	26,3	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi	Persen	6,41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	Persen	1,06	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Usaha Mikro yang bermitra	Persen	25,11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kelompok Industri Kecil Menengah yang mendapat Bantuan Hibah	Persen	100	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian
	Persentase Ketersediaan Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri	Persen	100	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian
Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen	7,94	Lintas Perangkat Daerah	Lintas Urusan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang terlatih	Persen	83	Dinas Sosial	Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi	Persen	60	Dinas Sosial	Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	80	Dinas Sosial	Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Penurunan Keluarga PRA SEJAHTERA DAN SEJAHTERA I	Persen	7,1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok masyarakat yang diberdayakan	Persen	100	Kecamatan	Kewilayahan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka TFR	Persen	2,2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih	Persen	30	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
	Angka produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	44 juta	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	Persen	98	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum	Persen	1,82%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 3.1. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,14	Lintas Perangkat Daerah	Lintas Urusan
Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,14	Lintas Perangkat Daerah	Lintas Urusan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja pengendalian perencanaan pembangunan daerah (hasil Moneyv yang menjadi dasar perencanaan pembangunan)	Persen	100	Bappeda	Perencanaan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Index Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	98,5	Bappeda	Perencanaan
	Persentase program dan kegiatan yang diakomodir dalam RKPD	Persen	100	Bappeda	Perencanaan
	Persentase renja perangkat daerah yang diakomodir dalam RKPD	Persen	100	Bappeda	Perencanaan
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Level	86	Inspektorat	Pengawasan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	Bagian Kesra Setda	Penunjang Pemerintahan (Setda)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	Persen	100	Dinas Keuangan	Keuangan
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Kepegawaian
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	Persen	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Persen	100	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	Penunjang Pemerintahan (Setda)



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan	Persen	65	Dinas Kepegawaian	Kepegawaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	Semua Perangkat Daerah	Semua Urusan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Menurunnya Temuan APIP dan BPK	Persen	40	Inspektorat	Pengawasan
	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil	persen	57,14	Inspektorat	Pengawasan
	Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	persen	93,37	Inspektorat	Pengawasan
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	Persen	100	Bagian Hukum Setda Kota Bima	Penunjang Pemerintahan (Sekretariat DPRD)



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Persen	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	99,72	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penurunan Angka kesakitan	Persen	37	Dinas Kesehatan	Kesehatan
	Penurunan Angka Kematian Bayi	KH	2/100	Dinas Kesehatan	Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi Standar	persen	91	Dinas Kesehatan	Kesehatan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	Persen	100	Dinas Perhubungan	Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Predikat PLID Kota Bima	Nilai	A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Masyarakat yang memperoleh pelayanan publik	Persen	50	Kecamatan	Kecamatan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebermanfaatan inovasi daerah	Persen	50	Dinas Riset dan Pengembangan	Riset dan Pengembangan
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Penerapan E-Goverment dan pelayanan TIK	Persen	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase jumlah arsip yang diolah	Persen	100	Dinas Kearsipan	Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentasi perlindungan arsip	Persen	100	Dinas Tenaga Arsip	Kearsipan



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
Tujuan 4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Persentase kawasan permukiman layak huni	Persen	72,28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	61,83	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air/Udara	Nilai	29,75/87,83	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	Persen	11,64	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan	Persen	97,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	Persen	100	Dinas Perhubungan	Perhubungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok masyarakat yang di berdayakan	Persen	100	Kecamatan	Kewilayahan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Luas wilayah Pertanian yang terlayani irigasi Teknis	Persen	1,50%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem jaringan	3 Sistem jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani	Persen	70	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Masyarakat yang memperoleh pelayanan publik	Persen	100	Kecamatan	Kewilayahan
Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Angka	79,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum	Persen	1,82%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kota dalam kondisi mantap	Persen	2,43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	Persen	4,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air/Udara	Nilai	29,75/87,83	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengembang an perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persen	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah dan permukiman Layak Huni	Persen	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	Persen	100	Dinas Perhubungan	Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Predikat PLID Kota Bima	Nilai	A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pemenuhan sistem kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana	Persen	85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibum
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Trantibum



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase luas wilayah pertanian yang terlayani irigasi teknis	Persen	73,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok masyarakat yang di berdayakan	Persen	100,00%	Kecamatan	Kewilayahan
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Penerapan E-Goverment dan pelayanan TIK	Persen	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Komunikasi, Informatika dan Statistik
Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks ketahanan daerah	Angka	0,75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibum
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pemenuhan sistem kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana	Persen	85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibum
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	80	Dinas Sosial	Sosial



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Trantibum
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3)	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibum
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi sosial	Persen	60	Dinas Sosial	Sosial
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengembang an perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persen	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok masyarakat yang di berdayakan	Persen	100	Kecamatan	Kewilayahan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Rasa Aman	Angka (skala 1-100)	88,48	Lintas Perangkat Daerah	Trantibum
Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Indeks Rasa Aman	Angka (skala 1-100)	88,48	Lintas Perangkat Daerah	Trantibum
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3)	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibum
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat	Persen	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Trantibum
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan yang diakomodir	Persen	10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	Persen	10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Persen	80	Dinas Sosial	Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persen	10%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	Persen	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah	Urusan
1	2	3	4	5	6
	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	Bagian Kesra Setda	Penunjang Pemerintahan (Setda)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtibmas yang tertangani	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Trantibum

Sumber: RPD Kota Bima Tahun 2024-2026



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

- d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen perencanaan Tahunan

**Tabel. 1. 24. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Bima**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1			Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		
1	01		Urusan pemerintahan bidang pendidikan		
1	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan yang Terlaksana	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Angka kelulusan siswa sesuai jenjang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	03	Program pengembangan kurikulum	Persentase sekolah penerima buku mutan lokal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2			Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		
2	22		Urusan pemerintahan bidang kebudayaan		
2	22	02	Program pengembangan kebudayaan	Persentase cagar budaya yang dikembangkan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	22	05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase pengelolaan cagar budaya	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1			Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		
1	02		Urusan pemerintahan bidang kesehatan		
1	02	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan yang Terlaksana	Dinas Kesehatan
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan masyarakat yang	Dinas Kesehatan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			masyarakat	terlaksana	
1	02	03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Cakupan Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan yang terlaksana	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Cakupan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang terlaksana	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang terlaksana	Dinas Kesehatan
1			Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		
1	03		Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		
1	03	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan yang Terlaksana	
1	03	02	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	persentase luas wilayah pertanian yang terlayani irigasi teknis persentase luas wilayah pertanian yang terlayani irigasi teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh akses air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang mengakses IPAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Meningkatkan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	Program	Persentase wilayah	Dinas Pekerjaan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pengembangan permukiman	strategis dan cepat tumbuh Kota Bima yang ditangani	Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Program penataan bangunan gedung	persentase bangunan gedung pemerintah yang dibangun sesuai dengan ketentuan penataan bangunan gedung milik pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Jumlah Bangunan dan lingkungan kawasan yang ditata dan dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Peningkatan Jalan Kota dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi Sesuai Standar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1			Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		
1	04		Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman		
1	04	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	Program pengembangan perumahan	Persentase pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	Program kawasan permukiman	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

Kode	Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
2	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				
2	10	Urusan pemerintahan bidang pertanahan			
2	10	05	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Prosentase Pengadaan Tanah Berdasarkan Prioritas Pembangunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	10	08	Program pengelolaan tanah kosong	Jumlah sertifikat aset tanah pemerintah yang diterbitkan Persentase penurunan kawasan kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar				
1	05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			
1	05	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Penunjang Urusan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3)0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar				
1	05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			
1	05	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	Program penanggulangan bencana	Persentase pemenuhan sistem kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Kode	Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		bencana	
1	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		
1 05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		
1 05 01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Luas Wilayah yang terlayani kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		
1 06	Urusan pemerintahan bidang sosial		
1 06 01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Dinas Sosial
1 06 02	Program pemberdayaan sosial	Persentase PKSK yang terlatih Persentase PSKS yang diberdayakan	
1 06 04	Program rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	
1 06 05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	06	06	Program penanganan bencana	Sosial oPersentase Korban Bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat	
2			Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		
2	07		Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja		
2	07	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Tenaga Kerja
2	07	02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	a.Persentase tenaga kerja terlatih b.Angka produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	Program penempatan tenaga kerja	Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	Program hubungan industrial	a. Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 b. Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan c. Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK)	Dinas Tenaga Kerja
2			Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		
2	07		Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja		
2	07	01	Program penunjang urusan	Cakupan Layanan	Dinas Tenaga Kerja



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pemerintahan daerah kabupaten/kota	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
2	07	03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	a.Persentase tenaga kerja terlatih b. Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2			Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		
2	08		Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
2	08	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	Program perlindungan perempuan	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	Program pemenuhan hak anak (pha)	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak % meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	
2	08	07	Program perlindungan khusus anak	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

Kode	Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		anak			
2	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				
2	09	Urusan pemerintahan bidang pangan			
2	09	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah ketersediaan energi Jumlah ketersediaan protein	
2	09	04	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	
2	09	05	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase bahan pangan yang lolos uji	
2	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				
2	11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup			
2	11	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase meningkatnya jumlah pokmas sadar lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air dan Udara	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin	Persentase meningkatnya jumlah ijin lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Kode	Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	yang diawasi	
2 11 08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	oPersentase meningkatnya jumlah pokmas sadar lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase menurunnya pengaduan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	Program pengelolaan persampahan	Persentase Sampah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup
2	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		
2 12	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		
2 12 01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02	Program pendaftaran penduduk	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03	Program pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan data Jumlah OPD yang mendapatkan hak akses Jumlah persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 05	Program pengelolaan profil	Jumlah Dokumen Profil	Dinas



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Kode	Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	kependudukan	Kependudukan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				
2	14	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana			
2	14	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	Program pengendalian penduduk	Cakupan Program pengendalian penduduk yang terlaksana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Cakupan Program Pembinaan KB yang terlaksana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Cakupan Program Pemberdayaan dan Peningkatan KS yang terlaksana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				
2	15	Urusan pemerintahan bidang perhubungan			
2	15	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan
2	15	02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (lla j)	Persentase sarana dan prasarana yang telah sesuai standar	Dinas Perhubungan
2	15	03	Program pengelolaan pelayaran	Persentase sarana dan prasarana yang telah sesuai standar	Dinas Perhubungan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Kode	Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
2	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				
2	16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika			
2	16	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya pemanfaatan layanan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Meningkatnya Penerapan E- Government dan pelayanan TIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	20	Urusan pemerintahan bidang statistik			
2	20	02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas dan memenuhi standar satu data	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	21	Urusan pemerintahan bidang persandian			
2	21	02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	persentase kasus penyalahgunaan informasi daerah yang selesai di tangani	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				
2	17	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah			
2	17	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Eksistensi Dinas terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi		

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	17	05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	
2	17	06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
2	17	07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Jumlah dokumen pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan Usaha mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	08	Program pengembangan umkm	Cakupan pengembangan UMKM	
3			Urusan pemerintahan pilihan		
3	30		Urusan pemerintahan bidang perdagangan		
3	30	03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Cakupan Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	31		Urusan pemerintahan bidang perindustrian		
3	31	02	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase capaian program perencanaan pembangunan industri	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	cakupan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30		Urusan pemerintahan bidang perdagangan		
3	30	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Eksistensi dinas terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2			Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		
2	17		Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah		

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	17	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Eksistensi dinas terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2			Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		
2	18		Urusan pemerintahan bidang penanaman modal		
2	18	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	Program promosi penanaman modal	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	Program pelayanan penanaman modal	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan perusahaan yang memenuhi ketentuan yang berlaku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Peningkatan capaian realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2			Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		
2	23		Urusan pemerintahan bidang perpustakaan		
2	23	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	23	02	Program pembinaan perpustakaan	Presentase perpustakaan yang representatif	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	24		Urusan pemerintahan bidang kearsipan		
2	24	02	Program pengelolaan arsip	Presentase jumlah arsip yang diolah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	03	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Presentasi perlindungan arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	04	Program perizinan penggunaan arsip	Presentasi ijin penggunaan arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
3			Urusan pemerintahan pilihan		
3	25		Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan		
3	25	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan angka Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2			Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		
2	19		Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga		
2	19	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				urusan pemerintah daerah	
2	19	02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	19	03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan yang diakomodir	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3			Urusan pemerintahan pilihan		
3	26		Urusan pemerintahan bidang pariwisata		
3	26	02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pengembangan ODTW	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03	Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Kepariwisataaan yang terlibat	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3			Urusan pemerintahan pilihan		
3	27		Urusan pemerintahan bidang pertanian		
3	27	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase fasilitasi perencanaan, pengangga dan evaluasi kinerja OPD Persentase penyediaan laporan perencanaan, pengangga dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Pertanian
3	27	02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran	Dinas Pertanian

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	27	03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase peningkatan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian dalam kondisi baik (%)	Dinas Pertanian
3	27	04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penurunan ternak yang terinfeksi PHMS (%)	Dinas Pertanian
3	27	05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan terhadap DPI	Dinas Pertanian
3	27	06	Program perizinan usaha pertanian	Cakupan pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	Dinas Pertanian
3	27	07	Program penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Dinas Pertanian
4			Unsur pendukung urusan pemerintahan		
4	01		Sekretariat daerah		
4	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Sekretariat Daerah
4	01	03	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Sekretariat Daerah
4	01	02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
4			Unsur pendukung urusan pemerintahan		
4	02		Sekretariat dprd		
4	02	01	Program penunjang urusan	Cakupan Penunjang	Sekretariat DPRD

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pemerintahan daerah kabupaten/kota	Urusan Kantor	
4	02	02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	Sekretariat DPRD
5			Unsur penunjang urusan pemerintahan		
5	01		Perencanaan		
5	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja pengendalian perencanaan pembangunan daerah ( hasil Monev yang menjadi dasar perencanaan pembangunan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Index Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05		Penelitian dan pengembangan		
5	05	02	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase kebermanfaatan inovasi daerah Persentase peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5			Unsur penunjang urusan pemerintahan		
5	02		Keuangan		



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	02	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	02	02	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	02	03	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	02	04	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5			Unsur penunjang urusan pemerintahan		
5	03		Kepegawaian		
5	03	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Penunjang Urusan Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	Program kepegawaian daerah	Cakupan Program Kepegawaian yang terlaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04		Pendidikan dan pelatihan		
5	04	02	Program pengembangan sumber daya manusia	Cakupan PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA yang terlaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6			Unsur pengawasan urusan pemerintahan		
6	01		Inspektorat daerah		
6	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	PERSENTASE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERSELENGGARA	Inspektorat
6	01	02	Program	Cakupan PROGRAM	Inspektorat



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			penyelenggaraan pengawasan	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN yang terlaksana	
6	01	03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Cakupan PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI yang terlaksana	Inspektorat
7			Unsur kewilayahan		
7	01		Kecamatan		
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Rasanæ Barat
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persentase koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan	Kecamatan Rasanæ Barat
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Rasanæ Barat
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rasanæ Barat
7			Unsur kewilayahan		
7	01		Kecamatan		
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan	Kecamatan Rasanæ Barat
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persentase koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan	Kecamatan Rasanæ Timur
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Kecamatan Rasanæ Timur

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	oJumlah laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rasanae Timur
7			Unsur kewilayahan		
7	01		Kecamatan		
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Asakota
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Asakota
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persentase koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan	Kecamatan Asakota
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Asakota
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Asakota
8			Unsur pemerintahan umum		
8	01		Kesatuan bangsa dan		

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			politik		
8	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Monev, Sosialisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Kebangsaan Kepada Pelajar dan Masyarakat Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Melaksanakan Aktivitas Dan Pembelajaran Politik Berjalan Sesuai Dengan UU Yang Berlaku	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Monev dan Pembinaan Terhadap Aktivitas Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Terlaksananya Monev kepada Ormas dan Yayasan Sesuai Dengan UU Yang Berlaku	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan	Monev Terhadap Aktivitas Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

Kode			Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			budaya	Budaya	
8	01	06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Penguatan Kewaspadaan Nasional Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: RKPD Kota Bima Tahun 2024



### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

#### a) Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kota Bima menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan Pelayanan Dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima.



b) Dasar Hukum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (2), menyatakan bahwa pelaksanaan Pelayanan pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bima Tahun 2020 berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);



15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);



20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2681);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 540);
22. Peraturan Walikota Bima Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 541);
23. Peraturan Walikota Bima Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 542);
24. Peraturan Walikota Bima Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 543);
25. Peraturan Walikota Bima Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 544);



26. Peraturan Walikota Bima Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 545);
27. Peraturan Walikota Bima Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sosial (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 546);

c) Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bima dalam rangka mencapai Visi dan Misi **“Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri”** dan tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang Transparan dan Akuntabilitas. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bima untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.



Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kota Bima untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Bima menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bima dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan



sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

d) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap SPM

Prioritas Pembangunan tahun 2021 merupakan hasil sinkronisasi antara prioritas RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 dengan agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita) serta arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2021-2026 berdasarkan tiga dimensi yang telah ditetapkan yaitu :

- ❖ Prioritas 1 : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
- ❖ Prioritas 2 : Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan Pemerataan.
- ❖ Prioritas 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
- ❖ Prioritas 4 : Meningkatkan pengelolaan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan ekonomi lokal
- ❖ Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim
- ❖ Prioritas 6 : Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintah yang baik.



- ❖ Prioritas 7 : Meningkatkan program penanggulangan kemiskinan

Berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri, maka skala prioritas penyusunan RKPD Kota Bima Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara;
- b. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera;
- c. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antarwilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah;



- d. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektivitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.
- e. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.



## **BAB II**

### **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN**

#### **PEMERINTAHAN DAERAH**

##### 2.1. Capaian Kinerja Makro

Untuk mengukur tingkat keberhasilan Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kota Bima ditetapkanlah beberapa indikator kinerja daerah. Dalam indikator kinerja daerah terbagi menjadi 3 kelompok aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, kinerja yang diukur difokuskan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olah raga. Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, ukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator).

Aspek pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan umum dalam bentuk barang publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup serta layanan yang menyangkut kinerja aparatur pemerintahan.

Pada aspek daya saing daerah, indikator diukur berkaitan dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.



Indikator pada aspek daya saing daerah ini adalah kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari pengeluaran perkapita penduduk baik total maupun untuk non makanan serta kemudahan layanan perijinaan usaha dalam pada penciptaan iklim investasi.

Tabel 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Makro Kota Bima Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,24	78,91	0,856
2	Angka Kemiskinan	8,67	8,12	-6,344
3	Angka Pengangguran	3,57	3,27	-8,403
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,16	4,04	-21,705
5	Pendapatan Perkapita	Tidak Ada	Tidak Ada	0
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,428	0,411	-3,972

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bima Tahun 2024



## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Hasil adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau dampak dari suatu program atau kegiatan. IKK-H digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dan sasaran program atau kegiatan telah tercapai.

Tabel 2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan	Mengukur tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	79,79 %	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
		Mengukur tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun dalam Pendidikan Dasar	97,88 %	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
		Mengukur tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	97,66 %	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
		Mengukur tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pendidikan Kesetaraan	80,94%	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
2	Kesehatan	Mengukur Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten/Kota	0 %	Dinas Kesehatan	Surat Pernyataan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Mengukur Tingkat Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki Akreditasi	0 %	Dinas Kesehatan	Surat Pernyataan
		Mengukur Tingkat Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	80,25 %	Dinas Kesehatan	
		Mengukur Tingkat Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	74,44 %	Dinas Kesehatan	
		Mengukur Porsentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	77,95 %	Dinas Kesehatan	
		Mengukur Porsentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	85,42 %	Dinas Kesehatan	
		Mengukur Porsentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	102,19 %	Dinas Kesehatan	
		Mengukur Porsentase Orang Usia 15 - 59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	72,40 %	Dinas Kesehatan	
		Mengukur Porsentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	72,65 %	Dinas Kesehatan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Mengukur Porsentase Penderita Hipertasi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	97,58 %	Dinas Kesehatan	
		Mengukur Porsentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100,32%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur Porsentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92,23 %	Dinas Kesehatan	
		Mengukur Porsentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181,37 %	Dinas Kesehatan	
		Mengukur Porsentase Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV Sesuai Standar	98,45 %	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	Mengukur Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota)	23,22 %	Dinas Pekerjaan Umum	
		Mengukur Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	6,61%	Dinas Pekerjaan Umum	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Mengukur Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani Oleh Jaringan Irigasi	43,45%	Dinas Pekerjaan Umum	
		Mengukur Porsentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	89,06 %	Dinas Pekerjaan Umum	
		Mengukur Porsentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan Air Limbah domestic	98,67%	Dinas Pekerjaan Umum	
		Mengukur Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	100 %	Dinas Pekerjaan Umum	
		Mengukur Tingkat Kemantapan Jalan	61,84%	Dinas Pekerjaan Umum	
		Mengukur Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	1,91 %	Dinas Pekerjaan Umum	
		Mengukur Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi	100 %	Dinas Pekerjaan Umum	
4	Perumahan Rakyat	Mengukur Capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	0 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Mengukur Capaian kinerja Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota	0 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surat Pernyataan
		Mengukur Porsentase Kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota ditangani	37,05 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	23,36 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		Mengukur Porsentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	0 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surat Pernyataan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur Porsentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	Dinas Pol PP	
		Mengukur Porsentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	Dinas Pol PP	
		Mengukur Jangkauan layanan informasi rawan bencana	82,40 %	BPBD	
		Mengukur Jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,009 %	BPBD	
		Mengukur Jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	BPBD	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Mengukur jangkauan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Mengukur Rata-rata Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	6,7 Menit	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
6	Sosial	Mengukur Porsentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti)	53,43 %	Dinas Sosial	
		Mengukur Porsentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %	Dinas Sosial	
7	Tenaga Kerja	Mengukur Porsentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	92,30 %	Dinas Tenaga Kerja	
		Mengukur Porsentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	4,21 %	Dinas Tenaga Kerja	
		Mengukur Tingkat Produktivitas tenaga kerja	77.821.470,41	Dinas Tenaga Kerja	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Mengukur Porsentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	17,19 %	Dinas Tenaga Kerja	
		Mengukur Porsentase tenaga kerja ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	Dinas Tenaga Kerja	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengukur Porsentase Anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	0,088 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Mengukur porsentase anak korban kekerasan yang di tangani instansi yang terkait kabupaten/kota	100 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	35,03 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9	Pangan	Mengukur Ketersediaan Pangan Kabupaten/ Kota	168,8 %	Dinas Ketahanan Pangan	
10	Pertanahan	Mengukur Porsentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi di bandingkan dengan luas izin lokasi yang di terbitkan	0 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surat Pernyataan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Mengukur porsentase penetapan tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	15,21 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		Mengukur Porsentase lokasi pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	0 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surat Pernyataan
		Mengukur Porsentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surat Pernyataan
		Mengukur Porsentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	0 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surat Pernyataan
		Mengukur porsentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surat Pernyataan
11	Lingkungan Hidup	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60,25 %	Dinas Lingkungan Hidup	
		Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	74,34 %	Dinas Lingkungan Hidup	
		Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	50 %	Dinas Lingkungan Hidup	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Mengukur Tingkat Perekaman KTP di Kabupaten/Kota	99,40 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Mengukur Porsentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	100 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Mengukur tingkat kepemilikan Akta Kelahiran	98,87 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Mengukur Porsentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	51,42 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengukur Porsentase Desa Tertinggal	0 %	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda	Surat Pernyataan
		Mengukur Perkembangan Desa yang mengalami peningkatan status menjadi Desa Mandiri	0 %	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda	Surat Pernyataan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mengukur Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	2,37 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Mengukur Tingkat Pemakaian Kontrasepsi Modern	62,91 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Mengukur Porsentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,73 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
15	Perhubungan	Mengukur Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	85 %	Dinas Perhubungan	
		Mengukur Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,81 %	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika	Mengukur Porsentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	22,85 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Mengukur Porsentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Mengukur Porsentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	79,99 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
17	Koperasi, Usaha dan Menengah	Mengukur Peningkatan Koperasi yang berkualitas	73,87 %	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
		Mengukur Porsentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	5,01 %	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
18	Penanaman Modal	Mengukur Porsentase Peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	-33,52 %	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
19	Kepemudaan dan Olah Raga	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,10 %	Dinas Pariwisata	
		Mengukur Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	0,63 %	Dinas Pariwisata	
		Mengukur Peningkatan Prestasi Olah Raga	2	Dinas Pariwisata	
20	Statistik	Mengukur Porsentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan Pembangunan Daerah	74,28 %	Dinas Statistik Daerah	
		Mengukur Porsentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam Evaluasi Pembangunan Daerah	74,28 %	Dinas Statistik Daerah	
21	Persandian	Mengukur Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah kabupaten/kota	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22	Kebudayaan	Mengukur tingkat kelestarian Cagar Budaya	100 %	Dinas Pariwisata	
23	Perpustakaan	Mengukur tingkat kegemaran membaca masyarakat	69,03 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	69,46 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
24	Kearsipan	Mengukur tingkat ketersiapan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	50,31 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan bangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	19 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
25	Kelautan dan Perikanan	Mengukur Total Produksi Perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	102,40 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	
26	Pariwisata	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota	138,47 %	Dinas Pariwisata	
		Mengukur Pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	5,42 %	Dinas Pariwisata	
		Mengukur Hunian Akomodasi di Kabupaten/Kota	15,40 %	Dinas Pariwisata	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku)	3,72 %	Dinas Pariwisata	
		Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota (harga berlaku)	0,58 %	Dinas Pariwisata	
27	Pertanian	Mengukur Tingkat Produktivitas Pertanian	677,14 %	Dinas Pertanian	
		Mengukur Tingkat Penurunan kejadian penyakit menular hewan	-57,34 %	Dinas Pertanian	
28	Kehutanan		0 %		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Mengukur Porsentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	0 %		Surat Pernyataan
30	Perdagangan	Mengukur prestase pelahu usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (UIPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS Toko swalayan)	82,85 %	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
		Mengukur Porsentase Kinerja realitas pupuk	94,78 %	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Mengukur Porsentase alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) pertanda tera sah yang berlaku	99,82%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
31	Perindustrian	Mengukur Tingkat pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	-10,24 %	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
		Mengukur Porsentase sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0 %	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Surat Pernyataan
		Mengukur Porsentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	0 %	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
		Porsentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPIU) kecil dan industri menengah yang di keluarkan oleh instansi terkait	0 %	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Surat Pernyataan
		Mengukur Porsentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	0 %	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Surat Pernyataan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		Mengukur Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	60 %	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
32	Transmigrasi		0 %		

#### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Tabel 2.2.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (*Perencanaan dan Keuangan*)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ( <i>Perencanaan dan Keuangan</i> )	Mengukur Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	4,59	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	
		Mengukur Tax Rasio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potesi Pajak Daerah	7,69 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Melihat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	Inpektorat Daerah	
		Melihat tingkat peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	3	Inpektorat Daerah	
		Mengukur efisiensi belanja operasi diluar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD diluar transfer expenditures	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	
		Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan )	Mengukur Porsentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 %	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Surat Pernyataan
		Mengukur Tingkat Pelaksanaan Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	5,52 %	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
		Mengukur Rasio Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	100,03 %	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-11,61 %	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Mengukur rasio Pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	81,67 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
		Melihat Pegawai Fungsional PNS (diluar Guru dan tenaga Kesehatan)	24,58 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
		Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi (diluar tenaga guru dan kesehatan)	39,25 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Melihat Kreabilitas Anggaran Belanja dari perencanaan awal	3,75 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	
		Melihat Kreabilitas Penerimaan Pendapatan dari perencanaan awal	0,54 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	
		Melihat manajemen asset seluruh perangkat daerah yang ada	4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Melihat Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,10 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ( <i>Transparansi dan Partisipasi Publik</i> )	Melihat ketersediaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	98,92 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	



### 2.3. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Bima selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melaksanakan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bima yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi. Pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026, RKPD Tahun 2024, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*)

Kerangka Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bima menggunakan peraturan yang ada, pertama, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada



Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja, indikator, sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, kedua, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:



Tabel 3.7  
Skala Nilai Peringkat Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria
1	2	3
1	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber Permendagri 54 Tahun 2010

#### A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Walikota Bima Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Walikota Bima merupakan kinerja tahun pertama pada periode Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 103,85%. yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

<b>SASARAN 1 : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT</b>					
NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria capaian
1.	Usia Harapan Hidup*	73,14	73,15	100,01%	Sangat Tinggi
<b>SASARAN 2: MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN</b>					
1.	Indeks SPM Pendidikan	54,76	76,21	139,17%	Sangat Tinggi
<b>SASARAN 3: MENINGKATNYA STANDAR HIDUP MASYARAKAT</b>					
1.	PDRB perkapita harga berlaku	23,63	32,47	137,41%	Sangat Tinggi
<b>SASARAN 4: MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>					
1.	Indeks Ketahanan Pangan	72,49	75,94	104,76%	Sangat Tinggi
<b>SASARAN 5: MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN GENDER DAN PEMUDA</b>					
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	70,23	70,76	100,75%	Sangat Tinggi
2.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional	12	9	75,00%	Tinggi
<b>SASARAN 6: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI</b>					
NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria capaian



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

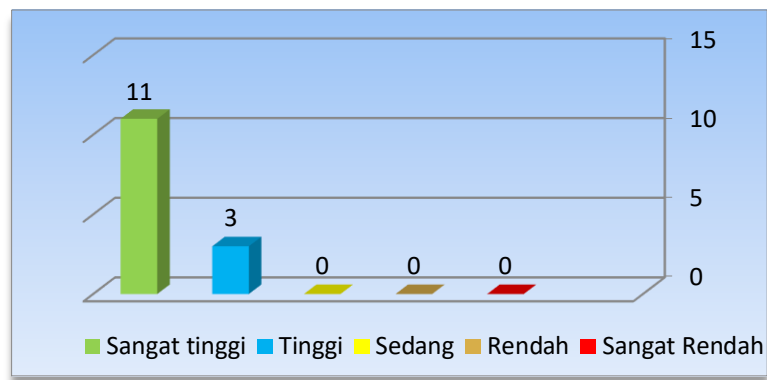
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,19	4,04	77,84%	Tinggi
<b>SASARAN 7: MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA</b>					
1.	Tingkat pengangguran terbuka	3,55	3,27	107,89%	Sangat Tinggi
<b>SASARAN 8: MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN</b>					
1.	Persentase Penduduk miskin	7,94	8,12	97,73%	Sangat Tinggi
<b>SASARAN 9: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>					
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	60,18	72,3	120,14%	Sangat Tinggi
<b>SASARAN 10: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN</b>					
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	61,83	60,25	97,44%	Sangat Tinggi
<b>SASARAN 11: MENINGKATNYA KEMANTAPAN INFRASTRUKTUR</b>					
1.	Indeks Infrastruktur	79,04	83,3	105,39%	Sangat Tinggi
<b>SASARAN 12: MENINGKATNYA KAPASITAS DAERAH TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM</b>					
NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria Capaian
1.	Indeks ketahanan daerah	0,75	0,6	80,00%	Tinggi



SASARAN 13: MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
1.	Indeks rasa aman	Sangat Tinggi	97,60	110,31%	Sangat Tinggi
Rata-rata				103,85 %	Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas , dari 14 Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan oleh Walikota Bima pada Tahun 2024, sebanyak 11 indikator kinerja dengan kategori “sangat Tinggi” dan 3 Indikator Kinerja dengan kategori “ tinggi” dan tidak ada capaian indikator kinerja yang capaian kinerja yang “sedang”, “rendah” dan “sangat rendah”.

Grafik 3. 1 Capaian Kinerja IKu berdasarkan Kriteria Capaian Kinerja Tahun 2024





B. Analisis Capaian Kinerja

1) SASARAN 1 : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Capaian Indikator Sasaran indikator sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” adalah sebagai berikut:

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Angka ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia seseorang sejak lahir hingga akhir hayatnya, dengan asumsi bahwa pola kematian di suatu wilayah tetap konstan sepanjang waktu. Semakin tinggi angka UHH, semakin baik pula kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Seiring perkembangan zaman, berbagai faktor memengaruhi angka UHH, mulai dari akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, kualitas gizi yang dikonsumsi, hingga lingkungan hidup yang sehat. Negara-negara maju dengan sistem kesehatan yang canggih, tingkat pendidikan yang tinggi, serta kesejahteraan ekonomi yang stabil cenderung memiliki UHH yang lebih panjang dibandingkan negara berkembang yang masih menghadapi tantangan di berbagai sektor.

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Sasaran 1

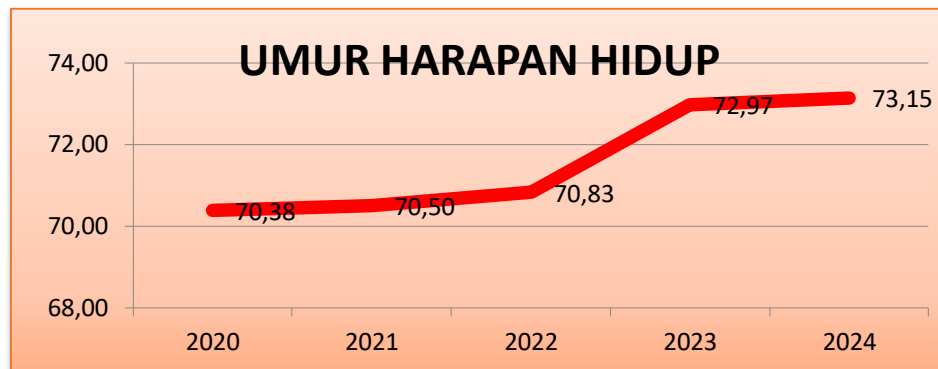
NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Usia Harapan Hidup*	73,14*	73,15	100,05%

\* Target UHH Tahun 2024 mengikuti PK Perubahan karena Target RPD dibawah Capaian kinerja 2023



Untuk mengukur sasaran Strategis “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” adalah dengan indikator Umur Har Harapan Hidup (UHH). Pada Tahun 2024 UHH Kota Bima sebesar 73,15 mengalami peningkatan sebesar 0,18 tahun dibanding Tahun 2023. UHH Kota Bima sebesar 73,15 memiliki arti bahwa setiap bayi yang lahir di Kota Bima pada tahun 2024 mempunyai harapan hidup hingga berusia 73 tahun dan 1 bulan dan 24 Hari.

Grafik 3. 2 Umur Harapan Hidup Pemerintah Tahun 2019-2024



Kondisi UHH Kota Bima setiap tahunnya tahun mengalami kenaikan harapan hidup setiap tahunnya bertambah 1 (satu). Kecenderungan UHH Kota Bima dari tahun 2020 hingga 2024 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan terutama pada Tahun 2023 setelah keadaan perekonomian membaik setelah dampak Covid hilang. Hal ini Tingginya kesadaran masyarakat Kota Bima yang didukung oleh semakin membaiknya kemampuan ekonomi masyarakat serta didukung juga oleh peningkatan kualitas sarana kesehatan oleh Pemerintah dan masyarakat.

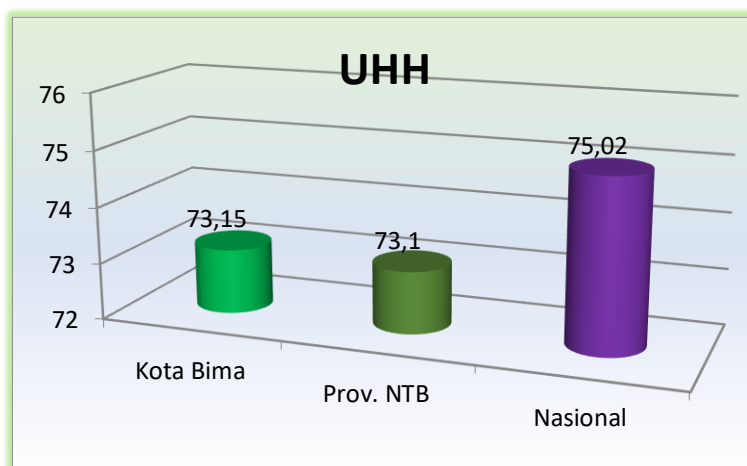


Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Realisasi UHH Tahun 2024 terhadap target RPD

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umur Harapan Hidup*	73,14*	73,15	100,05	71,40	102,45%

Capaian indikator Umur Harapan Hidup Kota Bima dibandingkan terhadap target Akhir RPD pada Tahun 2026 adalah sebesar 102,45 % dimana target RPD pada Tahun 2026 adalah 71,40 Tahun sedangkan UHH Kota Bima pada Tahun 2024 adalah 73,15 Tahun. Dari Tabel 3.4 menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 telah melebihi target akhir RPD.

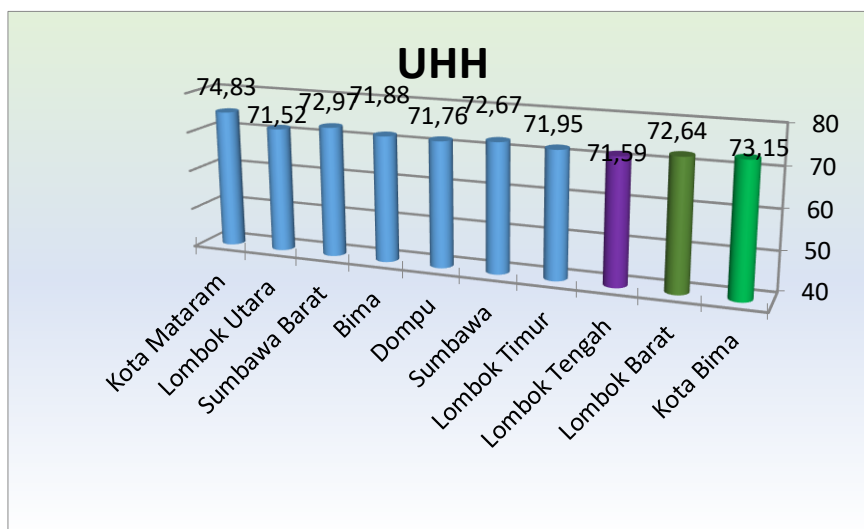
Grafik 3. 3 Perbandingan UHH Kota Bima, Prov. NTB, Indonesia





Umur harapan Hidup Kota Bima dengan angka 73,15 masih diatas Umur Harapan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan angka Umur harapan Hidup 73,10. Angka Umur Harapan Hidup Kota Bima masih dibawah Umur Harapan Hidup Nasional yaitu sebesar 75,02.

Grafik 3. 4 Perbandingan UHH Kota Bima dengan Kabupaten dan Kota di NTB



Umur harapan hidup Kota Bima berada pada posisi kedua diantara Kabupaten /Kota Provinsi dengan Umur harapan Hidup 73,15 dan berada dibawah Kota Mataram dengan UHH 74,83. Diurutan ketiga Kabupaten Sumbawa Barat dengan UHH 72,97. Kabupaten Lombok barat berada di urutan keempat yaitu UHH sebesar 72,64. Umur harapan Hidup terendah diperoleh oleh Kabupaten Lombok Utara dengan Umur harapan Hidup 71,52.



**Faktor pendukung pencapaian kinerja**, meliputi meningkatnya komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong program peningkatan pelayanan pada urusan kesehatan, baik peningkatan sarana dan prasarana, SDM, dan anggaran. Sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan terbatasnya tenaga kesehatan (khususnya dokter spesialis). **Solusi** untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kedepannya melalui pengusulan formasi bagi dokter spesialis dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada pada RSUD maupun Puskesmas.

Dalam meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan capaian Sasaran 1 sebagai berikut:

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DPPKB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas ketahanan pangan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DPPPA



2) SASARAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

Untuk mengukur sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pendidikan, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) Pendidikan.

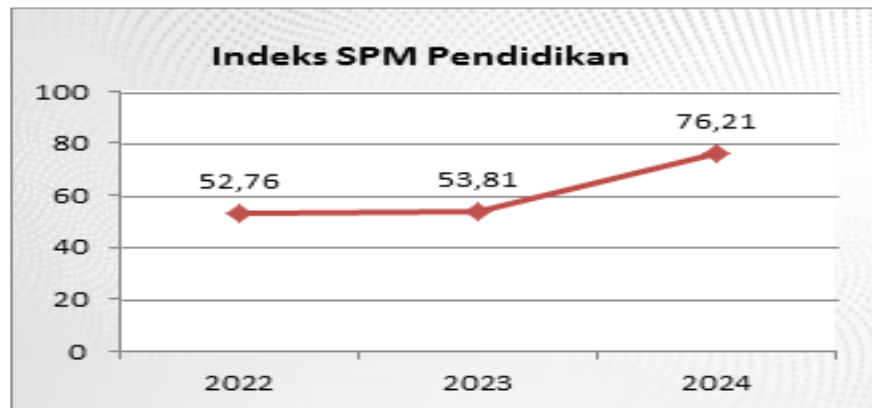
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021. Pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Permendikbudristek Republik Indonesia nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan pelaporan serta evaluasi.

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks SPM Pendidikan	54,76	76,21	139,17%

Indeks Kualitas Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) Pendidikan Kota Bima Tahun 2024 sebesar 76,21 dari target kinerja yang diperjanjikan sebesar 54,76 dengan kategori “Tuntas Pratama”, dengan capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 139,17 % dengan kategori capaian kinerja “sangat tinggi”.

Grafik 3. 5 Indeks SPM pendidikan Tahun 2022-2024



Indeks Kualitas Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) Pendidikan Kota Bima Tahun 2024 Tahun mengalami peningkatan dari 22,40 poin dari Indeks Kualitas Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) Pendidikan Kota Bima Tahun 2023 sebesar 53,81. Indeks SPM Kota Bima pada mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari Tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu sebesar 22,40 poin dimana pada Tahun 2023 Indeks SPM Pendidikan sebesar 53,81 dan Tahun 2024 meningkat menjadi 76,21.

Tabel 3. 5 perbandingan realisasi Kinerja Sasaran indikator Indeks SPM Pendidikan Tahun 2024 terhadap RPD

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umur Harapan Hidup*	54,76	76,21	139,17%	60,76	125,43%

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 dengan nilai 60,76, maka Indeks Kualitas Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) Pendidikan Tahun 2024 telah tercapai dengan nilai 76,21 dengan capaian kinerja 125,43 % atau telah melampaui akhir target RPD.



**Faktor pendukung pencapaian kinerja**, meliputi meningkatnya komitmen kepala daerah dalam membangun pendidikan di daerah, baik sarana prasarana, SDM, anggaran, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih lemah kualitas SDM pendidikan dan sarana prasarana. **Solusi** untuk meningkatkan indeks SPM pendidikan untuk ke depannya, perlu lagi meningkatkan SDM dan Sarana Prasarana Pendidikan.

Dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan capaian Sasaran 2 sebagai berikut:

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas perpustakaan dan arsip daerah

### 3) SASARAN 3 MENINGKATNYA STANDAR HIDUP MASYARAKAT

Untuk mengukur sasaran 3 : Meningkatnya Standar Hidup masyarakat, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Produk Domestik regional Bruto perkapita harga berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja



perekonomian daerah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah

Pengeluaran Perkapita Pertahun adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran perkapita pertahun.

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Standar Hidup Masyarakat” adalah sebagai berikut :



Tabel 3. 6 Capaian Kinerja sasaran 3

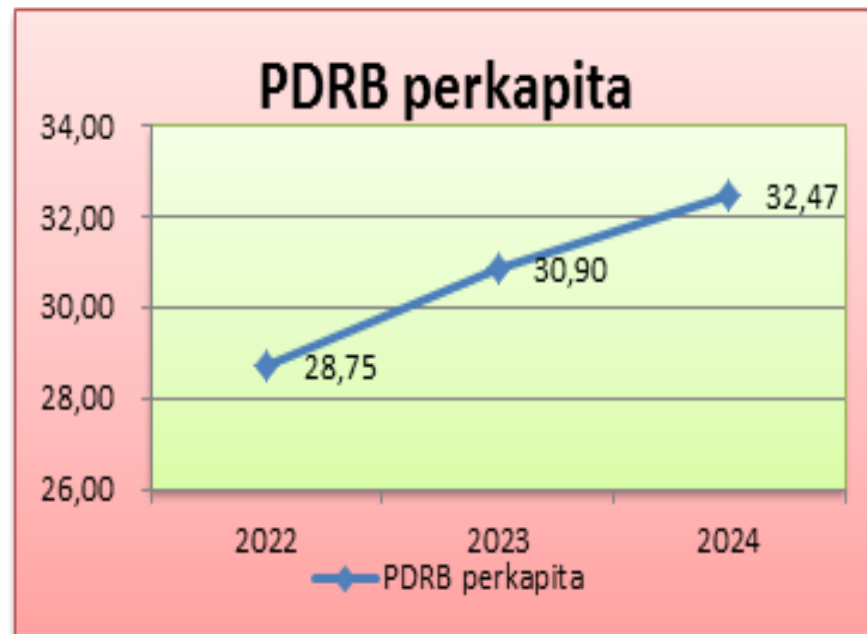
NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	PDRB perkapita harga berlaku	23,63	32,47	137,41%

Produk Domestik Regional Bruto perkapita penduduk Kota Bima pada tahun 2024 sebesar Rp.32.47 Juta/Tahun. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 137, 41% dari target sebesar Rp.23,63 Juta/Tahun. Capain kinerja indikator ini masuk kategori **Sangat tinggi**. Untuk lebih jelasnya terdapat pada Tabel 3. 7.

Produk Domestik Regional Bruto perkapita sesuai harga berlaku per tahun penduduk Kota Bima mengalami peningkatan dari Tahun 2022, 2024 dan 2024, dimana peningkatan PDRB perkapita sesuai harga berlaku dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 2,25 juta perkapita per tahun. Sedangkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto perkapita sesuai harga berlaku dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 1,58 juta perkapita per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.6.



Grafik 3. 6 PDRB perkapita sesuai harga berlaku Tahun 2022-2024



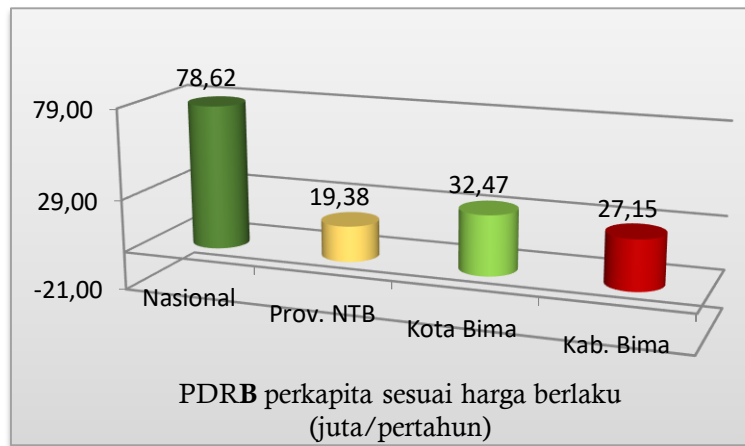
Tabel 3. 7 perbandingan realisasi Kinerja Sasaran indikator 3 terhadap RPD

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2026
1	PDRB perkapita harga berlaku	23,63	32,47	137,41%	23,87	136,03%

Capaian indikator kinerja Produk Domestik Regional Bruto perkapita sesuai harga berlaku dengan target akhir RPD Tahun 2026 dengan target 23,87 Juta/tahun, maka Tahun 2024 telah tercapai dengan nilai PDRB perkapita sebesar 32,47 juta/kapita dengan capaian kinerja 136,03 % atau telah melampaui akhir target RPD.



Grafik 3. 7 Perbandingan PDRB perkapita Kota Bima, Kab. Bima, Prov. NTB, dan Indonesia



Adapun jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Provinsi NTB, Kab. Bima dan Nasional, PDRB Perkapita Kota Bima berada diatas PDRB perkapita Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Bima serta di bawah PDRB Perkapita Nasional. Adapun secara Regional Di kabupaten dan kota Se NTB, Kota Bima menepati urutan keempat dibawah Kota Mataram dengan Pengeluaran perkapita Rp. 15.894.000 Kab. Sumbawa Barat Rp. 12.214.000 dan Lombok Barat sebesar Rp. 11.960.000.

**Faktor pendukung pencapaian kinerja**, meliputi meningkatnya kemajuan Kota Bima, terutama sektor perbankan, UMKM, dan jasa. sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah, terutama peningkatan kualitas dan promosi hasil olahan lokal sehingga produk unggulan daerah menjadi kalah bersaing dengan produk daerah lain. **Solusi** untuk meningkatkan nilai produk



unggulan daerah adalah melalui peningkatan kualitas produk dan pemasaran yang lebih luas dengan menggunakan teknologi informasi.

Dalam meningkatkan Standar Hidup Masyarakat, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa program yang menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran 3 oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait. Berikut Program yang menunjang pencapaian Sasaran meningkatnya standar hidup masyarakat sebagai berikut:

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Dinas Pertanian
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Dinas Pertanian
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



#### 4) SASARAN 4 MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN

Untuk mengukur sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan Pangan , diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Pangan.

Ketahanan pangan adalah salah satu faktor fundamental yang menentukan kesejahteraan suatu bangsa. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana sebuah negara atau wilayah mampu menyediakan, mengakses, dan memanfaatkan pangan secara berkelanjutan bagi seluruh penduduknya. Indeks ini bukan sekadar angka statistik, tetapi gambaran nyata dari kemampuan suatu negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas pangan yang cukup, bergizi, dan aman.

Ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal ketersediaan bahan makanan, tetapi juga akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Negara dengan indeks ketahanan pangan yang tinggi biasanya memiliki sistem pertanian yang maju, distribusi pangan yang baik, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Sebaliknya, di negara-negara dengan IKP yang rendah, kelangkaan pangan, harga yang tidak stabil, dan gizi buruk masih menjadi tantangan besar.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (kab/kota). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota). IKP yang



dihasilkan pada masing-masing wilayah (kabupaten/kota) dikelompokkan ke dalam enam kelompok, yaitu Prioritas 1 (Sangat Rentan), Prioritas 2 (Rentan), Prioritas 3 (Agak Rentan), Prioritas 4 (Agak Tahan), Prioritas 5 (Tahan), Prioritas 6 (Sangat Tahan). Berdasarkan hasil Analisis FSVA Kota Bima pada tahun 2024 tidak terdapat Kelurahan Rawan/Rentan Pangan atau masuk pada kategori Tahan Pangan pada prioritas 6 (enam). Tingginya capaian ini dikarenakan adanya program penanganan kerawanan pangan, koordinasi lintas sektor pada pencapaian target indikator Individu FSVA.

Capaian Indikator Sasaran indikator sasaran “Meningkatnya ketahanan pangan ” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Indikator sasaran 4

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Ketahanan Pangan	72,49	75,94	104,76%

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainya.IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan.



Berdasarkan data tersebut bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota terhadap sasaran 4 hanya mampu mencapai kinerja dengan indikator Indeks ketahanan pangan sebesar 104,76 persen dari target RPD. Capaian kinerja indikator sasaran indeks ketahanan pangan termasuk kategori sangat tinggi.

Grafik 3. 8 Indeks Ketahan Pangan Tahun 2021-2024



Indeks Ketahanan pangan Kota Bima mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2024 berada pada angka 75,94 meningkat dari Tahun 2023 yaitu sebesar 74,49 atau meningkat 1,45 angka. Peningkatan Indeks ketahanan Pangan tertinggi terjadi pada Tahun 2023 dengan indeks sebesar 74,49 atau meningkat sebesar 4,24 angka dari Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022. Dimana pada tahun 2022 Indeks Ketahanan Pangan sebesar 70,25.

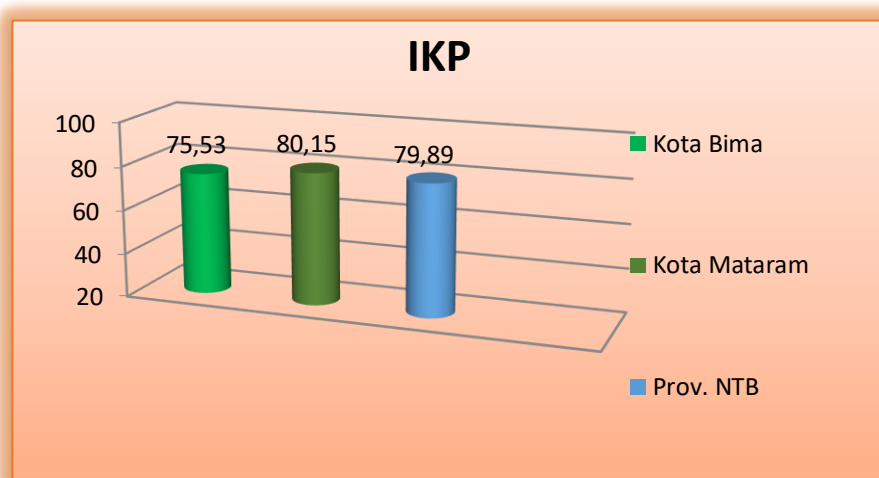


Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 dengan Target RPD

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Ketahanan Pangan	72,49	75,94	104,76%	73,25	103,67%

Indeks Ketahanan pangan Kota Bima 2024 berada pada angka 74,94 telah melebihi pencapaian target di akhir RPD tahun 2026 yaitu sebesar 73,25 dengan capaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target RPD adalah sebesar 103,67 % dengan kategori sangat tinggi.

Grafik 3. 9 Indeks Ketahanan Pangan Kota Bima, Kota Mataram dan Prov. NTB



Jika dibanding dengan Indeks Ketahanan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 dan Kota Mataram bahwa Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima masih berada dibawah Kota Mataram dan Provinsi NTB, sebagaimana terlihat pada Grafik 3.8. Dimana Indeks Ketahanan Pangan Kota Mataram sebesar 80,15 dan Provinsi NTB sebesar 79,89.



**Faktor-Faktor yang mempengaruhi wilayah rentan rawan pangan di Kota Bima antara lain:**

1. Rumah tangga tanpa akses air bersih/ terbatas;
2. Luas Lahan, Produksi pangan wilayah lebih kecil dibandingkan kebutuhan (kurang);
3. Sarana dan prasarana perdagangan, sebagai akses pemenuhan pangan;
4. Jumlah tenaga kesehatan; dan
5. Jumlah penduduk tidak sejahtera.

**Solusi** yang telah dilakukan Kota Bima dalam meningkatkan ketersediaan pangan adalah :

1. Intervensi pelaksanaan program kegiatan seperti survey dan pengolahan data bulanan tentang ketersediaan pangan (data pangan strategies);
2. Membangun kerjasama bersama Bulog sebagai mitra dalam pemenuhan kebutuhan beras terutama pada saat terjadi kelangkaan, kenaikan harga, kebencanaan dan pelaksanaan pasar murah;
3. Meningkatkan dan beragamnya ketersediaan pangan di masyarakat;
4. Informasi pasar yang mendukung distribusi pangan;
5. Kampanye, sosialisasi panganekaragaman pangan dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan panganekaragaman ketersediaan pangan lewat
6. Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
7. Meningkatkan kualitas jalan yang mendukung distribusi pangan terpenuhi berada pada prioritas



Dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan peningkatan pencapaian Indeks Ketahanan Pangan sebagai berikut:

<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Dinas Ketahanan Pangan
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Dinas Pertanian
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Dinas Pertanian
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Dinas Ketahanan Pangan

5) SASARAN 5 MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN GENDER DAN PEMUDA

Untuk mengukur sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan Pangan , diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu 1). Indeks Pemberdayaan Gender dan 2). Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional

Pemberdayaan gender dan pemuda adalah dua elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ketika pemuda diberi ruang untuk berkembang tanpa adanya hambatan berbasis gender, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa inovasi, keadilan, dan kesejahteraan bagi komunitas mereka.

Pemberdayaan gender memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Sementara itu,



pemberdayaan pemuda memberikan mereka akses terhadap sumber daya, keterampilan, serta ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Jika kedua aspek ini berjalan beriringan, mereka dapat menciptakan generasi yang lebih progresif dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Tabel 3. 12 Capaian Indikator Sasaran 5

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	70,23	70,76	100,75%
2.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional	12	9	75,00%
	Rata-rata			87,88 %

Untuk mengukur sasaran Strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan pemuda ” adalah dengan 2 indikator yaitu (1) Indeks Pemberdayaan Gender dan (2) Jumlah Pemuda berprestasi Tingkat Nasional. Rata-rata capaian Capaian indikator sasaran meningkatnya pemberdayaan gender dan pemuda adalah 87,88 dengan kategori “Tinggi”.

a. Indeks Pemberdayaan Gender

Ketidaksetaraan gender masih menjadi isu besar meskipun sudah mengalami perubahan yang signifikan dalam dekade terakhir. Ketidaksetaraan gender ini ditandai dengan adanya ketimpangan relasi/kondisi (perbedaan, akses, partisipasi, kontrol, manfaat pembangunan) bagi laki-laki dan perempuan yang



dipengaruhi oleh budaya dan kebijakan.

Gender dibedakan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada praktiknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat kultur, maupun negara. Oleh sebab itu untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Guna mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat, maka harus dilakukan pemberdayaan gender.

Pemberdayaan gender adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan tujuan antara lain: meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki, meningkatkan kesejahteraan perempuan dan laki-laki, Meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat, meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi.



Tabel 3. 11 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	70,23	70,76	100,75%

Dari Tabel 3.12, Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bima 70,76 dari target kinerja sebesar 70,23. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh Kota Bima sebesar 100, 75 % dengan kategori “Sangat Tinggi”.

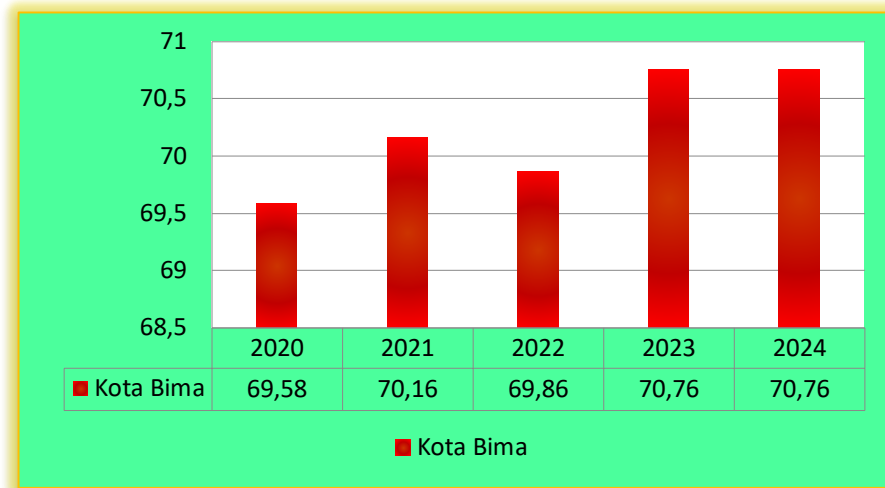
Tabel 3. 12 Perbandingan capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2024 terhadap target akhir RPD

NO .	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	70,23	70,76	100,75%	70,30	100,65%

Capaian Indeks pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024 sebesar 70,76 telah melampaui target akhir Rencana Pembangunan Daerah di Tahun 2026 yaitu 70,30 dengan capaian kinerja sebesar 100,65 % dengan kategori kinerja “sangat tinggi”.



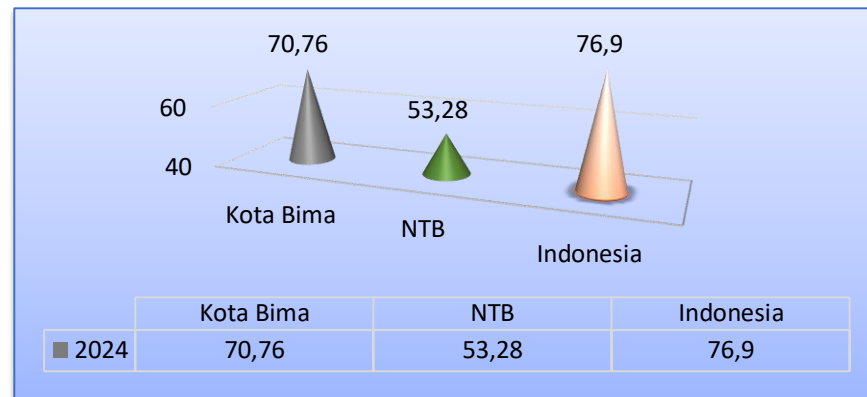
Grafik 3. 10 Indeks Pemberdayaan kota Bima Tahun 2010-2024



Kondisi Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bima meningkat dari tahun ke tahunnya, hal ini tergambar pada Grafik 3.10 Indeks pemberdayaan gender mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali Tahun 2022 dimana IDG mengalami penurunan sebagai dampak adanya Covid-19. Adapun benchmark dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafi 3.10. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bima berada di atas IDG Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 53,28 dan berada dibawah IDG Nasional yaitu sebesar 76,90



Grafik 3. 11 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bima dengan Provinsi dan Pusat Tahun 2024



Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bima sebesar 70,72 berada di atas nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 53,28 tetapi masih dibawah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 76,90.

**Faktor yang mendorong** tercapainya target kinerja indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan daerah terkait upaya peningkatan pemberdayaan perempuan.
2. Adanya pembinaan pada organisasi-organisasi perempuan berkelanjutan di Kota Bima.
3. Adanya Pelatihan Kewirausahaan pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
4. Adanya kerja sama dengan berbagai lintas sector terkait pembinaan dan pelatihan pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
5. Pemberian bantuan berupa peralatan produksi jajanan baik kering maupun basah, alat pengemasan minuman, pengadaan benang, perlengkapan catering, alat penggiling tepung, dan



pengadaan alat boga pada kelompok-kelompok usaha perempuan.

Kualitas pemberdayaan perempuan di Kota Bima selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, meski masih belum menyamai laki-laki. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai dimensi kehidupan, terdapat beberapa **faktor yang menghambat** antara lain:

1. Belum meratanya pemahaman tentang kesetaraan gender dan konsep strategi pengarusutamaan gender di kalangan pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta masyarakat karena budaya patriarki, pola pikir tradisional dan interpretasi agama.
2. Hambatan berpartisipasi secara politis berasal dari perempuan sendiri. Pencitraan perempuan sebagai makhluk lemah, tidak mandiri, kurang tanggung jawab yang sudah meresap di alam bawah sadar, dirasakan oleh perempuan sebagai fitrah, bawaan dan kodrati.
3. Motivasi dari para perempuan untuk terlibat aktif dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga sejahtera maupun dalam berpolitik masih rendah.

Upaya peningkatan kinerja mendatang, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Bima adalah (1) Mendorong setiap Perangkat Daerah (PD) untuk memahami bahwa isu gender sudah menjadi isu bersama dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, (2) Menyelenggarakan Pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan dalam rangka pengaderan caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki (3) Mendorong dimudahkannya pemberian bantuan modal/kredit usaha pada



kelompok-kelompok usaha perempuan hasil kerjasama dengan berbagai lintas sector, terutama dengan pihak perbankan, guna menumbuhkan minat usaha dalam rangka meningkatkan nilai pendapatan bagi perempuan, (4) selain itu diupayakan terbentuknya sekolah perempuan pada masing-masing kelurahan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi kaum perempuan, (5) serta mendorong pemerintah daerah dalam rangka untuk memberikan kesempatan bagi perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan daerah.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaa gender (IDG) adalah sebagai berikut:

<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional

Pemuda menurut peraturan perundang-undangan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Sedangkan menurut International Youth Year pada tahun 1985 bahwa penduduk yang berusia 15-24 tahun dapat dikatakan sebagai kelompok pemuda apabila usianya lebih dari 15 tahun dan kurang dari 30 tahun.



Tabel 3. 13 Capaian Pemuda berprestasi tingkat Nasional

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional	12	9	75,00%

Berdasarkan Tabel 3.14, jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional yang ada di Kota Bima Tahun 2024 adalah sebanyak 9 orang dari target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebesar 12 Orang dengan capaian kinerja sebesar 75 % atau kategori “Tinggi)

Tabel 3. 14 Perbandingan capaian kinerja Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional Tahun 2024 terhadap terget akhir RPD

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional	12	9	75,00%	14,00	64,29%

Dari Tabel 3.15, capaian kinerja untuk indikator Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Pembangun Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 adalah sebesar 64,29 %. Target akhir Rencana Pembangun Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 adalah 14 orang sedangkan untuk Tahun 2024 pemuda yang berprestasi hanya sebesar 9 orang. Untuk melihat *Benchmark* dengan daerah lain dan Nasional tidak memiliki data pendukung.

**Faktor pendukung pencapaian kinerja**, meliputi meningkatnya komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong program peningkatan pengembangan kapasitas dan daya saing keolahragaan, serta pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan. Sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih rendahnya kualitas sarana dan



prasarana keolahragaan secara keseluruhan serta pola pembinaan pemuda belum sepenuhnya masif dilakukan. **Solusi** untuk meningkatkan pembinaan kepemudaan melalui program yang sistematis dan perbaikan sarana dan prasarana.

Program yang mendukung indikator jumlah pemuda yang berprestasi tingkat Nasional yaitu:

<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</b>
---	--

#### 6) SASARAN 6 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI

Untuk mengukur pertumbuhan perekonomian adalah dengan melihat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu



daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi” adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Capaian kinerja Indikator sasaran 6

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,19	4,04	77,84%

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima pada tahun 2024 sebesar 4,04 %. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima sudah bisa mencapai target kinerja RPD Tahun 2024 sebesar 5,19% dengan capaian kinerja 77,84 % dengan kategori “Tinggi). Perolehan tersebut mengalami penurunan sebesar 1,12 % dibanding pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 5,16 % . Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan.



Grafik 3. 12 Grafik pertumbuhan ekonomi Kota Bima Tahun 2018-2024



Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya terutama pada Tahun 2023. Titik terendah perekonomian kota Bima terjadi pada Tahun 2020 mengalami penurunan drastis akibat adanya pandemic Covid 19 dimana pertumbuhan ekonomi menyentuh angka -4,95 %. Namun di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2,08 % dan Tahun 2022 mengalami pertumbuhan kembali dimana menyentuh 2,70 % Serta Tahun 2023 meningkat lagi menjadi 5,16 % namun sedikit menurun pada Tahun 2024

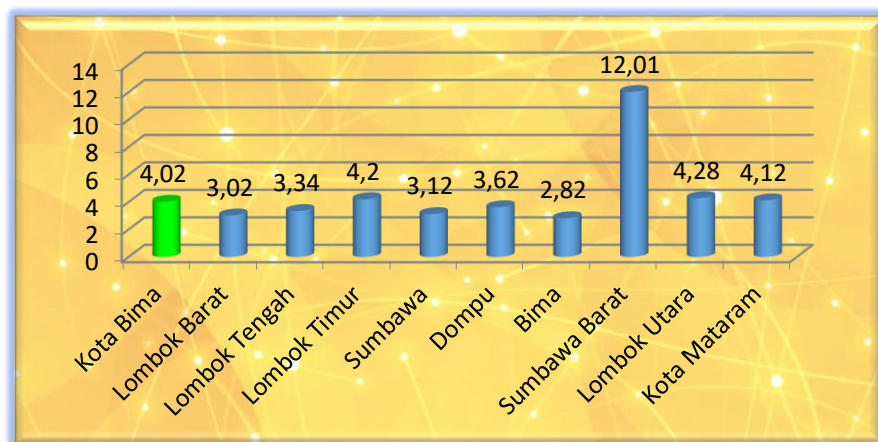


Grafik 3. 13 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kota Bima Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2024



Perbandingan Partumbuhan Ekonomi Kota Bima dengan provinsi Nusa Tenggara Barat dan Indonesia Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Bima menyentuh angka 4,0 dapat dilihat pada grafik 3.13. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada Tahun 2023 masih jauh dibawah capaian ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 1,80 % maupun capaian pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04 %.

Grafik 3. 14 Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se NTB





Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima dengan Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Bima menyentuh angka 4,02 dapat dilihat pada grafik 3.14. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada Tahun 2024 berada dibawah Pertumbuhan ekonomi Sumbawa Barat dengan pertumbuhan 12,01 %, Lombok utara sebesar 4,28 %, Lombok Timur sebesar 4,20, dan kota Mataram dengan sebesar 4,12 %. Namun masih diatas Lombok Barat dengan pertumbuhan ekonomi 3,02 %, Lombok Tengah sebesar 3,34 %, Sumbawa sebesar 3,12 %, Kabupaten Dompu sebesar 3,62 % dan kabupaten Bima sebesar 2,82 %.

Tabel 3. 16 pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024

No	Lapangan Usaha	Nilai (%)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/	1,34
2.	Pertambangan dan Penggalian/	1,30
3.	Industri Pengolahan	3,06
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,90
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,69
6.	Konstruksi	0,84
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,53
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,69
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,38
10.	Informasi dan Komunikasi	5,70
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,40
12.	Real Estate	4,55
13.	Jasa Perusahaan	4,98
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,50
15.	Jasa Pendidikan	2,15
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/	8,16
17.	Jasa Lainnya/	4,58
<b>Produk Domestik Bruto</b>		<b>4,04</b>



Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya kemajuan Kota Bima, terutama sektor perbankan, UMKM, dan jasa. sedangkan hambatan dalam pencapaian kinerja berupa masih belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah, terutama peningkatan kualitas dan promosi hasil olahan lokal sehingga produk unggulan daerah menjadi kalah bersaing dengan produk daerah lain. **Solusi** untuk meningkatkan nilai produk unggulan daerah melalui pembinaan pelaku usaha, peningkatan kualitas produk dan pemasaran yang lebih luas dengan menggunakan teknologi informasi.

Dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan peningkatan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Sekretariat daerah
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Dinas pariwisata dan kebudayaan
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Dinas pariwisata dan kebudayaan
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Dinas pariwisata dan kebudayaan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Dinas pariwisata dan kebudayaan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Dinas pariwisata dan kebudayaan
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Dinas kelautan dan perikanan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Dinas kelautan dan perikanan
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan



PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan

## 7) SASARAN 7 MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA

Untuk mengukur sasaran 3 : Meningkatnya kesempatan kerja, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ketenagakerjaan suatu negara atau daerah. TPT mengacu pada persentase jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Indikator ini menjadi cerminan dari dinamika ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, serta kesiapan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan industri.

Dalam kehidupan sehari-hari, pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan lapangan kerja yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, perubahan teknologi, serta ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri dapat memperburuk tingkat pengangguran. Misalnya, dalam era digital saat ini, banyak pekerjaan tradisional tergantikan oleh otomatisasi, sehingga mereka yang tidak memiliki keterampilan digital lebih sulit mendapatkan pekerjaan.



Tingginya angka pengangguran dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Daya beli masyarakat menurun, angka kemiskinan meningkat, dan stabilitas sosial dapat terganggu akibat meningkatnya kriminalitas. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi pengangguran menjadi prioritas bagi pemerintah, baik melalui penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan program pelatihan kerja, maupun dorongan bagi masyarakat untuk berwirausaha.

Capaian indikator sasaran “ Meningkatkan kesempatan kerja ” adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 17 Capaian Kinerja sasaran 7

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Tingkat pengangguran terbuka	3,55	3,27	107,89%

Pada Tahun tingkat pengangguran terbuka Kota Bima sebesar 3,27 %. Dimana target tingkat pengangguran terbuka sesuai dokumen RPD adalah sebesar 3,55 %, maka Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 107,89%. Capain kinerja indikator ini masuk kategori **Sangat tinggi**. Untuk lebih jelasnya terdapat pada Tabel 3. 19.

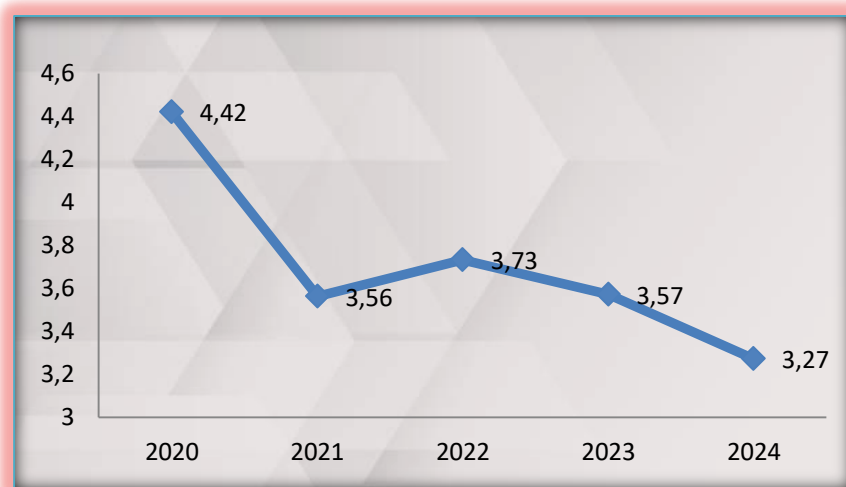
Tabel 3. 18 perbandingan realisasi Kinerja Sasaran indikator 7 terhadap RPD

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tingkat pengangguran terbuka	3,55	3,27	107,89%	3,21	98,13%



Capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target akhir RPD Tahun 2026 dengan target 3,21, maka Tahun 2024 belum tercapai dengan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,27 dengan capaian kinerja terhadap target akhir RPD adalah 98,13% atau dengan kata lain pencapaian kinerja pemerintah Kota Bima untuk sasaran meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 mencapai 98,13 % dari apa yang direncanakan pada akhir Rencana Pembangunan daerah (RPD) periode 2024-2026.

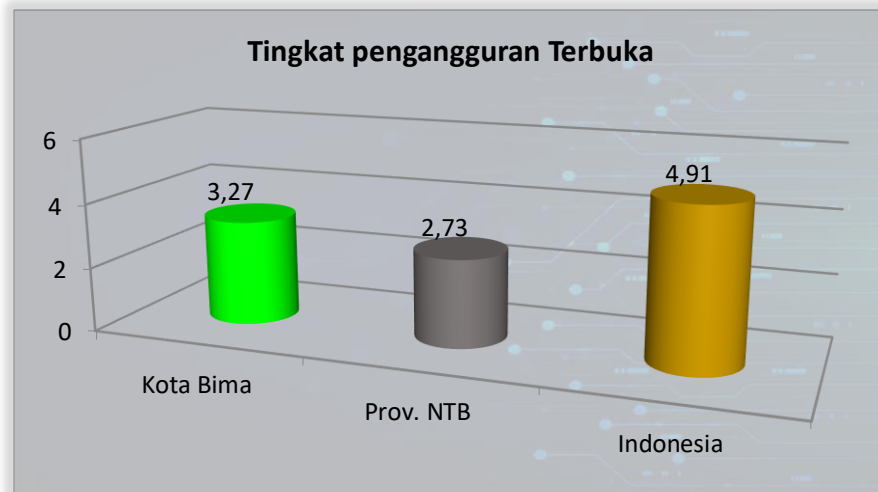
Grafik 3. 15 Tingkat pengangguran terbuka Kota Bima Tahun 2020-2024



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per tahun penduduk Kota Bima mengalami penurunan dari Tahun ke tahunnya. Kecuali pada Tahun 2022 naik dari 3,56 menjadi 3,73., Namun pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan yaitu tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 3,57 dan turun lagi pada Tahun 2024 menjadi 3,27. Hal ini menggambarkan bahwa kesempatan kerja semakin meningkat.

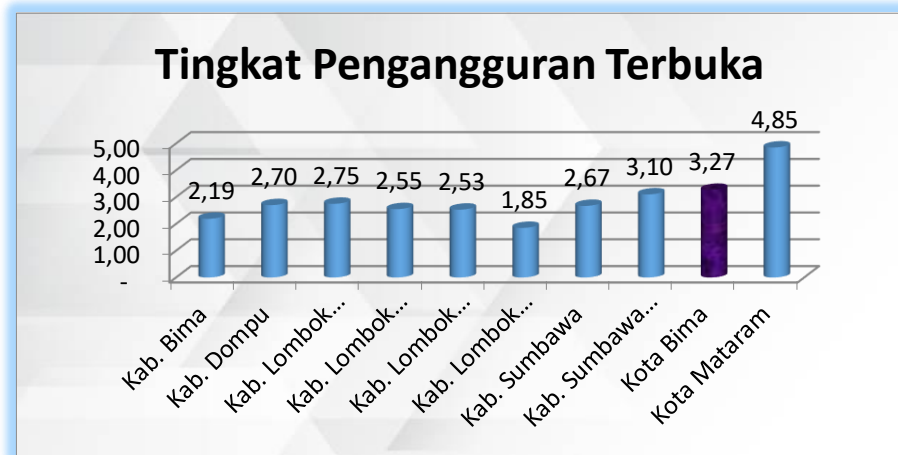


Grafik 3. 16 Tingkat pengangguran terbuka Kota Bima, Prov. NTB dan Indonesia.



Dengan melaksanakan analisa perbandingan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Indonesia, Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di atas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai sebesar 2,73. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bima masih dibawah rata-rata nasional, dimana angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional adalah sebesar 4,91.

Grafik 3. 17 Tingkat Pengangguran terbuka Kab./Kota se Nusa Tenggara Barat



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bima jika dibandingkan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, –Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bima masih diatas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Mataram yaitu sebesar 4,85 namun berada diatas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Faktor pendukung** pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong program perluasan lapangan kerja, membangun kelembagaan dan sarana prasarana ketenagakerjaan, seperti membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK). Sedangkan **hambatan** dalam pencapaian kinerja berupa belum adanya pembangunan BLK yang representatif sehingga menghambat peningkatan ketrampilan masyarakat pencari kerja. **Solusi** untuk meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan kedepannya melalui peningkatan SDM dan sarana prasarana ketenagakerjaan

Dalam meningkatkan kesempatan kerja, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-



masing Perangkat Daerah terkait dengan capaian Sasaran 2 sebagai berikut:

<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Dinas Tenaga Kerja
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Dinas Tenaga Kerja
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Dinas Tenaga Kerja
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Dinas Tenaga Kerja
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Dinas Tenaga Kerja
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Dinas Koperindag

#### 8) SASARAN 8 MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN

Untuk mengukur sasaran 3 : Menurunnya tingkat kemiskinan, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase penduduk miskin.

Penduduk miskin di Indonesia adalah individu atau kelompok yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, penduduk miskin adalah mereka yang tidak memiliki sumber mata pencaharian atau memiliki penghasilan tetapi masih berada di bawah standar kecukupan hidup.

Kemiskinan di Indonesia diukur menggunakan berbagai indikator, termasuk tingkat pengeluaran per kapita, akses terhadap pangan, sandang, perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, serta pekerjaan yang layak. Badan Pusat Statistik (BPS) juga menggunakan pendekatan garis



kemiskinan untuk menentukan siapa yang termasuk kategori miskin, dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok dan non-pokok yang diperlukan untuk hidup layak.

Secara sosial, penduduk miskin sering menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap layanan publik, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program sosial berupaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

Capaian indikator sasaran “ Meningkatkan Tingkat kemiskinan” adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 19 Capaian Kinerja sasaran 8

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Persentase Penduduk miskin	7,94	8,12	97,73%

Angka Kemiskinan di Kota Bima Tahun 2024 sebesar 8,12 %. Persentase kemiskinan di Kota Bima mengalami penurunan sebesar 0,13 % dibanding tahun 2023. Meski demikian Pemerintah Kota Bima tetap mampu mencapai target kinerja RPD sebesar 97,73 % dari target sebesar 7,79 % target yang ditetapkan sebesar 7,94 %.

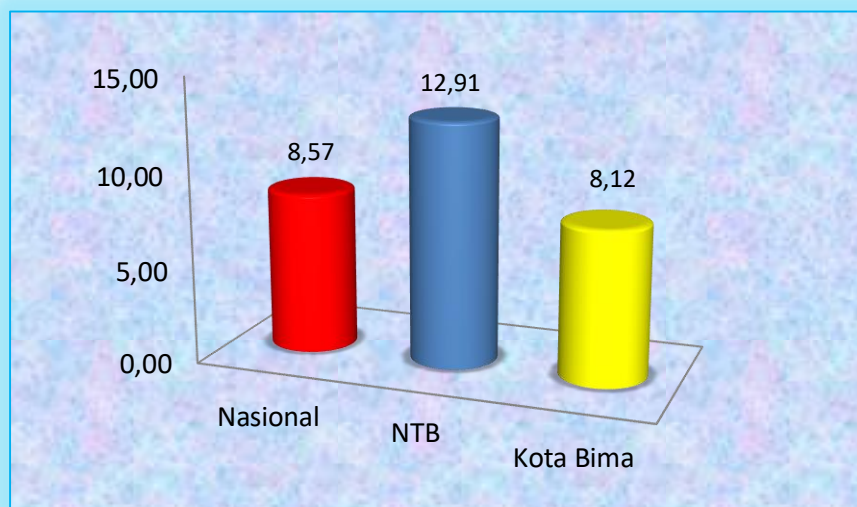


Tabel 3. 20 perbandingan realisasi Kinerja Sasaran indikator 7 terhadap RPD

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Penduduk miskin	7,94	8,12	97,73%	7,17	86,75%

Capaian indikator kinerja persentase penduduk miskin dengan target akhir RPD Tahun 2026 dengan target 7,17, maka Tahun 2024 belum tercapai dengan nilai persentase penduduk miskin sebesar 8,12 dengan capaian kinerja terhadap target akhir RPD adalah 86,75% atau dengan kata lain pencapaian kinerja pemerintah Kota Bima untuk sasaran meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator persentase penduduk miskin pada Tahun 2024 mencapai 86,75% dari apa yang direncanakan pada akhir Rencana Pembangunan daerah (RPD) periode 2024-2026.

Grafik 3. 18 Perbandingan penduduk miskin Kota Bima, Prov. NTB dan Indonesia





Penduduk miskin Kota Bima Tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan penduduk miskin seluruh Indonesia dimana Penduduk miskin secara nasional berada pada angka 8,57% atau sebesar 25.219.200 orang miskin dari seluruh total penduduk Indonesia. Penduduk miskin yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat 709.100 orang dari total penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat 5.731.100 orang atau sekitar 12,91 % sedangkan penduduk Kota Bima yang masuk kategori miskin sebesar 15.813 orang dari total sebanyak 163.604 orang

Grafik 3. 19 Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se provinsi NTB

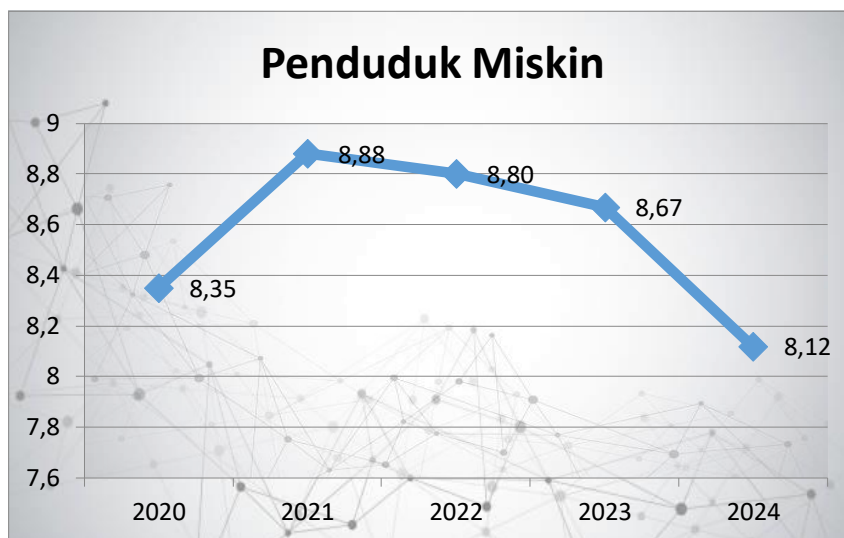


Saat ini persentase penduduk miskin Kota Bima merupakan yang terendah kedua setelah Kota Mataram jika dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Penduduk miskin Kota Mataram berada pada angka 8,00 %. Kemiskinan Kota Bima berada di atas 8 (delapan) Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana kemiskinan Kabupaten Lombok Utara sebesar 23,96 %, Lombok Barat sebesar 12,65 %, Lombok Tengah sebesar 12,07 %, Lombok Timur sebesar 14,51 %, Sumbawa 12,87 %, Dompu sebesar 11,59 %, dan Sumbawa Barat sebesar 12,20 %.



Selanjutnya apabila dilakukan perbandingan persentase penduduk miskin beberapa tahun sebelumnya, maka persentase penduduk miskin di Kota Bima sedikit mengalami penurunan pada tahun 2024, data perbandingan tersebut terlihat pada grafik 3.13 berikut ini.

Grafik 3. 20 Persentase penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2020-2024



**Faktor pendukung pencapaian kinerja**, meliputi meningkatnya komitmen Kepala Daerah untuk melaksanakan program penanganan kemiskinan yang terintegrasi, baik perencanaan dan pelaksanaannya, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih lemah aspek koordinasi dalam pendataan dan verifikasi data kemiskinan di daerah sehingga menghambat pelayanan. **Solusi** untuk meningkatkan kualitas data yang valid diperlukan penyamaan persepsi antara Pemerintah Kota Bima dengan seluruh pihak yang terlibat (*stakeholders*) dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dalam menurunkan tingkat kemiskinan, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan



oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan peningkatan pencapaian indikator persentase penurunan kemiskinan sebagai berikut:

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Dinas Sosial</b>
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Dinas Sosial
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Dinas Sosial
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Dinas Sosial
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan

9) SASARAN 9 MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Pada Tahun 2023, Kementerian PANRB menerbitkan kebijakan baru untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional serta untuk memastikan dampak reformasi birokrasi dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Fokus kebijakan yang diambil pun diperkuat dengan tidak hanya berfokus pada reformasi birokrasi di tingkat hulu, tetapi juga pada tingkat hilir atau disebut “double track”. Reformasi tingkat hulu adalah reformasi tata kelola pemerintahan secara umum, sedangkan reformasi tingkat hilir adalah reformasi tata kelola pelaksanaan program pembangunan nasional. Pada Road Map terbaru ini, Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2023 menetapkan tema pengentasan kemiskinan sebagai fokus reformasi birokrasi



tingkat hilir sedangkan pada Tahun 2024 pemerintah Kota Bima menetapkan 5 Tema untuk RB Tematik yaitu Pengentasan Kemiskinan, Pengendalian inflasi, Digitalisasi penyelenggaraan pemerintah fokus.

Sasaran Meningkatnya Tata kelola Pemerintah yang Baik di ukur keberhasilannya dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

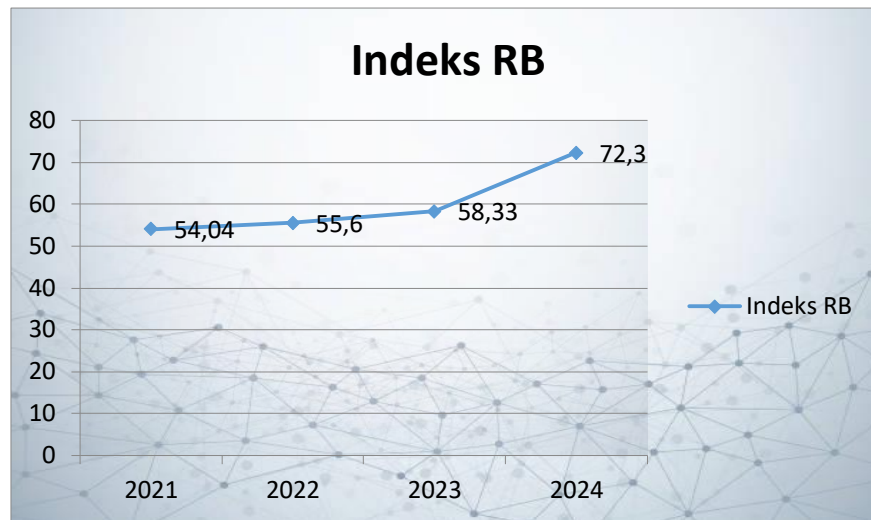
Tabel 3. 21 Capaian Indikator Sasaran 1

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	60,18	72,3	120,14%

Pada Tahun 2024 pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik dengan indikator untuk Indeks Reformasi Birokrasi adalah 120 % dengan kategori pencapaian kinerja “Sangat Tinggi. Capaian ini didapatkan dari realisasi indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 72,3 dengan kategori “BB” dari target kinerja Tahun 2024 sebesar 60,18.



Grafik 3. 21 Indeks reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024



Kondisi pencapaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bima setiap tahunnya tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kecenderungan Indeks Reformasi Kota Bima dari tahun 2021 hingga 2024 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi terutama pada Tahun 2024 setelah pengimplementasian Reformasi Birokrasi tematik secara keseluruhan. Pada Tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bima berada pada kategori “CC” dengan Nilai 58,33 dan meningkat drastis pada Tahun 2024 dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73,30 dengan Kategori “.BB” dengan nilai peningkatan indeks sebesar 13,97 poin.

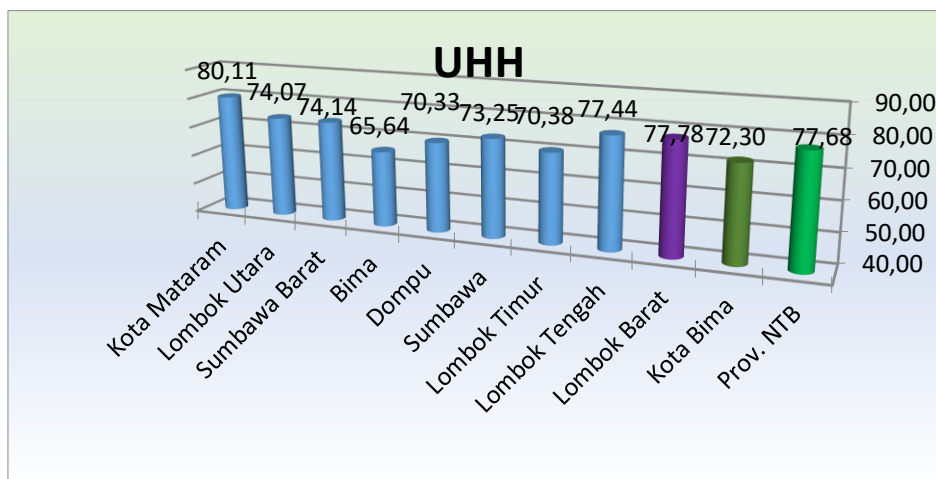
Tabel 3. 22 Tabel Perbandingan Realisasi UHH Tahun 2024 terhadap target RPD

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	60,14	72,30	120,22%	65,05	111,15%



Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bima Tahun 2024 dibandingkan terhadap target Akhir RPD pada Tahun 2026 adalah sebesar 111,15 % dimana target Indeks reformasi Birokrasi dalam dokumen RPD pada Tahun 2026 adalah 65,05 sedangkan realisasi Indeks reformasi Birokrasi Kota Bima pada Tahun 2024 adalah 72,30. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9 telah melebihi target akhir RPD.

Grafik 3. 22 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bima dengan Kabupaten dan Kota di NTB serta Provinsi NTB



Indeks reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada Kategori “B” kecuali Kota Mataram dengan kategori “A” dan Kabupaten Bima dengan kategori “N”. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bima dengan angka 72,30 masih diatas Umur Harapan Hidup Provinsi 3 Kabupaten di Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Bima dengan Nilai RB sebesar 65,64, Kabupaten Dompu sebesar 70,33 dan Lombok Timur sebesar 70,38. dengan angka Umur harapan Hidup 73,10. Namun masih berada di bawah Indeks Reformasi Birokrasi provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai 77,68 dengan



kategori “BB” dan 6 kabupaten/Kota lain. Pencapaian tertinggi diraih oleh Kota Mataram dengan Nilai RB 80,11 dengan Kategori “A”

Dalam meningkatkan Tata kelola Pemerintah yang baik, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan capaian Sasaran 9 sebagai berikut:

**Faktor pendukung pencapaian kinerja**, meliputi meningkatnya komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong program peningkatan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong pengimplementasian Reformasi tematik . Sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih kurangnya koordinasi dan komunikasi guna pencapaian kinerja utama Reformasi Birokrasi antar Perangkat Daerah terutama dalam penyusunan Rencana Aksi dan dukungan anggaran. **Solusi** untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik di masa yang akan datang melalui penguatan Tim Reformasi Birokrasi, Memaksimalkan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi kedepannya dengan koordinasi yang lebih optimal

Dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan peningkatan pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut:.



## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### PEMERINTAH KOTA BIMA

TAHUN 2023

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	ISPEKTORAT
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	ISPEKTORAT
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BRIDA
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



10) SASARAN 10 MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Untuk mengukur sasaran 10 : meningkatnya kualitas lingkungan hidup, diukur dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH juga merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan secara nasional yang menjadi acuan di Provinsi dan Kota Bima. IKLH ditetapkan menjadi salah satu indikator sasaran Pemerintah dalam RPJPD dan RPJMD atau sebagai bahan perencanaan, Implementasi dan evaluasi kebijakan dan Arah Pembangunan. Prosentase ketercapaian IKLH tersebut digunakan sebagai salah satu Sasaran DLH Kota Bima. IKLH terdiri dari 3 indikator, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKA dihitung dari 8 parameter kualitas air sungai, sedangkan IKU merupakan representasi dari kualitas udara ambient yang mewakili 4 wilayah, dan IKTL diperoleh dari perhitungan luas tutupan lahan dengan menggunakan citra satelit dan data numerik.



Indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Bima pada tahun 2024 sebesar 60,25 dengan kategori sangat kurang. Berdasarkan perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima pada tahun 2023 belum mampu mencapai kinerja sebesar 97,44 % dari target RPD. Untuk rincian analisis capaian kinerja sasaran 10.

Grafik 3. 23 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 10

Sasaran 12	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	61,83	60,25	97,44

Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 adalah 88,38 % dengan kategori “Tinggi”. Dimana capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah 60,25 sedangkan target akhir RPD Tahun 2026 adalah 88,38 %.

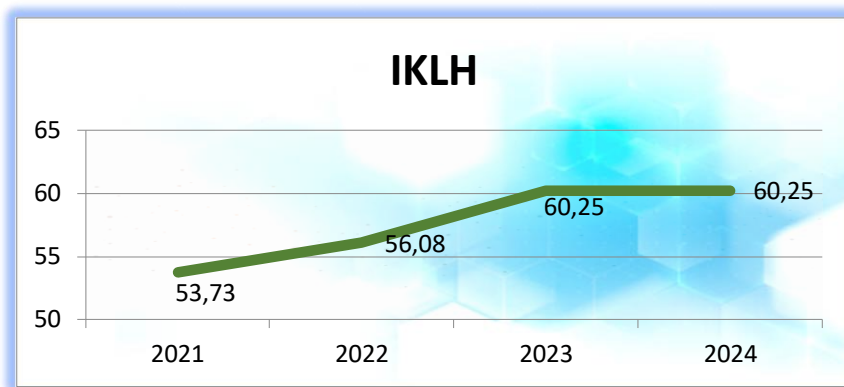
Grafik 3. 24 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024 dengan target akhir RPD Tahun 2026

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	61,83	60,25	97,44%	68,17	88,38%



Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 sampai dengan 2024 memiliki kecenderungan kenaikan kecuali pada Tahun 2024. Nilai IKLH Kota Bima pada tahun 2024 tidak mengalami kenaikan dengan nilai indeks 60,25 sebagaimana terlihat grafik berikut.

Grafik 3. 25 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020-2024



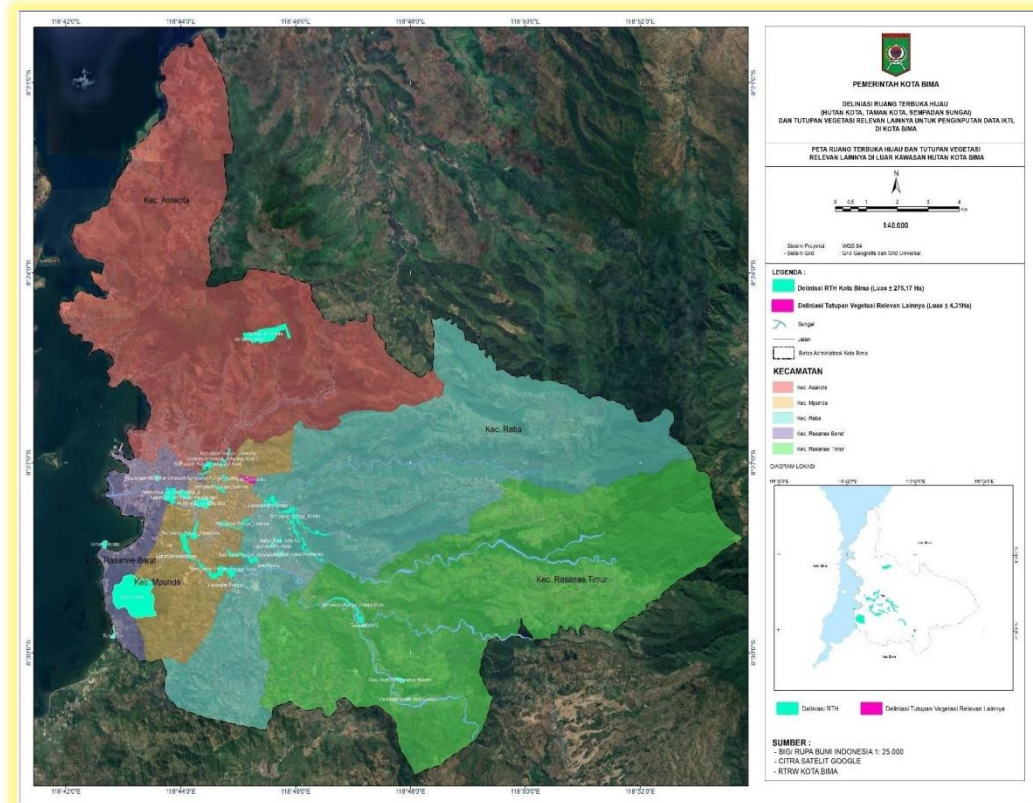
Adapun nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator komponen penyusunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Indeks IKLH Kota Bima

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Kualitas Air	38,24	37,60%	14,37647
2	Indeks Kualitas Udara	86,28	40,50%	34,9434
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,91	21,90%	10,93029
	<b>IKLH KOTA BIMA</b>		100,00%	<b>60,25016</b>

Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai IKLH Kota Bima adalah **60,25**.

Grafik 3. 26 Peta Deliniasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bima



**Faktor pendukung** pencapaian sasaran 12 yaitu adanya Program pada Dinas Lingkungan Hidup, **Faktor penghambat** bahwa adanya air limbah permukiman masih belum optimal. **Solusinya** diperlukan program pendampingan penanganan sampah skala lingkungan.

Dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan peningkatan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2023**

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan

11) SASARAN 11 MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH

Sasaran 13 yaitu “meningkatnya kualitas infrastruktur daerah” YANG keberhasilannya diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur daerah. Indeks infrastruktur daerah adalah komponen indeks pembangunan daerah yang menilai kinerja suatu kota atau kabupaten. Indeks ini didasarkan pada persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas dasar. Infrastruktur daerah



mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, serta mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya pertumbuhan Kualitas Infrastruktur” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Capaian kinerja Indikator sasaran 6

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Infrastruktur	79,04	83,3	105,39%

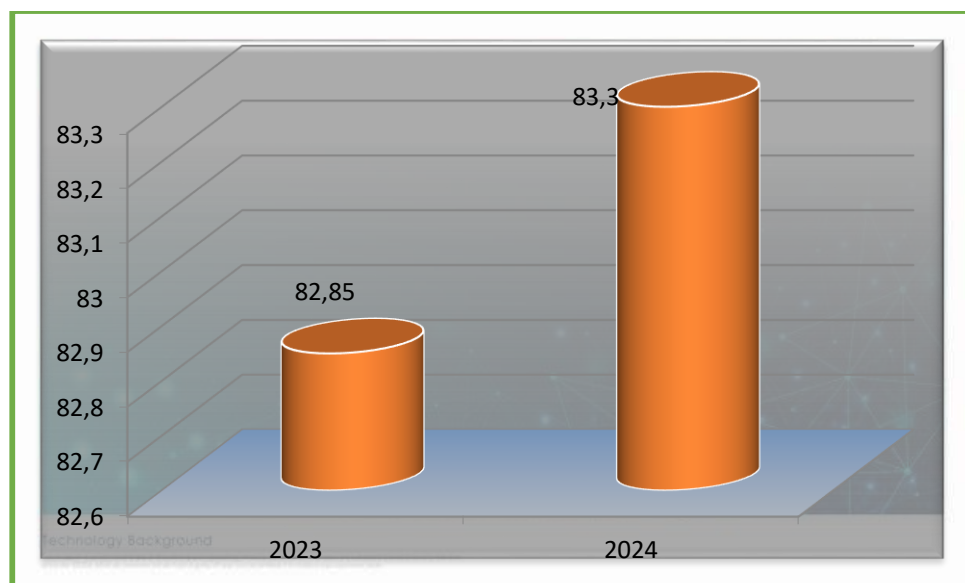
Realisasi kinerja untuk indikator Indeks Infrastruktur Kota Bima Tahun 2024 sebesar 83,3 dari target Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 sebesar 79,04. Dari realisasi kinerja tersebut, Pemerintah Kota memperoleh Capaian Kinerja sebesar 105,39 % dengan kategori “sangat tinggi. Untuk rincian analisis capaian kinerja sasaran 13 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3. 27 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Infrastruktur Daerah dengan target akhir RPD

NO .	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	79,04	83,30	105,39%	80,63	103,31%

Realisasi kinerja untuk indikator Indeks Infrastruktur Kota Bima Tahun 2024 sebesar 83,3 jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada Tahun 2026 sebesar 80,63, maka Capaian kinerja terhadap target RPJMD adalah 103,31 % dengan kategori sangat tinggi atau telah melampaui target RPD.

Grafik 3. 28 Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2023 dan 2024



Dari Tabel diatas, Indeks Infrastruktur Kota Bima mengalami peningkatan sebesar 0,54 % pada dari Tahun 2023 dengan nilai indeks sebesar 82,85 menjadi 83,3 pada Tahun 2024. Untuk analisis *benchmark* dengan Daerah lain, provinsi NTB dan Nasional tidak bisa dilakukan karena data tidak tersedia.

Faktor **pendukung** pencapaian sasaran 11 yaitu adanya Program-program yang mendukung dalam peningkatan infrastruktur. Faktor penghambat bahwa bencana yang mengganggu infrastruktur daerah di Kota Bima terutama banjir yang terjadi dengan curah hujan yang tinggi. Solusinya diperlukan upaya terintegrasi penanganan bencana dan peningkatan kualitas infrastruktur di Kota Bima.



Dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan peningkatan pencapaian Indeks Infrastruktur Daerah sebagai berikut:

<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Dinas Perhubungan
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	Dinas Perhubungan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

- 12) SASARAN 12 MENINGKATNYA KAPASITAS DAERAH TERHADAP BENCANA, ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM, DAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Untuk mengukur sasaran 12 : Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Pembangunan Rendah Karbon, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu indeks ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.



Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan diimplementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya.

Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Capain Indikator Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Pembangunan Rendah Karbon” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Tabel 3. 12 Capaian Indikator Sasaran 5

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks ketahanan daerah	0,75	0,60	80,00%

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi kinerja indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah tahun 2024 sebesar 0,60 dari target 0,75, yang berarti capaian kinerja Kota Bima tahun 2024 hanya sebesar 80 %, kurang

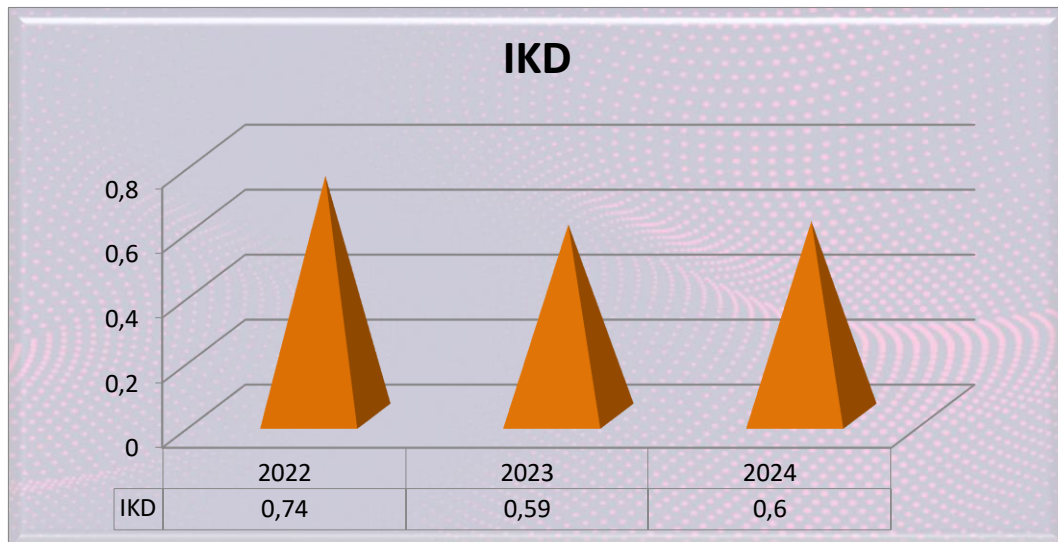


tercapainya target sasaran ini disebabkan pada prioritas ke 2 penilaian IKD yaitu Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, salah satunya adalah belum terpenuhi dokumen rencana penanggulangan bencana sebagai dasar peningkatan koordinasi antar sektoral dalam penanggulangan bencana dan masih kurangnya penggunaan data kajian risiko bencana dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 mengalami perubahan atau kenaikan dari hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesiapsiagaan Kota Bima dalam menghadapi ancaman bencana, baik dari sisi regulasi terkait kebencanaan, kesiapan lembaga kebencanaan, kemampuan personil, alat pendukung, dan anggaran, serta peran serta BUMN, swasta, relawan kebencanaan dan masyarakat.

Realisasi kinerja untuk indikator Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima Tahun 2024 sebesar 0,6, dari target kinerja 0,75. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 80 % dari target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau dengan kategori “Tinggi” akan tetapi belum mencapai target RPD.

Grafik 3. 29 Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima Tahun 2022-2024



Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima mengalami penurunan dalam 3 (tiga) Tahun terakhir. Jika dibanding tahun 2022, maka Indeks ketahanan daerah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,15 poin, sedangkan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,01 poin atau sebesar 1,69 %.

Grafik 3. 30 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan target Akhir RPD

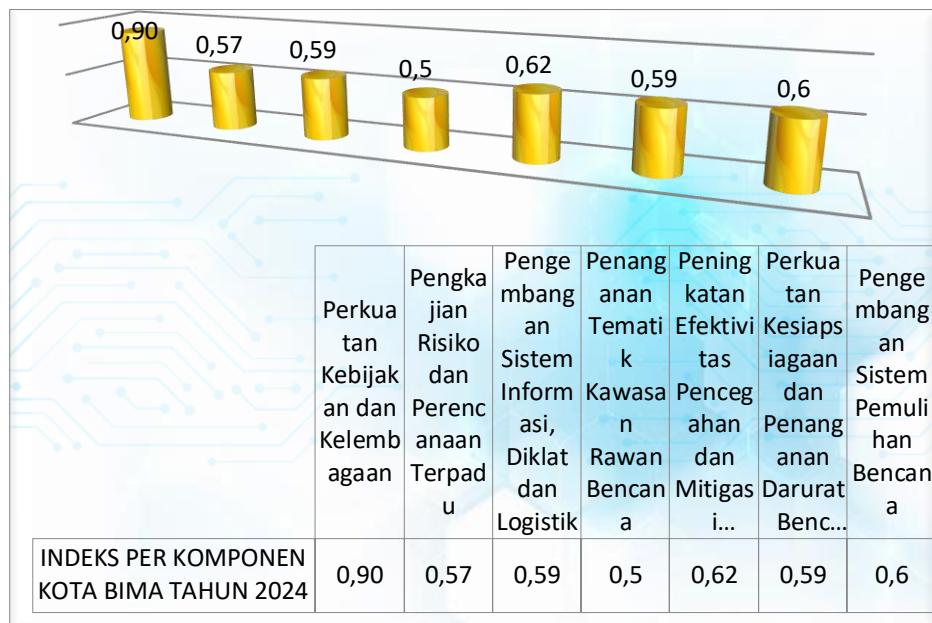
NO .	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks ketahanan daerah	0,75	0,60	80,00%	0,81	74,07%

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Bima Tahun 2024 adalah sebesar 0,60 atau kategori sedang dibandingkan dengan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026 sebesar 0,81, memiliki capaian kinerja sebesar 74,07 artinya



capaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) baru 74,07 % dari target akhir Rencana Pembangunan Daerah. Adapun indeks perkomponen Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah sebagai berikut:

Grafik 3. 31 indeks perkomponen Indeks Ketahanan Daerah (IKD)



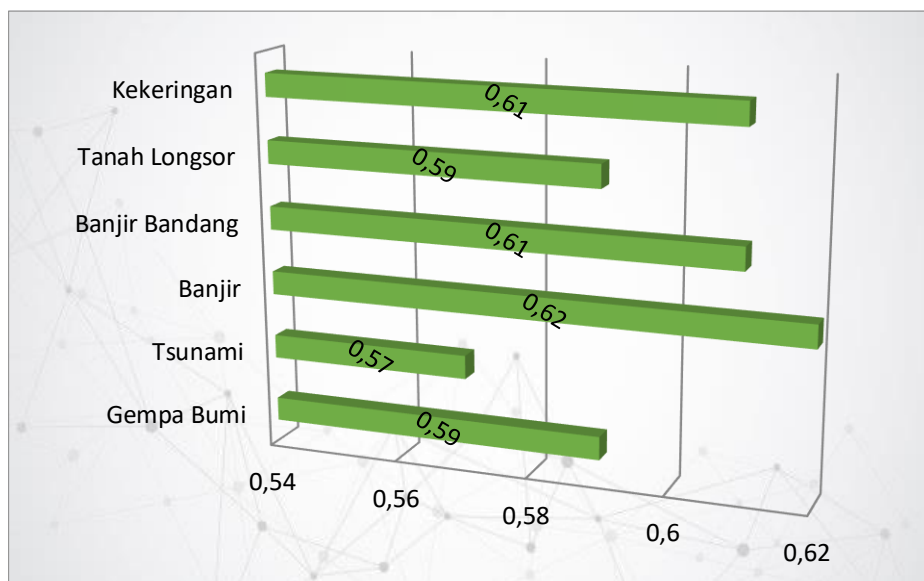
Untuk melihat kesiapan daerah dalam menghadapi bencana per jenis bencana dan perbandingan indeks ketahanan daerah spesifik tahun 2023 dengan indeks ketahanan daerah spesifik tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3. 32 Indeks Ketahanan Daerah Spesifik Per Bencana Kota Bima Tahun 2023



Grafik 3. 33 Indeks Ketahanan Daerah Spesifik Per Bencana Kota Bima Tahun



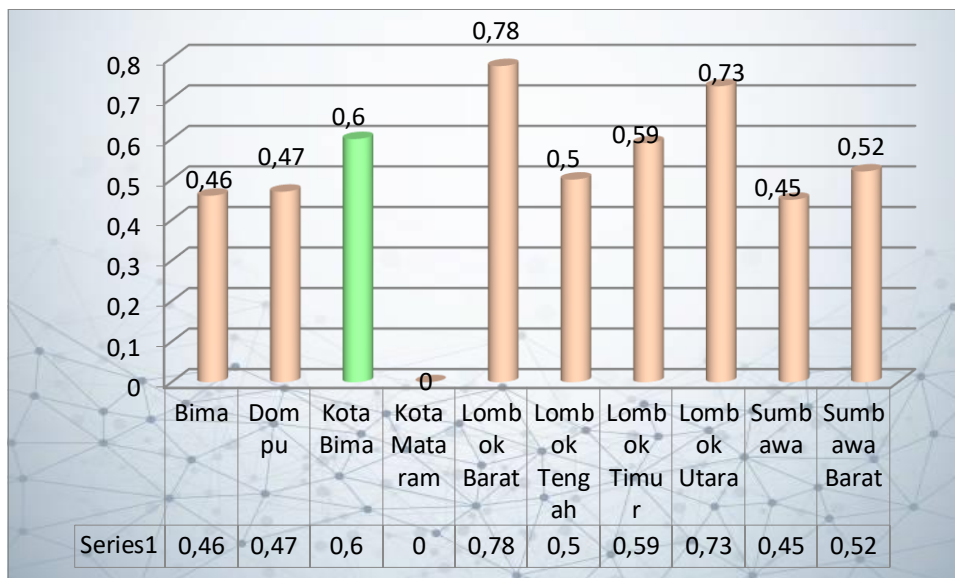


Dari ke dua tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 Indeks Ketahanan Daerah spesifik per bencana lebih rendah dibandingkan Indeks Ketahanan Daerah spesifik per bencana Kota Bima tahun 2024, baik bencana Kekeringan, tanah longsor, Banjir bandang, Banjir, Tsunami, dan Gempa Bumi pada tahun 2024 semua mengalami kenaikan rata – rata 0,01. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketahanan daerah untuk semua bencana prioritas Kota Bima semakin bagus, meskipun kenaikan indeksnya masih rendah.

Sementara Nilai indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana Banjir lebih tinggi dari Nilai Ketahanan Daerah terhadap Bencana Kekeringan, Banjir bandang, tanah longsor, Tsunami dan Gempa bumi. Ini menandakan bahwa Jika Kota Bima dilanda Bencana Banjir maka Kota Bima memiliki daya tahan atau daya lenting lebih cepat jika terjadi Bencana Kekeringan, Banjir bandang, tanah longsor, Tsunami maupun Gempa bumi dengan asumsi bahwa faktor kerentanannya tetap.

Jika di bandingkan dengan kabupaten/Kota lain di Nusa Tenggara Barat, Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima masih tergolong tinggi, berikut disajikan Nilai Indeks Ketahanan Daerah kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Grafik 3. 34 perbandingan IKD Kabupaten/Kota se NTB



Berdasarkan Grafik di atas capaian Nilai IKD tertinggi adalah Kabupaten Lombok Barat yaitu sebesar 0,78 disusul kabupaten Lombok Utara sebesar 0,73, kemudian Kota Bima sebesar 0,60, sehingga Nilai IKD Kota Bima berada pada Nilai tertinggi ke 3 jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya di provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Faktor-faktor pendukung** pencapaian sasaran 15 yaitu adanya PUSDALOPS yang telah terintegrasi dengan pusat, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum optimalnya pencegahan dan mitigasi bencana maupun kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana termasuk komponen Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, salah satunya adalah belum terpenuhi dokumen rencana penanggulangan bencana sebagai dasar peningkatan koordinasi antar sektoral dalam penanggulangan bencana dan masih kurangnya penggunaan data kajian risiko bencana dalam



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2023**

pelaksanaan pembangunan daerah. **Solusi** untuk kedepannya berusaha meningkatkan program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan peningkatan pencapaian Indeks Ketahanan Daerah sebagai berikut:

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENANGGULANGAN, BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Pertanian
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan



13) SASARAN 13 MENINGKATNYA KEAMANAN,  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Untuk mengukur sasaran 15 : meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu indeks rasa aman Indeks Rasa Aman (IRA) adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat keamanan dan ketertiban dalam suatu wilayah berdasarkan persepsi masyarakat serta data objektif mengenai kejadian kriminalitas, bencana, dan faktor keamanan lainnya. Indeks ini mencerminkan sejauh mana individu merasa aman dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat umum, maupun dalam interaksi sosial.

Indeks ini dikembangkan dengan tujuan untuk (1) mengukur tingkat keamanan masyarakat berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka terhadap ancaman kejahatan, bencana, serta ketertiban sosial, (2) menjadi acuan bagi pemerintah dan aparat keamanan dalam merancang kebijakan serta program peningkatan keamanan, (3) Memonitor tren keamanan dari waktu ke waktu guna mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih dalam aspek keamanan.

Indeks Rasa Aman biasanya dihitung berdasarkan data konflik masyarakat, dikombinasikan dengan data statistik kriminalitas, ketertiban umum, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih aman, sedangkan nilai yang rendah menandakan adanya ancaman yang dirasakan lebih besar.



Indeks ini sering digunakan dalam berbagai penelitian dan kebijakan publik, terutama di bidang keamanan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan daerah.

Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Capaian Indikator Sasaran 5

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks rasa aman	88,48	97,60	110,31%

Pada Tahun 2024 telah Indeks Rasa Aman Kota Bima dimana target sesuai dengan Perjanjian Kinerja Walikota Tahun 2024 sebesar 88,48. Adapun realisasi Indeks Rasa Aman (IRA) sebesar 97,60 dengan capaian kinerja sebesar 110,31 % dengan kategori “sangat Tinggi”.

Tabel 3. 27 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan target Akhir RPD

NO .	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks rasa aman	88,48	97,60	110,31%	89,37	109,21%

Capaian indikator Indeks Rasa Aman Kota Bima dibandingkan terhadap target Akhir RPD pada Tahun 2026 adalah sebesar 110,31 % dimana target RPD pada Tahun 2026 adalah 89,37 sedangkan Indeks Rasa Aman Kota Bima pada



Tahun 2024 adalah 97,60. Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 13 dengan indikator Indeks Rasa Aman telah melebihi target akhir RPD.

Untuk analisis benchmark dengan daerah lain, provinsi NTB serta nasional tidak bisa dilakukan karena data tidak tersedia.

**Faktor-faktor pendukung** pencapaian sasaran 13 yaitu adanya intervensi program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan terbentuknya forum-forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Konflik Sosial (FPK) yang ikut mendukung penurunan angka kriminalitas dan konflik sosial di Kota Bima, Dinas Pemadam kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum optimal nya pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan tindakan Kriminal. **Solusi** untuk ke depannya berusaha meningkatkan program pencegahan kriminalitas dan konflik social.

Dalam meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan capaian Sasaran 1 sebagai berikut:

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Polisi pamong praja
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2023**

<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

C. Realisasi Anggaran

Pada aspek anggaran, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai 13 sasaran strategis pada tahun 2024 telah cukup baik, sebagaimana terlihat pada infografis berikut.

Tabel 3. 28 Realisasi Keuangan Kota Bima Tahu 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	98.202.493.707	90.729.676.618	92,39%
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks SPM Pendidikan	64.197.450.000	61.157.698.499	95,26%
3.	Meningkatnya standar hidup masyarakat	PDRB perkapita harga berlaku	4.796.792.216	4.597.544.974	95,85%
4.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	4.897.606.994	4.617.945.109	94,29%



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2023**

5.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemuda	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	15.799.387.550	15.139.674.876	95,82%
		Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional	2.836.941.800	2.813.476.498	99,17%
6.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	11.792.094.450	11.257.130.735	95,46%
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	1.170.351.300	1.069.067.643	91,35%
8.	Menurunnya Tingkat kemiskinan	Persentase Penduduk miskin	3.744.674.702	3.492.558.250	93,27%
9.	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	49.899.095.885	45.508.145.502	91,20%
10.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Indeks kualitas lingkungan hidup	18.091.917.436	16.168.615.741	89,37%
11.	Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	70.232.907.008	66.161.054.393	94,20%
12.	Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks ketahanan daerah	31.660.678.006	28.918.362.060	91,34%
13.	Meningkatnya Keamanan dan ketertiban	Indeks rasa aman	30.628.980.542	29.775.313.153	97,21%
<b>Total</b>			<b>407.951.371.596</b>	<b>381.406.264.051</b>	<b>97,21%</b>



Dari infografis di atas, diketahui bahwa dari total anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan 13 sasaran strategis yaitu sebanyak Rp 407,95 Milyar, telah direalisasikan sebesar Rp 381,40 Milyar atau sebesar 92,33%. Persentase realisasi anggaran dalam mewujudkan sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Walikota Tahun 2024 justru lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran serupa pada tahun 2023. Pada tahun lalu, persentase realisasi anggaran terkait Perjanjian Kinerja Walikota Bima adalah sebesar 92,33%.

- **EFISIENSI ANGGARAN**

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

1. Efisiensi

Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut. Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i. Formulasi yang telah disesuaikan untuk mengukur efisiensi pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} (x 100 \%)$$



Ket:

- E : Efisiensi  
PAKi : Pagu Anggaran untuk Kinerja  
RAKi : Realisasi Anggaran untuk Kinerja  
CKi : Capaian Kinerja

## 2. Nilai Efisiensi

Nilai efisiensi merupakan efisiensi kinerja yang diubah menjadi skala 0%-100%. Dalam mengubah efisiensi ke nilai efisiensi, ditetapkan asumsi bahwa efisiensi kinerja terendah adalah -20% dan tertinggi 20%. Jadi efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Untuk menghitung angka di antara -20% hingga 20%, digunakan formulasi berikut.

$$NE = 50 \% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Di mana:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi Kinerja

Perincian pemanfaatan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Bima untuk mencapai kinerja yang ditargetkan beserta nilai efisiensinya tiap kinerja adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No	Indikator Sasaran	Capain Kinerja (CAK)	Pagu anggaran (PAK)	Realisasi anggaran (RAK)	Nilai Efisiensi (NE)	Ket
1	2	3	4	5	7	8
1.	Umur Harapan Hidup	100,01%	98.202.493.707	90.729.676.618	69,06	<b>Efisien</b>
2.	Indeks SPM Pendidikan	139,17%	64.197.450.000	61.157.698.499	128,87	<b>Efisien</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2023**

3.	PDRB perkapita harga berlaku	137,41%	4.796.792.216	4.597.544.974	125,62	<b>Efisien</b>
4.	Indeks Ketahanan Pangan	104,76 %	4.897.606.994	4.617.945.109	74,98	<b>Efisien</b>
5.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	100,75 %	15.799.387.550,00	15.139.674.876,00	62,23	<b>Efisien</b>
	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional	75,00%	2.836.941.800,00	2.813.476.498,00	-30,58	Tidak Efisien
6.	Pertumbuhan Ekonomi	77,84%	11.792.094.450	11.257.130.735	-6,59	Tidak Efisien
7.	Tingkat pengangguran terbuka	107,89 %	1.170.351.300	1.069.067.643	88,33	<b>Efisien</b>
8.	Persentase Penduduk miskin	97,73%	3.744.674.702	3.492.558.250	61,42	<b>Efisien</b>
9.	Indeks Reformasi Birokrasi	120,14%	49.899.095.885	45.508.145.502	110,22	<b>Efisien</b>
10.	Indeks kualitas lingkungan hidup	97,44%	18.091.917.436	16.168.615.741	70,72	<b>Efisien</b>
11.	Indeks Infrastruktur	105,39 %	70.232.907.008	66.161.054.393	76,54	<b>Efisien</b>
12.	Indeks ketahanan daerah	80,00%	31.660.678.006	28.918.362.060	14,57	<b>Efisien</b>
13.	Indeks rasa aman	110,31%	30.628.980.542	29.775.313.153	79,68	<b>Efisien</b>
<b>Rata-rata</b>					<b>66,08</b>	<b>Efisien</b>

Dari tabel efisiensi di atas, maka nilai efisiensi yang dilakukan Pemerintah Kota Bima adalah sebesar 66,08 %. Artinya, secara umum Pemerintah Kota Bima mampu mencapai kinerja dengan menggunakan **sumber daya secara efisien (cost-effective)**. Akan tetapi ada 2 (du) Indikator kinerja yang tidak efisien yaitu 1). jumlah pemuda berprestasi dengan nilai efisiensi sebesar -30,58 %. Hal ini disebabkan oleh capaian realisasi keuangan sebesar 99,17% lebih tinggi dari



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2023**

capaian kinerja sebesar 75 %. 2). indikator kinerja pertumbuhan ekonomi juga tidak efisien karena capaian realisasi keuangan sebesar 95,46% lebih tinggi dari capaian kinerja sebesar 77,84%



**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN**  
**TUGAS PEMBANTUAN**

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan digunakan oleh Gubernur/Walikota/Bupati untuk membiayai kegiatan fisik dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan, Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan meliputi:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.



Pemberian anggaran Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaspembantuankan merupakan urusan pemerintahan diluar enam urusan yang bersifat mutlak, berdasarkan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah yaitu politik luar negeri, pertahanan, kewanitaan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Pemerintah Kota Bima mendapatkan dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi kegiatan.

- 1) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Pertenakan :
  - a. Kegiatan Bantuan Combine Harvester Besar.
  - b. Kegiatan Bantuan Benih Jagung.
  - c. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tresier (RJIT).
  - d. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian.
  
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Selama tahun 2024 Pemerintah Kota Bima melaksanakan tugas pembantuan di 1 (Satu) OPD, yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Pertenakan. Jumlah anggaran tugas pembantuan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2024 meliputi Tugas Pembantuan Pusat yaitu sebesar Rp. 5.972.400.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp.5.972.400.000,00,- atau sekitar 100%, sedangkan Tugas Pembantuan Propinsi yaitu sebesar Rp. 1.297.200.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp.1.071.600.000,00,- atau sekitar 83%..



3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang di tugaskan kepada daerah kabupaten/kota

3.1.1. Target Kinerja

Program dan kegiatan Dana Tugas Pembantuan Pusat Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Program Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BT) untuk Komoditas Padi Hibrida merupakan kegiatan prioritas Kementerian Pertanian sebagai upaya untuk kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat petani dengan Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat melalui pekarangan pangan lestari (P2L), Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat Tahun 2024 di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perternakan Kota Bima meliputi beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Bantuan Combine Harvester Besar untuk Gapoktan Maronci Kelurahan Dodu dan Kelompok Tani SO Tolo Woro Kelurahan Kodo dengan jumlah anggaran masing-masing Rp. 430.000.000,00 ditargetkan penyerapan anggaran mencapai 100%.
- b. Bantuan benih padi untuk kelompok tani di Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Raba dan Kecamatan Asakota dengan anggaran



- Rp.4.500.000.000,00 ditargetkan penyerapan anggaran mencapai 100%.
- c. Bantuan benih jagung untuk kelompok tani di Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda dengan anggaran Rp.462.400.000,00 ditargetkan penyerapan anggaran mencapai 100%.
  - d. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) untuk Poktan Wawo dan Poktan Mori Sama di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota dengan anggaran Rp.150.000.000,00 ditargetkan penyerapan anggaran mencapai 100%.

### 3.1.2. Realisasi

Anggaran Tugas Pembantuan Pusat yang diterima Kota Bima Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima sebesar sebesar Rp. 5.972.400.000,00,- dengan realisasi mencapai 100% sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:



Tabel 3.1. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Kota Bima  
 Tahun Anggaran 2024

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rencana Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian Pertanian		<b>Kegiatan :</b> Bantuan Combine Harvester Besar. <b>Keluaran(Output) :</b> Tersalurnya bantuan Combine Harvester Besar (Gapoktan Maronci Kel.Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima)	Kota Bima	Dinas Pertanian Kota Bima	430.000.000	430.000.000	100	Tersalurkan bantuan combine harvester besar sesuai CPCL	100	
			<b>Kegiatan :</b> Bantuan Combine Harvester Besar. <b>Keluaran(Output) :</b> Tersalurnya bantuan Combine Harvester Besar (Kelompok tani So Tolo Woro Kel. Kodo Kec.Rasanae Timur Kota Bima)	Kota Bima	Dinas Pertanian Kota Bima	430.000.000	430.000.000	100	Tersalurkan bantuan combine harvester besar sesuai CPCL	100	
			<b>Kegiatan :</b> Bantuan Benih Jagung <b>Keluaran (Output) :</b> Tersalurnya Benih	Kota Bima	Dinas Pertanian Kota Bima	4.500.000.000	4.500.000.000	100	Tersalurkannnya Benih Jagung sesuai	100	





3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas Pembantuan dari provinsi yang di tugaskan kepada daerah kabupaten/kota

3.2.1. Target Kinerja

Program dan kegiatan Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian.

Pelaksanaan Program Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perternakan Kota Bima meliputi beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian.

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan jumlah anggaran Rp. 1.297.200.000,- ditargetkan penyerapan anggaran mencapai 100%.

3.2.2. Realisasi

Anggaran Tugas Pembantuan Propinsi yang diterima Kota Bima Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pertanian Kota Bima sebesar Rp. 1.071.600.000,- dengan realisasi mencapai 83% sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.2. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Kota Bima  
Tahun Anggaran 2024

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rencana Kegiatan	Kota	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB		<b>Program :</b> Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas <b>Kegiatan :</b> Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian <b>Output :</b> Tersedianya Prasarana Bidang Pertanian	Kota Bima	Dinas Pertanian Kota Bima	1.297.200.000	1.071.600.000	83	Tersalurkannya Bantuan sesuai dengan CPCL	83	



### 3.3. Permasalahan dan Kendala

#### a. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan diantaranya :

1. Peralatan berupa mesin dan pompa air 6 inch tidak ada di pasaran local di Kota Bima.
2. Sulitnya mobilisasi bahan pada beberapa Lokasi.
3. Kesibukan para petani pada beberapa kelompok yang bersamaan dengan waktu panen atau waktu tanam.
4. Terjadi bencana banjir bandang yang menyebabkan prasarana yang dibangun terbawa banjir mengikuti teknologi sesuai anjuran.

### 3.4. Saran dan Tidak Lanjut

#### a. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan

Saran dan Tidak Lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan diantaranya :

1. Tim menyarankan agar kelompok memesan mesin pada daerah lain atau pada kota Mataram, dan telah disepakati Bersama, bahwa mesin akan dipesan pada salah satu Toko Peralatan dan Mesin Diesel pada Toko Mujur di Kota Mataram.
2. Mendorong swadaya dan gotong royong kelompok.



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

3. Menyarankan agar anggota kelompok bisa membagi tugas, sehingga ada yang bekerja pada Pembangunan irigasi perpompaan dan Sebagian yang lain mengurus tanaman masing-masing.



## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### 4.1. Urusan Pendidikan

##### 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dan Peraturan Walikota Bima Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kota Bima merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal di Kota Bima dengan Jenis Pelayanan Dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Pendidikan Dasar
- 3) Pendidikan Kesetaraan

##### 4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bima dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan dengan Target Capaian Kinerja Pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).



Tabel 4. 1. Target SPM Pendidikan

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima
2	Pendidikan Dasar	100	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima
3	Pendidikan Kesetaraan	100	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima

#### 4.1.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Kota Bima tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2. Realisasi Target SPM Pendidikan

No	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4
1	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	79,79 %
2	Pendidikan Dasar		
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	97,88 %
3	Pendidikan Menengah Pertama		



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4
	tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	100%	97,66%
4	Pendidikan Kesetaraan		
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	80,94 %

#### 4.1.4. Alokasi Anggaran

##### a. APBD

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan selama tahun 2024 Pemerintah Kota Bima telah dialokasikan dana sebesar Rp. 64.569.836.750,00 dengan realisasai anggaran sebesar Rp. 53.648.129.377,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
1	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>61.384.016.950,00</b>	<b>50.490.713.599,00</b>
	a Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD	7.309.525.850,00	4.762.825.330,00
	b Pengelolaan Pendidikan Dasar	34.259.822.100,00	28.954.910.028,00
	c Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.814.669.000,00	16.772.978.241,00

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****PEMERINTAH KOTA BIMA****TAHUN 2024**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
2	<b>Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>28.050.000,00</b>	<b>28.050.000,00</b>
a	Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	28.050.000,00	28.050.000,00
3	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	<b>348.878.000,00</b>	<b>343.939.280,00</b>
a	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	218.778.000,00	215.867.400,00
b	Pemerdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	130.100.000	128.071.880,00
4	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	<b>2.836.941.800,00</b>	<b>2.813.476.498,00</b>
a	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	37.571.600,00	36.860.000,00
b	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	474.370.200,00	451.616.498,00
c	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.825.000.000,00	1.825.000.000,00
d	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	500.000.000,00	500.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>64.569.836.750,00</b>	<b>53.648.129.377,00</b>



Selain realisasi anggaran, berikut adalah rincian total APBD, total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, serta Persentase tahun 2024;

Tabel 4. 4. Komposisi Anggaran Daerah dengan Urusan Pendidikan

Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Urusan Pendidikan		
	Total APBD	Total Anggaran Urusan	Porsentase
1	2	3	4
2024	911.422.634.704,00	239.738.986.039,00	26,30%

b. APBN

Urusan Pendidikan selama tahun 2024 Pemerintah Kota Bima tidak menerima dari yang bersumber dari APBN.

c. Sumber Dana Lainnya

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan selama tahun 2024 Pemerintah Kota Bima tidak menerima Alokasi dana dari Sumber Dana Lainnya.

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima adalah 57 Orang dimana 41 Orang PNS dan 16 Orang PPPK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 5. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Magister (S2)	7
2	Sarjana (S1)	39
3	Diploma (D3)	4
4	SMA/Sederajat	7
5	SMP/Sederajat	-

Tabel 4. 6. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	2	3
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	36
3	Golongan II	2
4	Golongan I	-
5	Golongan IX	9
6	Golongan VII	2
7	Golongan V	1

Tabel 4. 7. Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Jumlah
1	2	3



1	Struktural	10
2	Fungsional	16
3	Pelaksana	31

Tabel 4. 8. Jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Pangkat	Jumlah
1	2	3
1	Pegawai Negeri Sipil	45
2	PPPK	12

#### 4.1.6. Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar.
- 2) Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP, masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana (S1).
- 3) Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru



belum sepenuhnya terpenuhi.

- 4) Standar kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih perlu diupayakan Standar Nasional.
- 5) Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan metode penghitungan baru belum mencapai angka 15,66 tahun sebagai indikasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

b. Solusi

Adapun Solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kota, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.
- 2) Melalui pemeratan di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru.
- 3) Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB.
- 4) Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah.

## 4.2. Urusan Kesehatan

### 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu



Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Walikota Bima Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kota Bima dengan Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Pelayanan kesehatan balita;
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat;
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);

#### 4.2.2. Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Bima dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).



Tabel 4. 9. Target SPM Kesehatan

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten/Kota	100	2024	Dinas Kesehatan Kota Bima
2	Porsentase Tingkat Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki Akreditasi	100	2024	Dinas Kesehatan Kota Bima
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	2024	Dinas Kesehatan Kota Bima
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	2024	Dinas Kesehatan Kota Bima
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	2024	Dinas Kesehatan Kota Bima
6	Pelayanan kesehatan balita	100	202	Dinas Kesehatan Kota Bima
7	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	2024	Dinas Kesehatan Kota Bima
8	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	202	Dinas Kesehatan Kota Bima
9	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	2024	Dinas Kesehatan Kota Bima
10	Pelayanan kesehatan penderita	100	2024	Dinas Kesehatan Kota Bima



No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
	hipertensi			
11	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	2024	Dinas Kesehatan Kota Bima
12	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	2024	Dinas Kesehatan Kota Bima
13	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	2024	Dinas Kesehatan Kota Bima
14	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	100	2024	Dinas Kesehatan Kota Bima

#### 4.2.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kota Bima tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 10. Realisasi Capaian SPM Kesehatan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4
1	Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		
	Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten/Kota	100%	0%
2	Rumah Sakit Rujukan yang telah memiliki Akreditasi		
	Jumlah Tingkat Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki Akreditasi	100%	0%
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan pelayanan K4 milik Pemerintah Daerah dan Swasta	100 %	80,25%
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
	Jumlah Ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	74,44%
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100 %	77,95%
6	Pelayanan kesehatan balita		
	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar + Jumlah Balita usia 36-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar	100 %	85,42%



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4
7	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar	100 %	102,19%
8	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		
	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai dengan standar	100 %	72,40%
9	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		
	Jumlah warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai dengan standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100 %	72,65 %
10	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		
	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar	100 %	97,58%
11	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		
	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar	100 %	100,32 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar	100 %	92,23 %
13	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4
	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis (TB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar	100 %	181,37%
14	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )		
	Jumlah Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar	100 %	98,45 %

#### 4.2.4. Alokasi Anggaran

##### a. APBD

Standar Pelayanan Minimal Urusan Bidang Kesehatan selama tahun 2024 telah dialokasikan dana sebesar Rp.32.339.497.418,00 dengan realisasi sebesar Rp.31.182.921.509,00- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 11. Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			
1	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	10.279.922.023	9.726.510.137
2	Cakupan pelayanan ibu hamil	362.719.700	353.270.500
3	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	16.100.000	15.661.888



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
4	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	154.095.845	144.925.000
5	Cakupan pelayanan kesehatan balita	43.960.000	43.960.000
6	Cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	25.486.700	25.483.200
7	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	27.752.600	25.659.000
8	Cakupan pelayanan kesehatan usia 60 tahun ke atas	5.000.000	5.000.000
9	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	99.445.100	86.312.414
10	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	28.246.600	28.140.604
11	Cakupan pelayanan kesehatan jiwa	23.400.000	23.300.000
12	Cakupan Pelayanan orang terduga TBC	292.303.400	291.680.500
13	Cakupan Pelayanan Orang dengan resiko terinfeksi HIV	77.178.500	73.846.000
<b>TOTAL</b>		<b>32.339.497.418</b>	<b>31.182.921.509</b>

Selain realisasi anggaran, berikut adalah rincian total APBD, total anggaran Dinas Kesehatan, serta persentase tahun 2024.

Tabel 4. 12. Komposisi Anggaran Daerah dengan Kesehatan

Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Urusan Kesehatan		
	Total APBD	Total Anggaran Urusan	Persentase
1	2	3	4
2024	911.422.634.704,00	32.339.497.418,00	3,55%

b. APBN



Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan selama tahun 2024 Pemerintah Kota Bima tidak menerima Alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

c. Sumber Dana Lainnya

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan selama tahun 2024 Pemerintah Kota Bima tidak menerima Alokasi dana dari Sumber Dana Lainnya.

4.2.5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bima adalah 91 Orang yaitu 71 Orang PSN dan 20 orang PPPK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 13. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Magister (S2)	11
2	Sarjana (S1)	65
3	Diploma (D3)	14
4	SMA/Sederajat	1
5	SMP/Sederajat	0

Tabel 4. 14. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
----	----------	--------



1	2	3
1	Golongan IV	27
2	Golongan III	44
3	Golongan II	0
4	Golongan I	0
5	Golongan VII	0
6	Golongan IX	19
7	Golongan X	1

Tabel 4. 15. Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Jumlah
1	2	3
1	Struktural	20
2	Fungsional	11
3	Pelaksana	60

Tabel 4. 16. Jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Pangkat	Jumlah
1	2	3
1	Pegawai Negeri Sipil	71
2	PPK	20
3	Honorar Daerah	0



#### 4.2.6. Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pencatatan dan pelaporan pelayanan yang terlalu banyak membuat programer tidak maksimal
- 2) Distribusi tenaga kesehatan yang sesuai standar belum merata
- 3) Kompetensi sdm masih kurang
- 4) Anggaran untuk pelaksanaan masih kurang sehingga pelayanan tidak maksimal
- 5) Sasaran/target yang terlalu tinggi
- 6) sistem pencatatan dan pelaporan terkait spm kesehatan masih belum terintegrasi
- 7) Advokasi lintas sektor baik level kelurahan, kecamatan maupun kabupaten belum berjalan dengan baik
- 8) Masih rendahnya pemahaman tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat permenkes nomor 04 tahun 2019
- 9) Ketidak patuhan sop
- 10) Dalam pelaksanaan kegiatan, sasaran yang datang keposyandu maupun pandu adalah orang yang sama (kurang sadarnya masyarakat dalam memeriksa kesehatan)
- 11) Perpindahan dimisili sasaran cukup tinggi



12) Keterbatasan sarana dan prasarana

b. Solusi

Adapun Solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Programmer harus focus pada pencatatan
- 2) Distribusi tenaga harus tepat
- 3) Programmer harus diberikan pelatihan
- 4) Penambahan anggaran untuk pelayanan
- 5) Penentuan sasaran harus melibatkan programmer kab/kota
- 6) System pencatatan harus terintegrasi
- 7) Advokasi lintas sektor harus berjalan dengan baik
- 8) Memberikan pemahaman kepada programmer untuk mencapai target SPM
- 9) Harus patuh pada SOP
- 10) Memberikan promosi kepada Masyarakat agar sadar dalam memeriksakan kesehatan baik di puskesmas maupun di posyandu
- 11) Melakukan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar

#### 4.3. Urusan Pekerjaan Umum

##### 4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar



Bedasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Walikota Bima Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum di Kota Bima, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di Kota Bima dengan Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

#### 4.3.2. Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Bima dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 4. 17. Target SPM Pekerjaan Umum

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kawasan Pemukiman yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	100	2024	Dinas PUPR Kota Bima
2	Penyediaan Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi	100	2024	Dinas PUPR Kota Bima



No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
	dan Akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai			
3	Penyediaan Daerah Irigasi Kewenangan yang dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100	2024	Dinas PUPR Kota Bima
4	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2024	Dinas PUPR Kota Bima
5	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	100	2024	Dinas PUPR Kota Bima
6	Penyediaan Kepatuhan IMB	100	2024	Dinas PUPR Kota Bima
7	Penyediaan Kemantapan Jalan	100	2024	Dinas PUPR Kota Bima
8	Penyediaan Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat	100	2024	Dinas PUPR Kota Bima
9	Penyediaan Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasan	100	2024	Dinas PUPR Kota Bima

#### 4.3.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum Kota Bima tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 18. Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum

No	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4
1	Penyediaan Kawasan Pemukiman yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir		



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Indikator	Target	Capaian
1	Jumlah Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	23,22%
2	Penyediaan Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai		
	Jumlah Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	6,61%
3	Penyediaan Daerah Irigasi Kewenangan yang dilayani Oleh Jaringan Irigasi		
	Jumlah Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100%	43,45%
4	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari		
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	100%	89,06%
5	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik		
	Jumlah rumah memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	100%	98,67%
6	Penyediaan Kepatuhan IMB		
	Jumlah kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	100%	100%
7	Penyediaan Kemantapan Jalan		
	Jumlah Tingkat Kemantapan Jalan	100%	61,84%
8	Penyediaan Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat		



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4
	Jumlah Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	100%	1,91%
9	Penyediaan Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasan		
	Jumlah Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%

#### 4.3.4. Alokasi Anggaran

##### a. APBD

Untuk Tahun 2024 APBD Kota Bima (DPA Dinas PUPR) berjumlah Rp. 76.736.456.587,00,- termasuk anggaran untuk Urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp. 17.895.923.191,00,- dan realisasi sebesar Rp. 15.861.502.235,00- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.19. Alokasi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.008.426.691,00</b>	<b>9.062.617.891,00</b>
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	289.514.000,00	263.862.000,00
2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	84.549.200,00	80.024.100,00
3	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	163.028.000,00	162.277.700,00
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum SPAM	5.267.133.900,00	4.196.334.827,00
5	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	871.825.502,00	850.045.750,00
6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	4.332.376.089,00	3.510.073.514,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.887.496.500,00</b>	<b>6.798.884.344,00</b>
1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	296.044.000,00	212.880.844,00
2	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	6.591.452.500,00	6.586.003.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17.895.923.191,00</b>	<b>15.861.502.235,00</b>

Selain realisasi anggaran, berikut adalah rincian total APBD, total anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima Tahun 2024.

Tabel 4. 20. Komposisi Anggaran Daerah dengan Pekerjaan Umum

Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Urusan Pekerjaan Umum		
	Total APBD	Total Anggaran Urusan Pekerjaan Umum	Porsentase
1	2	3	4
2024	911.422.634.704,00	17.895.923.191,00	1,96%

b. APBN

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum selama tahun 2024 Pemerintah Kota Bima yang bersumber dari APBN menurut peraturan perundang-undangan tidak ada.

c. Sumber Dana Lainnya

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum selama tahun 2024 Pemerintah Kota Bima yang bersumber dari dana lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan tidak ada.



#### 4.3.5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima adalah adalah 76 Orang dengan 50 orang PNS dan 26 PPPK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 21. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Magister (S2)	8
2	Sarjana (S1)	58
3	Diploma (D3)	1
4	SMA/Sederajat	7
5	SMP/Sederajat	2

Tabel 4. 22. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	2	3
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	55
3	Golongan II	4
4	Golongan I	0
5	Golongan VII	1
6	Golongan IX	8
7	Golongan X	0

Tabel 4. 23. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat



No	Pangkat	Jumlah
1	2	3
1	Struktural	14
2	Fungsional	26
3	Pelaksana	36

Tabel 4. 24. Jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Pangkat	Jumlah
1	2	3
1	Pegawai Negeri Sipil	50
2	PPPK	26

#### 4.3.6. Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- 1) Belum dilakukan Pemutakhiran Data Penyediaan Air Minum dan Penyediaan Akses Air Limbah Domestik
- 2) Kurangnya Prasarana dan Sarana Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung SPM tersebut.

##### b. Solusi

Solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan Pemutakhiran Data berupa Data Base Air Minum dan Data Base Air Limbah Domestik yang



dilakukan setiap tahun.

- 2) Meningkatkan Koordinasi dengan pihak instansi terkait maupun Lintas Daerah tentang Penanganan Air Minum dan Air Limbah Domestik.
- 3) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan Air Minum dan Air Limbah Domestik.

#### 4.4. Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Bedasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Walikota Bima Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat di Kota Bima, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg Layak huni bagi korban bencana Daerah.
- 2) Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

##### 4.4.2. Target Pencapaian SPM



Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Bima dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 4. 25. Target SPM Perumahan Rakyat

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg Layak huni bagi korban bencana Daerah	100	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Bima
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Bima
3	Penyediaan Kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha ditangani	100	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Bima
4	Penyediaan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	100	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Bima
5	Penyediaan unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	100	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Bima

#### 4.4.3. Realisasi



Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Kota Bima tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 26. Realisasi Capaian SPM Perumahan Rakyat

No	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg Layak huni bagi korban bencana Daerah		
	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani Pada Tahun n	100 %	89,00 %
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah		
	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	100 %	94,72 %
3	Penyediaan Kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha ditangani		
	Kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha ditangani	100 %	37,05%
4	Penyediaan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		
	Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	100 %	23,36%
5	Penyediaan unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU		
	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	100 %	0%

#### 4.4.4. Alokasi Anggaran

##### a. APBD

Jumlah APBD Kota Bima tahun 2024 sebesar Rp.911.422.634.704,00 yang dialokasikan anggaran untuk Urusan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 2.533.088.115,00, dan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

realisasi sebesar Rp. 2.335.812.593,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 27. Alokasi Anggaran Bidang Perumahan Rakyat

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>1.109.966.380,00</b>	<b>987.869.793,00</b>
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	289.183.080,00	244.309.500,00
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	476.497.000,00	440.027.000,00
3	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	344.286.300,00	303.533.293,00
II	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>1.423.121.735,00</b>	<b>1.347.942.800,00</b>
4	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	79.404.300,00	63.358.800,00
5	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	87.447.100,00	84.661.200,00
6	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.256.270.335,00	1.199.922.800,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.533.088.115,00</b>	<b>2.335.812.593,00</b>

Selain realisasi anggaran, berikut adalah rincian total APBD, total anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bima, serta persentase tahun 2024.

Tabel 4. 28. Komposisi Anggaran Daerah dengan Perumahan rakyat



Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Urusan Perumahan Rakyat		
	Total APBD	Total Anggaran	Persentase
1	2	3	4
2024	911.422.634.704,00	2.533.088.115,00	0,28 %

b. APBN

Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat selama tahun 2024, Pemerintah Kota Bima tidak ada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

c. Sumber Dana Lainnya

Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat selama tahun 2024 Pemerintah Kota Bima tidak menerima Alokasi Anggaran yang bersumber dari dana lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

4.4.5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Bima adalah 34 Orang dengan 24 orang PNS dan 10 PPPK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 29. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Magister (S2)	3



2	Sarjana (S1)	26
3	Diploma (D3)	1
4	SMA/Sederajat	3
5	SMP/Sederajat	1

Tabel 4. 30. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	2	3
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	16
3	Golongan II	1
4	Golongan I	1
5	Golongan IX	8
6	Golongan V	2

Tabel 4. 31. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Jumlah
1	2	3
1	Struktural	7
2	Fungsional	14
3	Pelaksana	13

Tabel 4. 32. Jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Pangkat	Jumlah
1	2	3



1	Pegawai Negeri Sipil	24
2	PPPK	10

#### 4.4.6. Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah seharusnya menjadi program di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak dapat dilakukan karena kegiatan tersebut dilaksanakan di Dinas PUPR.
- 2) Program Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg Layak huni bagi korban bencana Daerah tidak dapat dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman karena kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BPBD yang bertidak sebagai badan penanggulangan bencana Kota Bima.

##### b. Solusi

Adapun Solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan Tugas dan wewenang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bima dengan Tugas dan wewenang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB, sehingga Fasilitasi



Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dan Program Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg Layak huni bagi korban bencana Daerah bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bima, agar tidak terjadi double kegiatan di dinas PUPR maupun BPBD.

#### 4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

##### 4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Pelayanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bima, pemenuhan kebutuhan dasar layanan sub urusan bencana daerah, sub urusan kebakaran daerah dan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum berhak diperoleh setiap warga Indonesia yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana, korban kebakaran



atau terdampak kebakaran, serta yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
- 3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

#### 4.5.2. Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Bima dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 4. 33. Target SPM

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	2024	Dinas Pol PP Kota Bima
2	Perda dan Perkada yang ditegakan	100	2024	Dinas Pol PP Kota Bima
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	2024	BPBD Kota Bima



No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	2024	BPBD Kota Bima
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	2024	BPBD Kota Bima
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	2024	Dinas Pol PP Kota Bima
7	Rata-rata Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100	2024	Dinas Pol PP Kota Bima

#### 4.5.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Bima tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 34. Realisasi Capaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	Jumlah warga Negara yang memperoleh Pelayanan akibat dari penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	100 %	100 %
2	Perda dan Perkada yang ditegakan		



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4
	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	100%
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %	82,40%
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan + Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops + Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan	100 %	1,00%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB + Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana + Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana + Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	100 %	100%
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di daerah pada Tahun n dalam tingkat waktu tanggap ( <i>response time</i> )	100 %	100 %
7	Response time penanganan kebakaran		
	Rata-rata Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran	100%	6,7 Menit

#### 4.5.4. Alokasi Anggaran

##### a. APBD

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan



Perlindungan Masyarakat selama tahun 2024 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 4.883.605.080,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.917.960.886,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 35. Alokasi Anggaran Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Dinas Pol PP Kota Bima</b>	1.640.860.600,00	713.809.700,00
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	696.729.600,00	245.045.500,00
a	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah Dini , Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan pengawalan	260.255.600,00	52.235.000,00
b	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	204.529.000,00	116.050.500,00
c	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	231.945.000,00	76.760.000,00
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	944.131.000,00	468.764.200,00
a	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	247.723.500,00	97.936.000,00
b	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	15.071.500,00	0,00
c	Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	681.336.000,00	294.068.200,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
<b>B</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima</b>	<b>1.576.544.900,00</b>	<b>1.065.343.586,00</b>
1	<i>Program Penanggulangan Bencana</i>	1.576.544.900,00	1.065.343.586,00
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	200.350.00000	175.010.000,00
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	696.729.600,00	245.045.500,00
c	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	337.369.300,00	317.945.023,00
d	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	342.096.000,00	327.343.063,00
<b>C</b>	<b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>	<b>1.666.199.580,00</b>	<b>1.138.807.600,00</b>
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.666.199.580,00	1.138.807.600,00
a	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.096.643.780,00	582.460.900,00
b	Investigasi Kejadian Kebakaran	25.467.500,00	25.347.500,00
c	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	34.185.100,00	30.195.100,00
d	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	29.658.200,00	23.501.200,00
e	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	20.998.000,00	20.998.000,00
f	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	459.247.000,00	456.304.900,00



No	Program	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
TOTAL		4.883.605.080,00	2.917.960.886,00

Selain realisasi anggaran, berikut adalah rincian total APBD, total anggaran bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Bima, serta persentase tahun 2024.

Tabel 4. 36. Komposisi Anggaran Daerah dengan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
	Total APBD	Total Anggaran	Persentase
1	2	3	4
2024	911.422.634.704,00	4.883.605.080,00	0,54%

b. APBN

Pemerintah Kota Bima dalam bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Bima selama tahun 2024 tidak mendapatkan dialokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

c. Sumber Dana Lainnya

Pemerintah Kota Bima dalam bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Bima selama tahun 2024 tidak mendapatkan alokasikan dana dari sumber dana lainnya.



#### 4.5.5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pol PP Kota Bima adalah 40 Orang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah 32 Orang dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 37 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 37. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
<b>DINAS POLISI PAMONG PRAJA (POL PP)</b>		
1	Magister (S2)	3
2	Sarjana (S1)	29
3	Diploma (D3)	-
4	SMA/Sederajat	6
5	SMP/Sederajat	2
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)</b>		
1	Magister (S2)	3
2	Sarjana (S1)	27
3	Diploma (D3)	0
4	SMA/Sederajat	2
5	SMP/Sederajat	0
<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>		
1	Magister (S2)	3



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

2	Sarjana (S1)	17
3	Diploma (D3)	0
4	SMA/Sederajat	17
5	SMP/Sederajat	0

Tabel 4. 38. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	2	3
<b>DINAS POLISI PAMONG PRAJA (POL PP)</b>		
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	33
3	Golongan II	2
4	Golongan I	-
5	Golongan IX	-
6	Golongan V	-
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)</b>		
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	16
3	Golongan II	1
4	Golongan I	0
5	Golongan IX	10
6	Golongan V	0
<b>DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>		



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Golongan	Jumlah
1	2	3
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	22
3	Golongan II	1
4	Golongan I	0
5	Golongan IX	1
6	Golongan V	6

Tabel 4. 39. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Jumlah
1	2	3
	<b>DINAS POLISI PAMONG PRAJA (POL PP)</b>	
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	6
4	Non Eselon/Staf	27
5	Fungsional	3
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)</b>	
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	1
4	Non Eselon/Staf	10



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Pangkat	Jumlah
1	2	3
5	Fungsional	16
<b>DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>		
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	6
4	Non Eselon/Staf	18
5	Fungsional	9

Tabel 4. 40. Jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Pangkat	Jumlah
1	2	3
<b>DINAS POLISI PAMONG PRAJA (POL PP)</b>		
1	Struktural	7
2	Fungsional	3
3	Pelaksana	30
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)</b>		
1	Struktural	6
2	Fungsional	16
3	Pelaksana	10
<b>DINAS PEMDAM KEBAKARAN KOTA BIMA</b>		
1	Struktural	10
2	Fungsional	9



3	Pelaksana	18
---	-----------	----

#### 4.5.6. Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman anggota Satpol PP terhadap kewenangan, tugas dan fungsi Satpol PP.
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan, dan sarana pendukung untuk operasi penertiban ternak
- 3) Masih Kurangnya personil Satpol PP dalam penegakan Perda dan Produk Hukum Daerah Lainnya.
- 4) Kurangnya pemahaman anggota Satpol PP terhadap proses evakuasi dan perlindungan masyarakat.
- 5) Kegiatan yang telah direncanakan dan sudah tersedia anggarannya tetapi pelaksanaannya tidak bisa maksimal karena menurunnya semangat dan keikutsertaan peserta kegiatan terutama kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang.
- 6) Adanya kendala pencairan dana APBD atau dana transfer sehingga menyebabkan semua pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan yang dilaksanakan hingga bulan November dibatasi dengan keluarnya Surat Edaran Walikota Bima Tentang Batas Akhir Pengajuan GU/TU/NIHIL, sehingga banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi tidak bisa dibayarkan sampai batas



waktu berakhir.

- 7) Masih kurangnya jumlah personil Satgas Damkar dalam melaksanakan piket.
- 8) Terbatasnya anggaran untuk operasional Penanggulangan, Pemadanan, Pencegahan Kebakaran.
- 9) Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran.
- 10) Masih banyak personil Satgas Damkar yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta belum memiliki sertifikat keahlian sebagai tenaga pemadam kebakaran.

b. Solusi

Adapun Solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Harus dilakukan Pendidikan dan Pelatihan terhadap semua anggota Satpol PP, Damkar, dan BPBD secara bertahap.
- 2) Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional, dan sarana untuk penertiban ternak liar yang berukuran besar.
- 3) Memberikan kesempatan kepada personil satgas Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan guna mengoptimalkan tugas-tugas secara teknis.
- 4) Mengupayakan *refocusing* anggaran dengan mempertahankan output kegiatan yang direncanakan dengan pertimbangan efisiensi anggaran, meskipun ada beberapa kegiatan yang terpaksa harus di hapus/ditiadakan.



- 5) Melaksanakan kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak orang dengan penjadwalan dan pengelompokan peserta secara *shift* agar tetap melaksanakan protokol kesehatan meskipun kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan-bulan akhir.
- 6) Mengusulkan penambahan jumlah personil damkar sehingga secara kuantitas terpenuhi jumlah tenaga dalam kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 7) Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah untuk kegiatan operasional, sehingga seluruh operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Bima dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
- 8) Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah daerah Kota Bima untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran.
- 9) Menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan personil damkar agar mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta sertifikat keahlian sebagai tenaga pemadam kebakaran.

#### 4.6. Urusan Sosial

##### 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Bedasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar



Pelayanan Minimal Pedoman Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sosial, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial di daerah berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Sosial sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas telantar di luar panti sosial.
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar anak telantar di luar panti sosial.
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut Usia terlantar di luar panti sosial.
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

#### 4.6.2. Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Bima dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Sosial dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 4. 41. Target SPM Sosial

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas telantar di luar panti	100	2024	Dinas Sosial Kota Bima



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
	sosial			
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	100	2024	Dinas Sosial Kota Bima

#### 4.6.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar bidang Sosial Kota Bima tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 42. Realisasi Capaian SPM Sosial

No	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas telantar di luar panti sosial		
	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100 %	54,43%
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana		
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %



#### 4.6.4. Alokasi Anggaran

##### a. APBD

Urusan Sosial selama tahun 2024 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1.914.603.200,00- dengan realisasi sebesar Rp. 1.795.436.800,00- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 43. Alokasi Anggaran Bidang Sosial

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1.192.185.800,00</b>	<b>1.113.521.800,00</b>
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	740.403.500,00	711.574.500,00
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	451.782.300,00	401.947.300,00
<b>II</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>329.957.400,00</b>	<b>306.835.000,00</b>
1	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	28.047.000,00	14.140.000,00
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	301.910.400,00	292.695.000,00
<b>III</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>392.460.000,00</b>	<b>375.080.000,00</b>
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan Sosial Kabupaten/Kota	192.740.000,00	181.325.000,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	199.720.000,00	193.755.000,00
<b>TOTAL</b>		1.914.603.200,00	1.795.436.800,00

Selain realisasi anggaran, berikut adalah rincian total APBD, total anggaran Urusan Sosial, serta peresentase tahun 2024.

Tabel 4.44. Komposisi Anggaran Daerah dengan Sosial

Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Urusan Sosial		
	Total APBD	Total Anggaran Urusan	Porsentase
1	2	3	4
2024	911.422.634.704,00	1.914.603.200,00	0,21%

b. APBN

Pemerintah Kota Bima dalam bidang Urusan Sosial selama tahun 2024 tidak mendapatkan dialokasikan dana dari APBN.

c. Sumber Dana Lainnya

Pemerintah Kota Bima dalam bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Bima selama tahun 2024 tidak mendapatkan alokasikan dana dari sumber dana lainnya.



#### 4.6.5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kota Bima adalah 36 Orang yaitu 33 Orang PNS dan 3 Orang PPPK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.45. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Magister (S2)	2
2	Sarjana (S1)	29
3	Diploma (D3)	1
4	Diploma (D2)	1
5	SMA/Sederajat	3

Tabel 4.46. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	2	3
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	26
3	Golongan II	2
4	Golongan I	0
5	Golongan IX	3
6	Golongan V	-

Tabel 4.47. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat



No	Pangkat	Jumlah
1	2	3
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	1
4	Non Eselon/Staf	22
5	Fungsional	8

Tabel 4. 48. Jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Pangkat	Jumlah
1	2	3
1	Struktural	5
2	Fungsional	8
3	Pelaksana	23

#### 4.6.6. Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial adalah sebagai berikut : Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum dimutakhirkan.
- 2) Belum semua PMKS dapat tertangani.
- 3) Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

##### b. Solusi



Adapun Solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan aparaturnya kelurahan, instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 3) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

#### 4.7. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.49 Program dan Kegiatan SKPD Pelaksana Standar Pelayanan Minimal Kota Bima Tahun 2024

No	Urusan Yang dilaksanakan	Program dan kegiatan	OPD Pelaksana
1	2	3	4
1	Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	I	Program Pengelolaan Pendidikan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

		1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		4	Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	
2	Kesehatan			DINAS KESEHATAN
	I	<b>Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>		
		1	Cakupan pelayanan ibu hamil	
		2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	
		3	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
		4	Cakupan pelayanan kesehatan balita	
		5	Cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	
	II	<b>Program Pengendalian penyakit tidak menular</b>		
		6	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	
		7	Cakupan pelayanan kesehatan usia 60 tahun ke atas	
		8	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	
		9	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	
		10	Cakupan pelayanan kesehatan jiwa	
	III	<b>Program Pengendalian Penyakit menular</b>		
		11	Cakupan Pelayanan orang terduga TBC	
		12	Cakupan Pelayanan Orang dengan resiko terinfeksi HIV	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	I	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	
		2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	
		3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	
		4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	
		5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	
		6	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	
		7	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	
	II	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		
		8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		9	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	I	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>		
		1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

			Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		3	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	<b>II</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
		4	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
		5	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
		6	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			TRANTIBUMLIN MAS
A		<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BIMA</b>		
	<b>I</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten/ Kota</b>		
		1	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah Dini , Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan pengawalan	
		2	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	
		3	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	
	<b>II</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>		
		4	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	
		5	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	
		6	Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

			Peraturan Bupati/Walikota	
<b>B</b>		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BIMA</b>		
	<b>I</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		
		1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	
		2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		3	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	
		4	Kegiatan Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	
<b>C.</b>		<b>DINAS PEMADAM KABAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BIMA</b>		
	<b>I</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		
		1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2	Investigasi Kejadian Kebakaran	
		3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
		4	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	
		5	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
		6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
<b>6</b>	<b>Sosial</b>			<b>DINAS SOSIAL</b>
	<b>I</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		
		1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**TAHUN 2024**

			Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
	<b>II</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		
		3	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	
		4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>III</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		
		5	Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
		6	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri melalui Gubernur, yang dilaksanakan sekali dalam setahun. Hal tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Pusat dapat memantau dan memahami tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sekaligus untuk perekat Persatuan dan Kesatuan.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintah dan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, koordinasi, penyempurnaan dan pengembangan.

Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, yang sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima, secara jujur dan sangat disadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.



Secara jujur dan sangat disadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama, disadari pula bahwa masih panjang jalan yang harus ditempuh, banyak anggaran yang dibutuhkan, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, banyak kreasi dan inovasi yang harus ditumbuhkan. Oleh karena itu, segala dukungan dan masukan dari berbagai pihak sangatlah diperlukan karena menentukan perjalanan Kota Bima masa kini dan masa yang akan datang.

Apabila ada hal-hal yang belum tersampaikan dalam laporan ini, tidaklah berarti kami telah meninggalkan prinsip-prinsip keterbukaan yang selama ini telah berjalan dengan baik, tetapi itu lebih disebabkan oleh luasnya materi yang harus disampaikan. Demikian pula, apabila yang telah dilakukan merupakan keberhasilan, ini merupakan keberhasilan masyarakat dan kita semua. Namun, apabila dipandang sebagai kegagalan, itu karena keterbatasan kami sebagai manusia biasa dan ini merupakan pelajaran yang berharga bagi kami untuk berbuat lebih baik lagi.

Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik selama ini, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan yang ada. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin